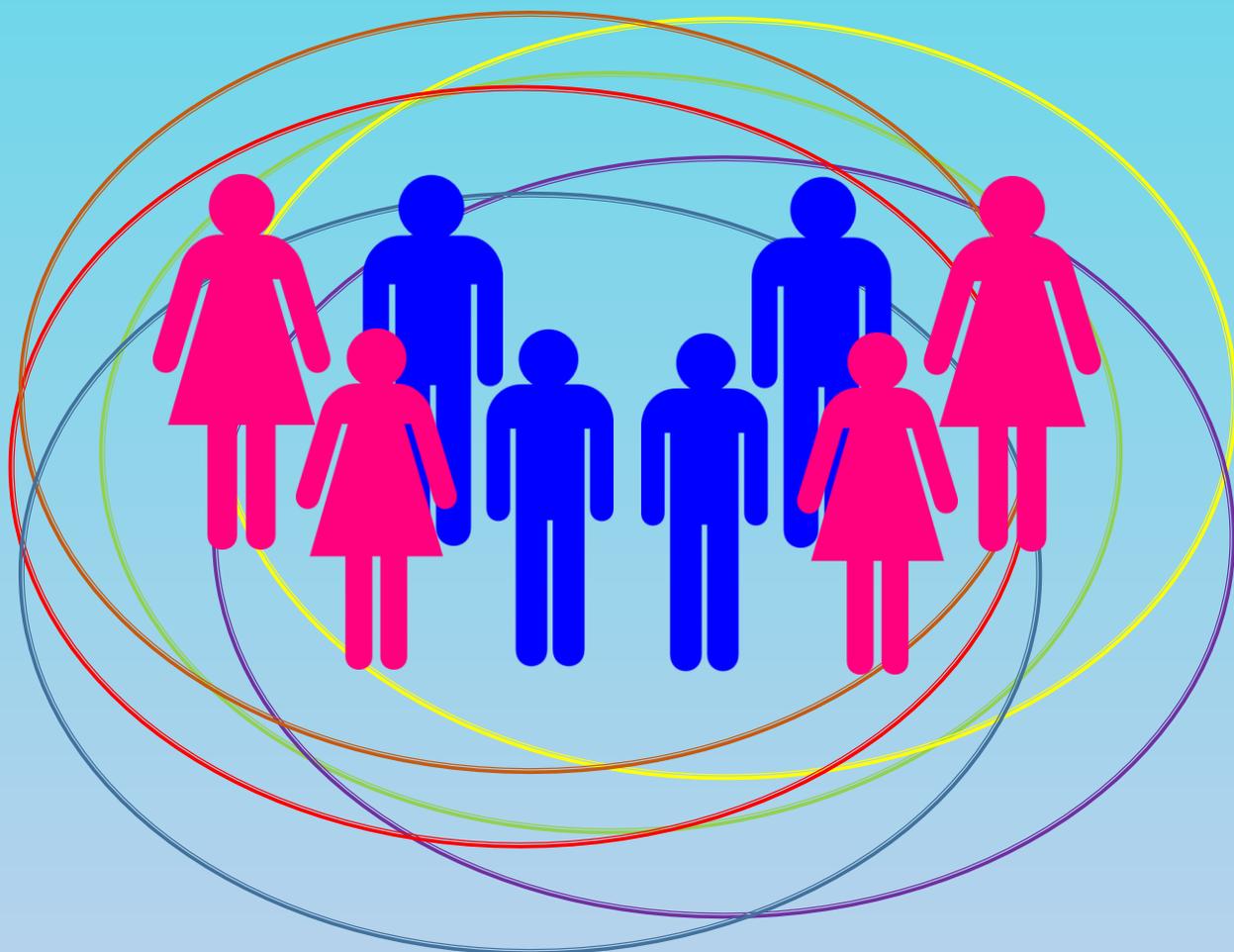


PROFIL GENDER

PROVINSI SUMATERA UTARA

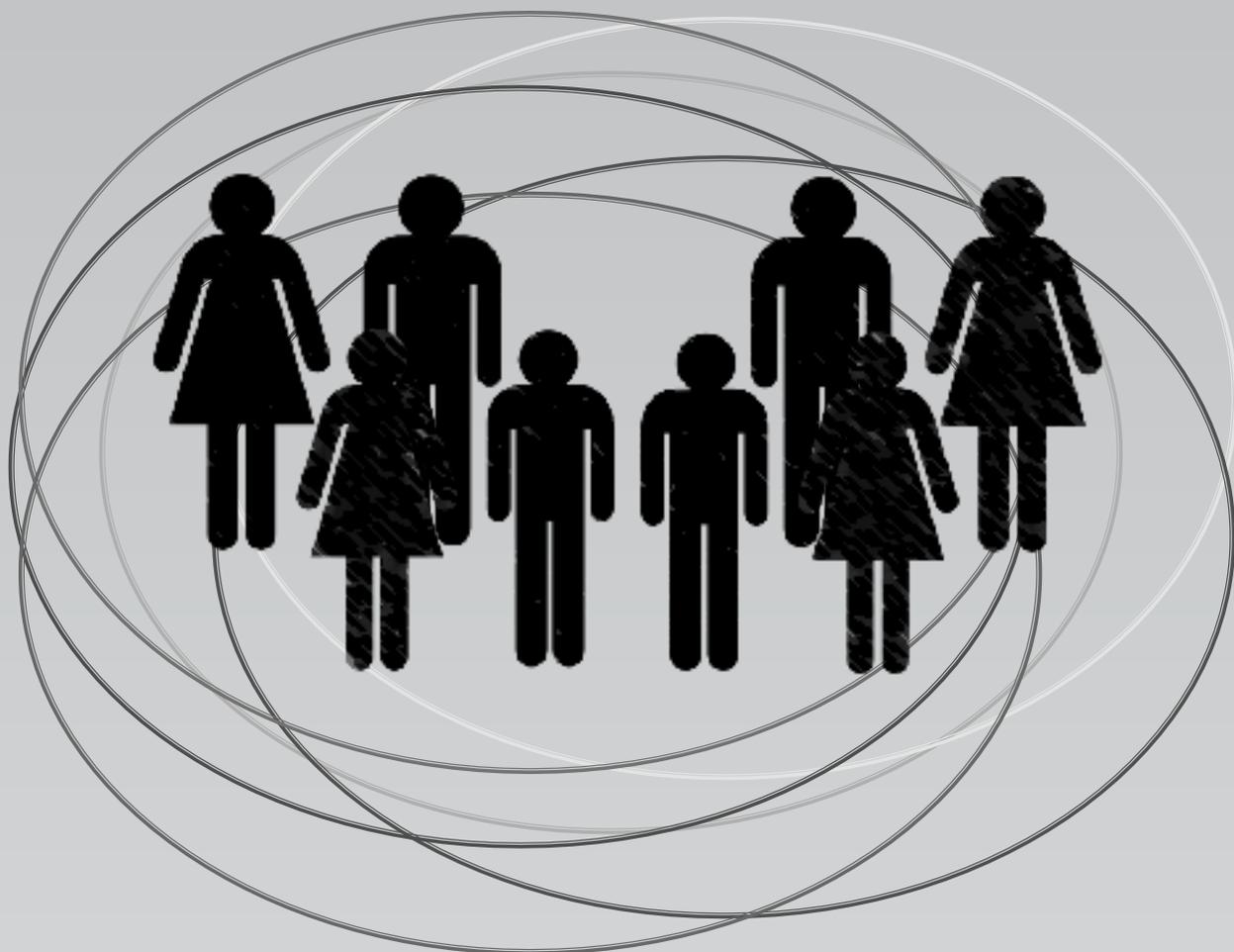
2019



PROFIL GENDER

PROVINSI SUMATERA UTARA

2019



TIM PENYUSUN

Pengarah:

DR. SYECH SUHAIMI

Penanggungjawab:

MUKHAMAD MUKHANIF, S.Si, M.Si

Editor:

AGUSTINA DWIANA P.S, S.Si, M.M

ABDUL HAKIM PARAPAT, SST, M.Si

Penulis dan Pengumpul Data:

KURNIA, SST, M.Si

SRI HASTUTI, SST, M.Si

VIANE DORTHEA TIWA, SST

Pengolah Data dan Kover:

KURNIA, SST, M.Si

SAMBUTAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	8
1.3 Sumber Data.....	9
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH	13
2.1 Geografis.....	13
2.2 Sejarah.....	13
2.3 Sosial Budaya.....	20
BAB 3 PENDUDUK	25
3.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk.....	26
3.2 Struktur Umur Penduduk.....	29
3.3 Status Perkawinan.....	31
3.4 Peran Domestik Perempuan dalam Keluarga.....	32
3.5 Perkembangan Capaian Pembangunan Gender Sumatera Utara.....	34
3.6 Capaian Pembangunan Gender Antarwilayah.....	36
BAB 4 PENDIDIKAN	41
4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK).....	44
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	46
4.3 Angka Partisipasi Murni (APM).....	47
4.4 Angka Melek Huruf (AMH).....	49
4.5 Angka Putus Sekolah.....	49
4.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan.....	51
4.7 Rata-rata Lama Sekolah.....	54

BAB 5	KESEHATAN	59
	5.1 Pembangunan Kesehatan.....	59
	5.2 Usia Harapan Hidup.....	60
	5.3 Angka Kesakitan.....	61
	5.4 Usia Perkawinan Pertama.....	63
	5.5 Keluarga Berencana.....	64
	5.6 Perilaku Merokok.....	65
	5.7 Ibu Hamil.....	67
	5.8 Jaminan Kesehatan.....	69
	5.9 HIV/AIDS.....	71
BAB 6	KETENAGAKERJAAN	75
	6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	76
	6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	79
	6.3 Pekerja Formal dan Informal.....	81
	6.4 Pekerja Menurut Lapangan Usaha.....	83
	6.5 Pekerja Menurut Jam Kerja.....	85
	6.6 Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama.....	86
	6.7 Setengah Pengangguran.....	87
	6.8 Pengangguran Terdidik.....	89
BAB 7	POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	93
	7.1 Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.....	93
	7.2 Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin.....	97
	7.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin.....	99
	7.4 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin	102
	7.5 Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa dan Jenis Kelamin.....	107
	7.6 Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	110
	7.7 Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin.....	115
	7.8 Jumlah Polisi Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin.....	117
BAB 8	HUKUM	127
	8.1 Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara.....	127

BAB 9	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	133
9.1	Upaya Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	133
9.2	Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	135
9.2.1	Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	135
9.2.2	Definisi Kekerasan Terhadap Anak.....	137
9.3	Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	139
9.4	Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	150

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018.....	27
Tabel 3.2	Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2018.....	28
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Sumatera Utara menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2018.....	32
Tabel 3.4	Perkembangan IPM dan IPG Sumatera Utara Tahun 2012-2018.....	36
Tabel 4.1	Sepuluh Besar Kabupaten/Kota Dengan Persentase Siswa Putus Sekolah Terbesar Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	50
Tabel 6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Agustus 2018.....	77
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Bekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	82
Tabel 6.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	84
Tabel 7.1	Jumlah Bupati/Walikota Dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	96
Tabel 7.2	Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	98
Tabel 7.3	Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	101
Tabel 7.4	Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	105
Tabel 7.5	Jumlah Jaksa menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Di Sumatera Utara Tahun 2018.....	109

Tabel 7.6	Jumlah Hakim Dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	114
Tabel 7.7	Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Di Sumatera Utara Tahun 2018.....	116
Tabel 7.8	Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Di Sumatera Utara Tahun 2018.....	123
Tabel 8.1	Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2018.....	30
Gambar 3.2	Persentase Kepala Rumah tangga menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	33
Gambar 3.3	Pembagian Kuadran Kabupaten/Kota berdasarkan Angka IPG dan IPM Tahun 2018.....	37
Gambar 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2018.....	47
Gambar 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	48
Gambar 4.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Dimiliki di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	52
Gambar 4.4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	55
Gambar 5.1	Usia Harapan Hidup menurut Jenis Kelamin, 2016-2018	60
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	62
Gambar 5.3	Persentase Perempuan berusia 10 tahun Ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin dan Usia perkawinan Pertama Tahun 2018.....	64
Gambar 5.4	Persentase Perempuan berusia 15-49 tahun Ke Atas yang Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan Tahun 2018.....	65
Gambar 5.5	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin Tahun 2017.....	67
Gambar 5.6	Persentase Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan ke	68

	Pelayanan Kesehatan (K1-K4) dan yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2018.....	
Gambar 5.7	Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Td Tahun 2018.....	69
Gambar 5.9	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2018.....	70
Gambar 6.1	Persentase TPAK Menurut Klasifikasi Daerah dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	76
Gambar 6.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	78
Gambar 6.3	Persentase TPT Menurut Klasifikasi Daerah dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	80
Gambar 6.4	Persentase TPT Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	81
Gambar 6.5	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	85
Gambar 6.6	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	86
Gambar 6.7a	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pekerja Paruh Waktu, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, Agustus 2018	88
Gambar 6.7b	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pekerja Setengah Penganggur, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, Agustus 2018.....	88
Gambar 6.8	Persentase TPT Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	90
Gambar 8.1	Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	129
Gambar 9.1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur Di Provinsi Sumatera Utara.....	139
Gambar 9.2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara.....	140

Gambar 9.3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan Di Provinsi Sumatera Utara.....	141
Gambar 9.4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara.....	142
Gambar 9.5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan Di Provinsi Sumatera Utara.....	143
Gambar 9.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara.....	144
Gambar 9.7	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Kegiatan Utama Di Provinsi Sumatera Utara.....	145
Gambar 9.8	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pekerjaan Di Provinsi Sumatera Utara.....	146
Gambar 9.9	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan Di Provinsi Sumatera Utara.....	147
Gambar 9.10	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Kekerasan Di Provinsi Sumatera Utara.....	149
Gambar 9.11	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan Di Provinsi Sumatera Utara.....	150
Gambar 9.12	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Utara.....	151
Gambar 9.13	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kewarganegaraan Di Provinsi Sumatera Utara.....	152
Gambar 9.14	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban Di Provinsi Sumatera Utara.....	152

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel L-3.1	Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018.....	161
Tabel L-3.2	Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018.....	162
Tabel L-3.3	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018.....	163
Tabel L-3.4	Persentase Penduduk Laki-laki 10 tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018.....	164
Tabel L-3.5	Persentase Penduduk Perempuan 10 tahun ke atas Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018.....	165
Tabel L-3.6	Persentase Penduduk 10 tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018.....	166
Tabel L-3.7	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2018.....	167
Tabel L-3.8	Persentase Penduduk yang Ber-status Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018.....	168
Tabel L-3.9	Angka IPM dan IPG Menurut Kabupaten/Kota dan IPM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	169
Tabel L-4.1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	170
Tabel L-4.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	171
Tabel L-4.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	172

Tabel L-4.1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	173
Tabel L-4.2.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	174
Tabel L-4.2.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	175
Tabel L-4.2.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	176
Tabel L-4.2.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 19-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	177
Tabel L-4.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	178
Tabel L-4.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	179
Tabel L-4.3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	180
Tabel L-4.3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	181
Tabel L-4.4	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	182
Tabel L-4.5.1	Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	183
Tabel L-4.5.2	Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	184

Tabel L-4.5.3	Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	185
Tabel L-4.6.1	Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dibawah SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	186
Tabel L-4.6.2	Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	187
Tabel L-4.6.3	Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Akademi/Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	188
Tabel L-4.7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.....	189
Tabel L-5.1	Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2017-2018.....	190
Tabel L-5.2	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018.....	191
Tabel L-5.3	Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Usia Perkawinan Pertama, 2018.....	192
Tabel L-5.4	Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat KB, 2018.....	193
Tabel L-5.5	Persentase Wanita Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan Menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	194
Tabel L-5.5	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2017.....	196

Tabel L-5.7	Jumlah Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke Sarana Pelayanan Kesehatan (K1-K4) menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	199
Tabel L-5.8	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Tablet zat Besi (Fe) menurut Kabupaten/Kota, 2018.....	200
Tabel L-5.9	Jumlah Puskesmas, Ibu Hamil dan Imunisasi Tetanus Difteri pada Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota, 2018	201
Tabel L-5.10.1	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Laki-laki).....	204
Tabel L-5.10.2	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Perempuan).....	205
Tabel L-5.10.3	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Laki-laki+Perempuan).....	206
Tabel L-5.11	Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2018.....	207
Tabel L-6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	208
Tabel L-6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	209
Tabel L-6.3	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Di Sektor Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	210
Tabel L-6.4	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Di Sektor Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	211
Tabel L-6.5	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018.....	212
Tabel L-6.6	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2018	217

Tabel L-6.7	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2018.....	219
Tabel L-6.8	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pekerja Tidak Penuh, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2018.....	222
Tabel L-6.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Agustus 2018.....	223
Tabel L-6.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/ Kota, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Agustus 2018.....	224
Tabel L-9.1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	225
Tabel L-9.2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	227
Tabel L-9.3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	228
Tabel L-9.4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Kegiatan Utama, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	230
Tabel L-9.4.1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Pekerjaan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	233
Tabel L-9.5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Jenis Kekerasan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018	235

Tabel L-9.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Tempat Kejadian Kekerasan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	238
Tabel L-9.7	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Jenis Layanan yang Diberikan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	241
Tabel L-9.8	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	247
Tabel L-9.9	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	249
Tabel L-9.10	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018.....	250



BAB 1

PENDAHULUAN

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Second sex, begitu ungkapan khas feminis untuk menyatakan kedudukan subordinat perempuan dalam masyarakat. Istilah itu bukanlah sekedar ungkapan biasa melainkan representasi posisi perempuan yang selalu lebih rendah dari laki-laki. Dengan demikian, peran perempuan tidak begitu diperhitungkan bahkan dipinggirkan. Perlakuan ini merupakan bentuk diskriminasi yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Dasar diskriminasi ini hanyalah karena perbedaan kodrati antara perempuan dan laki-laki, pembedaan yang membuat perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah. Soal sifat-sikap perempuan yang suka memberi perhatian pada hal-hal yang remeh-temeh (*concern about trivial things*) pun membuat perempuan dianggap sebagai sosok yang rumit, cerewet dan emosional. Hal ini sesungguhnya menjadi kelebihan perempuan dimana perempuan memiliki pola pikir, imajinasi dan perasaan lebih peka terhadap lingkungan sekitar dibanding laki-laki.

Praktik pembedaan perempuan dan laki-laki akhirnya membentuk ‘suatu pola budaya’ patriarki. Praktik budaya ini lebih mengakomodasi kepentingan laki-laki dan secara sistematis terkesan menghambat mobilitas perempuan, namun seiring dengan berkembangnya zaman terjadi perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya fenomena-fenomena gerakan perempuan yang menyuarkan aspirasi dan kebutuhannya. Sejarah mencatat muncul gerakan emansipasi wanita (*women’s emancipation movement*) sebagai upaya perempuan menyuarkan aspirasi dan kebutuhannya yang ingin dipersamakan haknya sejajar dengan laki-laki. Di Indonesia,

usaha-usaha pertama emansipasi adalah memberi kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan pendidikan seperti laki-laki. Salah satu upaya yang dilakukan oleh aktifis emansipasi adalah dengan menggantikan istilah wanita yang dianggap istilah tersebut mengandung makna subordinat yang kemudian menggantikan istilah tersebut menjadi perempuan. Istilah Perempuan yang berasal dari kata dasar 'empu' yang berarti mempunyai daya pencipta/kreasi yang berkonotasi lebih mandiri.

Gerakan emansipasi pada akhirnya membuahkan konvensi internasional yang mewajibkan/mengharuskan negara-negara yang menyepakati konvensi tersebut untuk meratifikasi kedalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang pada prinsipnya menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuka akses partisipasi, control, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Beberapa konvensi yang diratifikasi pemerintah RI adalah Konvensi ILO No. 100/1950 dalam UU No. 80/1957 tentang Pengupahan yang Sama, Konvensi Kualitas Hidup dan Hak Anak diratifikasi dalam Keputusan Presiden, sementara Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination of All form of Discrimination Against Women*) diwujudkan dalam UU No. 7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemajuan signifikan bagi gerakan perempuan adalah ketika pemerintah mengakomodasi perempuan dalam kementerian sendiri. Bermula dari kantor Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (1978) berubah menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (1983), menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999), dan kemudian di tahun 2015 berubah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. GBHN pun mengamanatkan pemberdayaan perempuan. Konvensi perempuan di Beijing menghasilkan *The Beijing Platform for Action* 1995, yang menelurkan 12 butir keprihatinan terhadap kondisi perempuan di dunia oleh pemerintah Indonesia diratifikasi dalam bentuk Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Konvensi Internasional yang paling mutakhir adalah konvensi sidang umum PBB ke 70 pada bulan September 2015 di New

York, Amerika Serikat yang menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul “*Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development*” berisi 17 tujuan dan 169 sasaran. Dokumen itu dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana salah satu tujuan yaitu tujuan ke 5 yang dicapai pada tahun 2030 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.

Kemudian pemerintah juga telah memasukkan program pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam seluruh perencanaan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan. Pemerintah berupaya mendorong dan menciptakan suasana agar setiap program pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender yang mengarah kepada kemitrasejajaran gender yang adil.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia tentunya sejalan dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang berupaya untuk mengintegrasikan program pengarusutamaan gender pada seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara giat mendorong kaum perempuan untuk maju dan memiliki ketrampilan dan pengetahuan, dengan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan di Provinsi Sumatera Utara dan terus memprogramkannya untuk tahun-tahun mendatang.

Untuk keperluan perencanaan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan yang berwawasan gender Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memerlukan data statistik yang akurat, untuk mendapatkan bahan informasi yang memadai sehingga diperlukan kehadiran sebuah buku yang memuat statistik gender. Dengan menggunakan statistik gender, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan di harapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi gender di Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan penyusunan profil gender sebagai salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan. Pembangunan sumber manusia yang di laksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan baik dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, kesempatan dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya pembangunan yang telah dilaksanakan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sosial budaya dan politik dan pengambilan keputusan di berbagai aspek lain.

Adapun dasar hukum pembuatan Profil Gender Provinsi Sumatera Utara 2019 adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
4. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurustamaan Gender di Daerah.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan System Data Gender dan Anak.

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 10).
8. Peraturan Gubernur Nomor 64 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 65).
9. Perjanjian kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara Nomor 074/549/PPPA/2019 dan B-0106/BPS/1252/05/2019.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus terpilih menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Data dan informasi merupakan sesuatu yang tidak statis tetapi bersifat dinamis dan selalu berubah. Justru karena sifat dinamis dan selalu berubah itulah, maka data dan informasi harus selalu di evaluasi dan diperhatikan perubahannya dan dimutakhirkan kembali pada tahun berikutnya. Kegiatan pemutakhiran data gender menjadi sangat relevan dan strategis untuk mendukung perencanaan dan arah pembangunan gender ke depan di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara. Data ini secara berkala perlu dianalisis untuk mendapatkan makna

yang lebih lengkap tentang kondisi gender di Sumatera Utara. Profil Gender menggambarkan berbagai isu gender yang selama ini masih terabaikan atau belum di garap secara optimal khususnya di wilayah yang masih tertinggal.

Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus di tindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah. Oleh karena itu, profil hasil analisis yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara akan menjadi input yang sangat berharga dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan, antar lain sektor strategi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik dan kesehatan. Ketersediaan fakta, data, dan informasi kesenjangan gender, berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat di butuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan.

Data gender harus menjadi bagian penting dalam pengelolaan data di Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, pengelolaan data yang dilakukan setiap OPD harus terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang pembangunan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Profil Gender di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menyusun indikator-indikator penting dalam pembangunan gender dalam sebuah media sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan serta menjadi masukan untuk perancangan program kegiatan.
2. Melakukan analisis terhadap indikator-indikator penting tersebut untuk menemukan isu-isu prioritas dalam pembangunan di Sumatera Utara khususnya

data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, statistik gender dan isu-isu prioritas gender, pemberdayaan perempuan di daerah.

1.3 Sumber Data

Penyusunan statistik gender ini menggunakan metode analisis gender, seluruh data-data yang menyajikan perbandingan perempuan dan laki-laki akan menjadi perangkat untuk mengukur akses, partisipasi, peran dan kontrol perempuan pada bidang yang disebut di atas. Oleh sebab itu berbagai sumber dan dokumen terbaru yang menyajikan perkembangan statistik pada bidang di atas dibutuhkan untuk memberikan gambaran komprehensif. Data yang diperoleh merupakan fakta maupun data statistik gender di 33 Kabupaten/Kota, yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara dan data terpilah laki-laki dan perempuan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, yang dalam bentuk data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, sosial budaya dan kekerasan terhadap perempuan.



BAB 2

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

2

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

2.1 Geografis

Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Pulau Sumatera berbatasan dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau di bagian Selatan. Provinsi Sumatera Utara secara geografis terletak antara 1°- 4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur serta diapit oleh lautan Hindia di bagian Barat dan Selat Malaka di bagian Timur. Luas Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680 Km² dengan sebagian besar pegunungan di bagian Barat dan dataran di bagian Timur. Dengan kemiringan semacam ini letak provinsi diatas permukaan laut berjarak cukup ekstrim dengan minimum 0-4 m diatas permukaan laut di Kota Tanjung Balai dan 0-1915 m diatas permukaan laut di Kabupaten Tapanuli Selatan.

2.2 Sejarah

Pada jaman Pemerintahan Belanda, Sumatera merupakan suatu pemerintahan yang bernama *Gouverment van Sumatera*, yang meliputi seluruh Sumatera, dikepalai oleh seorang *Gouverneur* berkedudukan di Medan. Sumatera terdiri dari daerah-daerah administratif yang dinamakan Keresidenan. Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera tetap merupakan suatu kesatuan pemerintahan yaitu Provinsi Sumatera yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan terdiri dari daerah-daerah Administratif Keresidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.

Pada sidang I Komite Nasional Daerah (K.N.D) Provinsi Sumatera, mengingat kesulitan-kesulitan perhubungan ditinjau dari segi pertahanan, diputuskan untuk membagi provinsi menjadi 3 Sub Provinsi Sumatera Utara (yang terdiri dari Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, Keresidenan Tapanuli), sub Provinsi Sumatera Tengah, dan sub Provinsi Sumatera Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Undang-undang No.10 Tahun 1948 tanggal 15 april 1948, Pemerintah menetapkan Sumatera menjadi 3 Provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara yang Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
2. Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
3. Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung.

Dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No.10 Tahun 1948, atas usul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan suratnya tanggal 16 Februari 1973 No. 4585/25, DPRD Tingkat I Sumatera Utara dengan keputusannya tanggal 13 Agustus 1973 No. 19/K/1973 telah menetapkan bahwa hari jadi Provinsi Sumatera Utara adalah Tanggal 15 April 1948 yaitu tanggal ditetapkannya UU No. 10 Tahun 1948 tersebut.

Pada awal tahun 1949 berkaitan dengan meningkatnya serangan Belanda, diadakannya reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Pada waktu itu, keadaan memerlukan suatu sistem pertahanan yang lebih kokoh dan sempurna. Oleh karena itu perlu di pusatkan alat-alat kekuatan sipil dan militer dalam tiap-tiap Daerah Militer Istimewa yang berada dalam suatu tangan yaitu Gubernur Militer. Sehingga penduduk sipil dan militer berada dibawah kekuasaan satu pemerintah.

Perubahan demikian ini ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 No. 21/Pem/P.D.R.I yang di ikuti Keputusan Pemerintah Darurat

R.I tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/P.D.R.I jabatan Gubernur Sumatera Utara di tiadakan.

Gubernur yang bersangkutan diangkat menjadi komisaris dengan tugas-tugas memberi pengawasan dan tuntutan terhadap pemerintahan, baik sipil maupun militer. Selanjutnya dengan instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Perdana Menteri tanggal 15 September 1949, Sumatera Utara dibagi menjadi Daerah Militer Istimewa yaitu Aceh dan Tanah Karo diketahui oleh Gubernur Militer Tgk. M. Daud Beureuen dan Tapanuli/Seumatera Timur oleh Gubernur Militer Dr. F. L Tobing.

Selanjutnya, dengan ketetapan Pemerintah Darurat R.I dalam bentuk Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Desember 1949 No.8/Des/W.K.P.M dibentuklah Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 17 Agustus 1949 No.8/Des/W.K.P.M tahun 1949 tersebut dicabut dan kembali dibentuk Provinsi Sumatera Utara dengan daerah yang meliputi daerah Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli. Selanjutnya dengan peraturan pemerintah No. 21 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950, pada Waktu **RIS**, ditetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah-daerah Provinsi, yaitu:

1. Jawa Barat
2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Sumatera Utara
5. Sumatera Tengah
6. Sumatera Selatan
7. Kalimantan
8. Sulawesi

9. Maluku

10. Sunda Kecil

Pada tanggal 7 Desember 1956 diundangkanlah Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 yaitu Undang-Undang tentang pembentukan daerah otonom provinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 1 Undang-Undang No.24 Tahun 1956 ini menyebutkan:

1. Daerah Aceh yang meliputi Kabupaten-kabupaten: Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Besar Kutaraja, daerah-daerah tersebut dipisahkan dari lingkungan Daerah Otonom Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 sehingga daerah-daerah tersebut menjadi daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan Provinsi Aceh.
2. Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayah nya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provinsi Aceh, tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1956, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1964, Provinsi Sumatera Utara terdiri 17 Kabupaten/Kota. Tetapi dengan terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, tentang pembentukan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, dan Tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-Undang No.5 Tahun 2007, Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 disahkan Undang-Undang No. 37 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas. Pada tahun 2008 kembali diterbitkan Undang-Undang

No. 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Undang-Undang No. 45 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang No. 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli, dengan demikian wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Wilayah kabupaten :

1. Asahan
2. Batubara
3. Dairi
4. Deli Serdang
5. Humbang Hasudutan
6. Karo
7. Labuhanbatu
8. Labuhanbatu Selatan
9. Labuhanbatu Utara
10. Langkat
11. Mandailing Natal
12. Nias
13. Nias Barat
14. Nias Selatan
15. Nias Utara
16. Padang Lawas
17. Padang Lawas Utara
18. Pakpak Bharat

19. Samosir
20. Serdang Bedagai
21. Simalungun
22. Tapanuli Selatan
23. Tapanuli Tengah
24. Tapanuli Utara
25. Toba Samosir

Wilayah Kota :

1. Binjai
2. Gunungsitoli
3. Medan
4. Padangsidempuan
5. Pematangsiantar
6. Sibolga
7. Tanjung Balai
8. Tebing Tinggi

Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah maka kelembagaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengalami perubahan. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh keluarnya Perda No. 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 40 OPD, yaitu :

1. Sekretariat Daerah (terdiri dari 9 Biro)
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Wilayah Provinsi
4. Bappeda
5. BKD
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

7. Badan Penelitian dan Pengembangan
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10. Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Badan Penghubung Daerah Provinsi
14. Dinas Pendidikan
15. Dinas Kesehatan
16. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
17. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
18. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Dinas Sosial
21. Dinas Tenaga Kerja
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
24. Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Bencana Daerah
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28. Dinas Perhubungan
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu
32. Dinas pemuda dan Olahraga
33. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

34. Dinas Perpustakaan dan Arsip
35. Dinas Kelautan dan Perikanan
36. Dinas Kehutanan
37. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39. Dinas Perkebunan
40. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.3 Sosial Budaya

Provinsi Sumatera Utara secara administratif tahun 2018 terbagi dalam 25 Kabupaten dan 8 Kota, 450 Kecamatan, dan 6.136 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.415.391 jiwa dan pusat pemerintahan provinsi terletak di Kota Medan yang penduduknya sekitar 2.264.145 jiwa pada tahun 2018.

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pengunungan/daratan tinggi, daratan rendah dan daerah pantai. Keragaman wilayah tersebut juga menggambarkan keanekaragaman suku bangsa dan agama yang dianut penduduknya. Namun dalam sumpah pemuda mengingkarkan kesatuan dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, mencerminkan kekayaan khasanah sosial dan budaya tidak menyebabkan perpecahan tetapi mempererat persatuan dalam satu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Agama Islam merupakan jumlah terbesar yang dianut oleh penduduk Sumatera Utara, yaitu 66,36 persen., selanjutnya Kristen Protestan 27,14 persen, Kristen Katolik 3,99 persen, Buddha 2,35 persen, Hindu 0,11 persen, Konghucu 0,01 persen dan lainnya 0,04 persen. Dilihat secara geografis penganut agama Islam umumnya mendiami daerah (kabupaten/Kota) yang berada di sepanjang Pantai Timur dan sebagian dataran tinggi, sedangkan penduduk yang menganut agama Kristen (Katolik dan Protestan) sebagian besar mendiami wilayah pantai Barat dan wilayah dataran tinggi.

Sedangkan penganut agama Hindu dan Budha biasanya berada daerah kota, baik ibukota Kabupaten maupun ibukota provinsi. Selain keragaman agama di Sumatera Utara terdapat juga keragaman suku bangsa yang juga merupakan potensi daerah. Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 Provinsi Sumatera Utara didiami oleh beberapa suku besar suku Jawa, Batak Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, Banten, Sunda, Papua, Asal Luar Negeri, Lain-lain. Suku bangsa terbesar adalah Jawa sebesar 33,41 persen, Batak Toba/Tapanuli sebesar 22,33 persen, Mandailing 13,58 persen, Nias 7,05 persen, Melayu 5,97 persen, Batak Karo 5,54 persen, Tionghoa 2,63 persen, Minang 2,58 persen, Batak Simalungun 2,43 persen, Aceh 1,03 persen, Pakpak 0,79 persen, Dairi 0,06 dan lain-lain 2,59 persen.



BAB 3

PENDUDUK

3

PENDUDUK

Salah satu aspek yang sangat penting dan perlu mendapat fokus perhatian dalam proses pembangunan adalah aspek kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan aspek kuantitas dan kualitas, komposisi dan tingkat penyebaran penduduk. Kuantitas penduduk yang relatif besar dapat menjadi modal dasar pembangunan dengan asumsi kualitas sumber daya manusia yang tinggi, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah.

Penduduk merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek pembangunan. Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan.

Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung percepatan pembangunan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar tersebut mengindikasikan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga dalam jumlah yang besar apalagi jika didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai. Namun bila tidak diimbangi dengan kualitas yang tinggi pada akhirnya hanya akan menjadi beban bagi pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas penduduk Indonesia sangat penting dilakukan untuk dapat mendukung jalannya pembangunan sehingga potensi besar yang ada dalam kuantitas penduduk Indonesia dapat memberikan manfaat yang maksimal.

3.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Penduduk merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional yang tidak hanya digunakan sebagai alat pembangunan tapi juga sebagai sasaran dalam pembangunan. Angka proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 14.415.391 jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 1,07 persen atau sebanyak 153.244 jiwa dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 14.262.147 jiwa. Tabel 3.1 menunjukkan komposisi penduduk Sumatera Utara tahun 2018 menurut jenis kelamin. Terlihat jumlah penduduk perempuan ada sebanyak 7.222.191 jiwa. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang sebanyak 7.193.200 jiwa. Perbedaan tersebut dapat lebih jelas tergambar dengan melihat indikator kependudukan yang disebut rasio jenis kelamin.

Rasio jenis kelamin penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 99,60 yang artinya terdapat 99 orang penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, sebanyak 19 kabupaten/kota memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100 sementara sisanya sebanyak 14 kabupaten/kota mempunyai rasio jenis kelamin diatas 100. Itu artinya bahwa lebih banyak wilayah yang penduduk perempuannya lebih banyak daripada penduduk laki-lakinya.

Bila dilihat dari kelompok umur, maka dapat dilihat menurut klasifikasi kelompok umur produktif dan kelompok umur non produktif sehingga dapat dilihat juga rasio ketergantungan dari masing-masing jenis kelamin. Kelompok umur non produktif terdiri dari kelompok umur muda dan kelompok umur tua, dimana kelompok umur muda adalah penduduk yang masuk kelompok umur 0-14 tahun, sementara kelompok umur tua adalah penduduk dengan kelompok umur 65 keatas. Sementara itu kelompok umur produktif adalah penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	69 573	73 267	142 840	94,96
Mandailing Natal	217 723	225 767	443 490	96,44
Tapanuli Selatan	139 280	141 003	280 283	98,78
Tapanuli Tengah	185 715	184 456	370 171	100,68
Tapanuli Utara	148 222	151 659	299 881	97,73
Toba Samosir	90 686	91 987	182 673	98,59
Labuhanbatu	245 802	240 678	486 480	102,13
Asahan	363 686	360 693	724 379	100,83
Simalungun	430 306	433 387	863 693	99,29
Dairi	141 478	141 725	283 203	99,83
Karo	203 311	206 364	409 675	98,52
Deli Serdang	1 084 679	1 070 946	2 155 625	101,28
Langkat	521 382	514 029	1 035 411	101,43
Nias Selatan	157 526	159 681	317 207	98,65
Humbang Hasundutan	93 612	94 868	188 480	98,68
Pakpak Bharat	24 290	23 829	48 119	101,93
Samosir	62 492	63 324	125 816	98,69
Serdang Bedagai	308 419	306 199	614 618	100,73
Batu Bara	207 877	205 115	412 992	101,35
Padang Lawas Utara	134 485	133 286	267 771	100,90
Padang Lawas	137 996	137 519	275 515	100,35
Labuhanbatu Selatan	169 807	163 115	332 922	104,10
Labuhanbatu Utara	182 187	178 739	360 926	101,93
Nias Utara	67 823	69 179	137 002	98,04
Nias Barat	39 045	42 618	81 663	91,62
Sibolga	43 823	43 494	87 317	100,76
Tanjungbalai	87 277	86 025	173 302	101,46
Pematangsiantar	123 578	129 922	253 500	95,12
Tebing Tinggi	80 317	82 264	162 581	97,63
Medan	1 118 402	1 145 743	2 264 145	97,61
Binjai	136 714	137 178	273 892	99,66
Padangsidempuan	106 673	112 219	218 892	95,06
Gunungsitoli	69 014	71 913	140 927	95,97
Jumlah	7 193 200	7 222 191	14 415 391	99,60

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.2 menunjukkan jumlah penduduk Sumatera Utara pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang tercermin dari rasio jenis kelamin sebesar 104. Artinya bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki dari setiap 100 penduduk perempuan. Sementara pada kelompok umur produktif yaitu 15-64 tahun lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 99, yang artinya bahwa terdapat 99 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Begitu juga di kelompok umur tua 65 tahun keatas lebih banyak perempuan dibanding laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 79, yang artinya bahwa terdapat 79 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Tahun 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Usia Non Produktif	2 586 084	2 570 330	5 156 414	101
0-14 tahun	2 304 102	2 212 218	4 516 320	104
65 tahun ke atas	281 982	358 112	640 094	79
Usia Produktif				
15-64 tahun	4 607 116	4 651 861	9 258 977	99
Rasio Ketergantungan	56.13	55.25	55.69	
Anak-anak	50.01	47.56	48.78	
Lansia	6.12	7.70	6.91	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua. Semakin kecil angka rasio ketergantungan, semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk umur tidak produktif, dan begitu juga sebaliknya. Angka rasio ketergantungan Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 55,69, artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif harus menanggung 55 penduduk usia tidak produktif baik itu anak-anak maupun lansia. Bila dilihat lebih rinci lagi, terlihat bahwa angka ketergantungan anak-anak lebih besar dibanding angka ketergantungan lansia. Hal ini dapat diartikan bahwa beban tanggungan anak-anak adalah yang paling berperan dalam besarnya beban tanggungan total.

3.2 Struktur Umur Penduduk

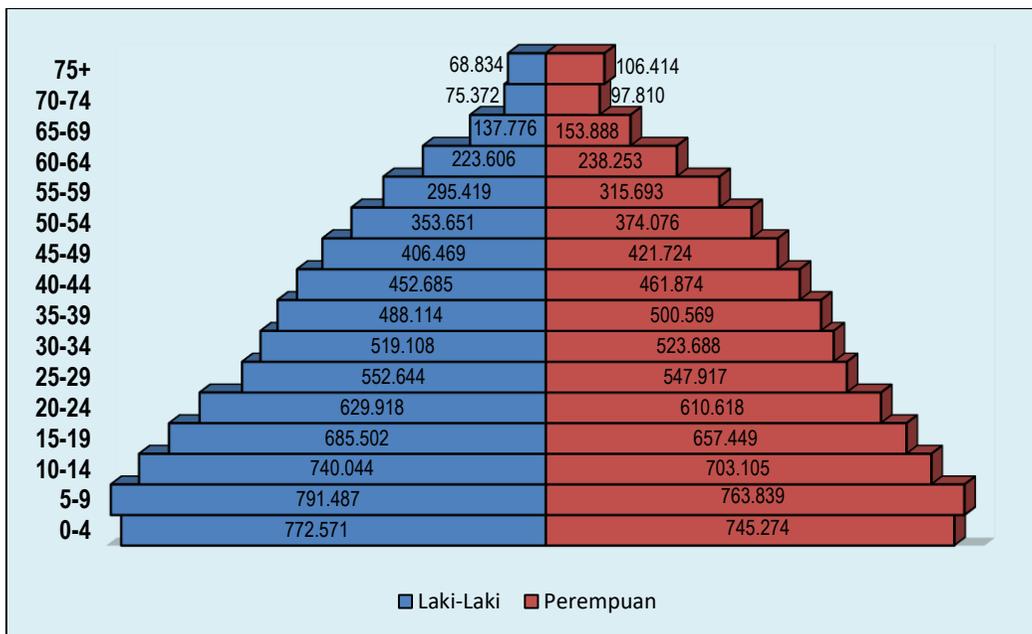
Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap keputusan yang akan diambil oleh penentu kebijakan suatu wilayah.

Struktur jumlah penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin digambarkan melalui piramida penduduk. Dengan piramida penduduk dapat terlihat apakah suatu wilayah termasuk ke dalam wilayah dengan pola piramida ekspansif (piramida penduduk muda), stasioner (piramida penduduk berimbang), atau konstruktif (piramida penduduk tua). Piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Utara Tahun 2018 disajikan dalam gambar 3.1.

Pola distribusi penduduk Sumatera Utara pada gambar 3.1 menunjukkan tingkat fertilitas yang tinggi, ditandai dengan banyaknya penduduk yang berada di kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 1,5 juta jiwa, dan kelompok umur berikutnya mengikuti pola menurun. Pola distribusi penduduk seperti ini disebut pola piramida

penduduk muda. Pola piramida penduduk muda menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk muda yang besar, potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap menyediakan lapangan kerja yang cukup, karena permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah lapangan kerja akan menciptakan pengangguran.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Jika dilihat dari sisi demografi, peran perempuan dapat terlihat dari komposisi umurnya. Perempuan sangat berperan dalam menghasilkan generasi penerus. Hal ini sangat terkait dengan fungsi reproduksinya. Untuk menghasilkan generasi yang unggul dan berkualitas, maka kesehatan perempuan dalam proses hamil, melahirkan sampai menyusui perlu dijaga dengan baik. Jaminan kesehatan tidak hanya fungsi

reproduksinya, tetapi juga fisik dan psikologisnya. Fase perempuan pada proses ini tercermin pada masa usia subur yaitu pada kelompok umur 15-49 tahun. Tercatat jumlah penduduk usia subur pada tahun 2018 sebesar lebih dari 3,7 juta atau lebih dari 50 persen jumlah penduduk perempuan. Besarnya jumlah penduduk perempuan pada kelompok ini perlu mendapatkan perhatian serius khususnya kesehatan ibu. Karena perannya yang cukup besar untuk melahirkan generasi-generasi penerus berkualitas.

Dari sisi lain, perempuan mempunyai peran produktif, yaitu peran perempuan sebagai pencari nafkah keluarga. Dari tahun ke tahun, peran perempuan tersebut semakin meningkat. Peran produktif ini dapat diartikan peran perempuan sebagai peran publik. Dari komposisi jumlah penduduk menurut umur, peran produktif terpresentasi dari usia produktif, yaitu pada kelompok usia 15-64 tahun. Pada tahun 2018, jumlah penduduk perempuan pada kelompok usia ini adalah hampir mencapai 4,65 juta atau sekitar 64,4 persen dari penduduk perempuan. Jumlah besar ini menunjukkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan. Jika perempuan tidak mampu berkarya secara produktif, maka akan menjadi beban ekonomi bagi bangsa Indonesia.

3.3 Status Perkawinan

Persentase penduduk laki-laki yang belum kawin lebih besar dibandingkan persentase penduduk perempuan yang belum kawin, yaitu sebesar 42,86 persen untuk penduduk laki-laki dan 34,10 persen untuk perempuan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa laki-laki cenderung lebih lama berstatus membujang dibandingkan perempuan. Artinya perempuan secara rata-rata kawin lebih muda dibandingkan laki-laki. Keadaan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2018

Status Perkawinan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	42.86	34.10	38.45
Kawin	53.73	53.93	53.83
Cerai Hidup	1.06	2.00	1.53
Cerai Mati	2.35	9.97	6.19

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

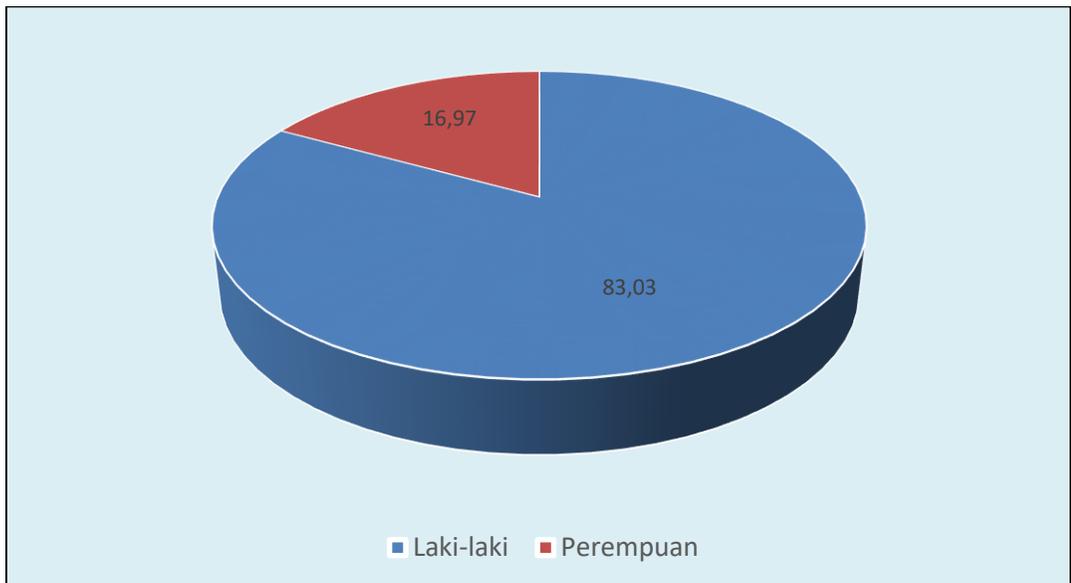
Sebaliknya, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status yang sama. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya. Status perempuan yang menjanda, persentasenya lebih besar karena cerai mati (9,97%) dibanding karena perceraian dengan pasangan/cerai hidup (2,00%).

3.4 Peran Domestik Perempuan dalam Keluarga

Perempuan merupakan makhluk yang diberikan kemampuan untuk bereproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan anak. Dengan kemampuan lebih yang dimiliki maka tidak heran perempuan akan lebih dominan pada kegiatan domestiknya. Oleh karena itu, dalam keluarga perempuan mempunyai peran yang besar meskipun tingkatannya masih di bawah laki-laki. Peran domestik perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai tugas mengurus rumah tangga, suami serta anak-anak. Sedangkan laki-laki berperan di luar rumah mencari nafkah.

Meskipun peran publik laki-laki adalah yang utama dalam keluarganya, namun tetap memegang andil dalam peran domestik. Bisa dikatakan peran tersebut lebih besar dibandingkan peran domestik perempuan, karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang merupakan pemimpin, laki-laki memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Peran yang dilakukan perempuan dalam keluarga terkadang dipengaruhi oleh keputusan dari laki-laki. Oleh sebab itu peran domestik perempuan masih berada di bawah laki-laki. Pembagian peran tersebut sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia.

Gambar 3.2 Persentase Kepala Rumah tangga Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara

Perempuan yang menjadi pemimpin atau kepala rumah tangga, biasanya ditemukan pada keluarga *single parent*. Perempuan yang hidup tanpa pasangan menyebabkan perempuan harus memegang andil utama dalam keluarga. Sehingga peran ganda harus dilakukan perempuan sebagai ibu sekaligus seorang ayah.

Mengurus rumah tangga sebagai peran domestik dan menghidupi keluarga sebagai peran publiknya. Berdasarkan hasil Susenas 2018 juga menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan kepala rumah tangga adalah perempuan yaitu sebesar 16,97 persen.

Di era pembangunan sekarang ini, peran ganda perempuan tidak hanya digeluti oleh perempuan sebagai *single parent*. Peran domestik dan peran publik semakin banyak dilakukan oleh perempuan tidak hanya di kota-kota besar dimana banyak dikenal wanita karir. Perempuan di perdesaan yang memiliki peran ganda pun banyak ditemui. Tidak sedikit jumlah perempuan yang mengurus rumah tangga juga bekerja mencari tambahan penghasilan karena kondisi ekonomi yang masih kurang. Penghasilan suami yang tidak mencukupi kebutuhan hidup menjadikan perempuan turut membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga.

Sementara di perkotaan, banyak berkembang istilah wanita karir. Peran ini dipandang sebagai peran publik dan juga sebagai tindak emansipasi perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki. Banyak pandangan mengenai perempuan bahwa perempuan hanyalah pendamping hidup, bersifat lemah, selalu memakai perasaan, berpikiran sempit dan lain sebagainya. Pandangan tersebut sudah ada sejak lama dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh pandangan masyarakat bahwa tugas seorang perempuan adalah memasak, berdandan dan melahirkan anak, masih terjadi saat ini. Tidak heran kedudukan perempuan terkadang menjadi nomor dua dan tidak sedikit orang yang merendahkan perempuan. Salah satu tindakan yang merendahkan perempuan, adalah kekerasan terhadap perempuan.

3.5. Perkembangan Capaian Pembangunan Gender Sumatera Utara

Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh Pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin berbagai program pembangunan.

Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan social yang diberikan oleh pemerintah. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya dan upaya tersebut sudah cukup memperlihatkan hasilnya dengan ditunjukkannya peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender.

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2012-2018 telah meningkat dari 90,04 pada tahun 2012 menjadi 90,66 di tahun 2018. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan dan hidup layak.

Peningkatan IPG setiap tahunnya menunjukkan program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut telah mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata dalam pencapaian kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perlu dilakukan upaya yang maksimal sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan terwujud secara nyata.

Tabel 3.4 Perkembangan IPM dan IPG Sumatera Utara Tahun 2012-2018

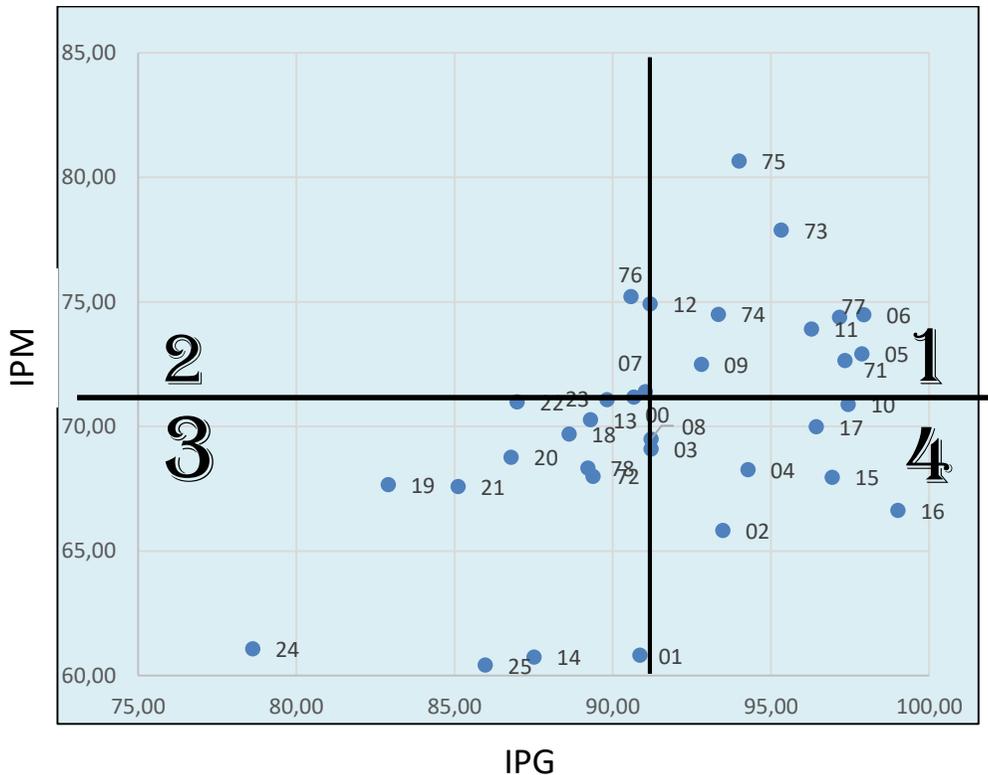
Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
(1)	(2)	(3)
2012	67,74	90,04
2013	68,36	90,07
2014	68,87	90,26
2015	69,51	90,96
2016	70,00	90,82
2017	70,57	90,65
2018	71,18	90,66

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

3.6. Capaian Pembangunan Gender Antarwilayah

Otonomi daerah yang sudah dilaksanakan dalam pemerintahan Indonesia sejak era reformasi, diharapkan mampu untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan yang dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Namun demikian, kesenjangan antarwilayah belum sepenuhnya bisa dihindari. Kurangnya infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi penduduk, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan serta kendala geografis yang relative sulit adalah masalah utama sehingga pemerataan pembangunan sulit tercapai. Demikian pula dengan pembangunan yang terkait dengan masalah gender yang juga tidak merata. Meskipun pembangunan kesetaraan dan keadilan telah diupayakan di seluruh wilayah, namun tidak semua wilayah mampu mencapai tingkat keberhasilan yang sama. Capaian tersebut sangat tergantung dari sumber daya manusia, keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat, serta pengaruh sosial kultural yang menyertai kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah.

Gambar 3.3 Pembagian Kuadran Kabupaten/Kota berdasarkan Angka IPG dan IPM Tahun 2018



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada kuadran 1, adalah kabupaten/kota dengan capaian angka IPM dan angka IPG di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Pada kuadran ini, tingginya pembangunan manusia yang dicapai, sejalan dengan kesetaraan gender yang diperoleh juga. Kabupaten/kota tersebut yaitu Medan (75), Pematang Siantar (73), Deli serdang (12), Tebing Tinggi (74), Padang Sidempuan (77), Toba Samosir (06), Karo (11), Tapanuli Utara (05), Sibolga (71) dan Simalungun (09).

Pada kuadran 2, adalah kabupaten/kota dengan capaian IPM di atas rata-rata, tetapi capaian IPG di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kualitas

cakupan pembangunannya sudah cukup tinggi, namun kurang berbasis kepada gender. Kabupaten/kota tersebut yaitu : Binjai dan Labuhan Batu.

Pada Kuadran 3, adalah kabupaten/kota dengan capaian angka IPM dan angka IPG di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut pembangunan manusia dan kesetaraan gender belum berjalan seperti yang diinginkan semua pihak. Kualitas manusia dan kesetaraan gender masih perlu mendapat perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kabupaten/kota tersebut adalah : Labuhan Batu Utara (23), Labuhan Batu Selatan (22), Langkat (13), Serdang Bedagai (18), Padang Lawas Utara (20), Gunung Sitoli (78), Tanjung Balai (72), Padang Lawas (21), Batubara (19), Nias (01), Nias Selatan (14), Nias Barat (25), Nias Utara (24).

Pada Kuadran 4, adalah kabupaten/kota dengan angka IPM dibawah rata-rata, tetapi angka IPG yang di atas rata-rata, hal ini menunjukkan kesetaraan gender sudah cukup bagus, tetapi kualitas capaian pembangunannya masih cukup rendah. Kabupaten/kota tersebut adalah Dairi (10), Samosir (17), Asahan (08), Tapanuli Selatan (03), Tapanuli Tengah (04), Humbang Hasundutan (15), Pakpak Bharat (16), dan Mandailing Natal (02).



BAB 4

PENDIDIKAN

4

PENDIDIKAN

Tujuan pembentukan Negara pada alinea empat pembukaan UUD 1945 mengandung implikasi imperatif bagi pendidikan nasional yang harus menyiapkan seluruh lapisan bangsa, menyangkut proses alih generasi, yang cinta bangsa dan tanah air, peduli dan bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, berkehidupan yang cerdas sebagai bangsa yang berjati diri yang mampu berkompetisi dan berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan bertanggungjawab di dalam memelihara dan membangun perdamaian dan kedamaian hidup umat manusia. Pesan ini memberikan bahwa pembangunan pendidikan, untuk menyiapkan generasi bangsa secara berkelanjutan, harus membuat bangsa ini memiliki kemampuan melihat ke dalam (*inward looking*) dan melihat ke luar (*outward looking*), yang akan membangun bangsa ini dalam keseimbangan antara nasionalisme dan internasionalisasi ataupun globalisasi.

Pendidikan merupakan satu elemen yang penting untuk membentuk manusia yang berketerampilan dan produktif sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dengan pemerintah yang perlu berlangsung seumur hidup.

Kemiskinan ilmu yang menyelimuti perempuan akan membuat rakyatnya tertinggal dalam pembangunan di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Oleh sebab itu untuk memajukan suatu bangsa, dibuka seluas-luasnya kesempatan kepada perempuan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

Menurut Suryadi (1999) kebijaksanaan pendidikan tentu harus memperhitungkan perubahan masyarakat yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, agar semakin realistis dan sesuai dengan tantangan zaman yang terus berubah. Ki Hajar Dewantara (1997) mengemukakan bahwa mendidik seorang anak merupakan mendidik rakyat yang akan menuju kepada kemerdekaan dirinya lahir dan batin dan sebagai manusia merdeka bersandar hanya kepada kekuatan dirinya bukan orang lain.

Kewajiban belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan kewajiban pendidikan oleh seluruh rakyat Indonesia minimal harus mengikuti pendidikan wajib selama 9 tahun yaitu dari tingkat SD selama 6 tahun dan tingkat SMP selama 3 tahun sehingga jumlah 9 tahun sebagai jangka waktu pada 2 jenjang pendidikan yang harus diikuti segenap bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Ini berarti peserta didik: anak siapapun, di manapun, termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus, berhak mengikuti pendidikan tanpa membayar, dan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu (Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20/2003).
2. Setiap sekolah harus segera dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk lapangan olah raga (sesuai dengan pasal-pasal dalam Bab VII PP No. 19/2005) dan kepada peserta didik diberikan (atau dipinjamkan) buku pelajaran dan buku tulis, terutama untuk mereka yang datang dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu. Di samping itu untuk daerah terpencil seperti Papua perlu dirintis sekolah berasrama.
3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun harus mengakses seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, anak tak beruntung, populasi khusus, yang harus dilayani dan diversifikasi program layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan

dan potensi masing-masing, dan sekolah harus menyiapkan diversifikasi layanan secara inklusif.

4. Bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Tujuan lebih lanjut dari Program Indonesia Pintar (PIP) adalah mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi sehingga diharapkan lama sekolah 12 (dua belas) tahun dapat dirasakan sebagian besar penduduk.

Adapun Standar Nasional Pendidikan yang harus diperhatikan pemerintah yang berguna bagi sekolah dan penyelenggara sekolah, masyarakat yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional serta akreditasi tingkat kelayakan sekolah di seluruh Indonesia. Evaluasi diperlukan untuk memperoleh gambaran nyata tentang mutu pelayanan pendidikan dalam sembilan komponen penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam Pasal 2 PP No. 19/2005.
2. Pemerintah harus menyusun program dan melaksanakan secara konsisten program-program tersebut untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan dalam PP No. 19/2005 dengan urutan prioritas; guru, sarana dan prasarana, isi dan proses, penilaian, pembiayaan, pengelolaan dan yang terakhir kompetensi lulusan.

Secara umum pendidikan terbagi kedalam dua bahagian yaitu pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang didapat di sekolah dimana ada guru sebagai pengajar atau disebut juga sebagai orang tua di luar rumah dan siswa sebagai pelajar. Sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang diajarkan di rumah oleh orang tua kepada anaknya untuk menjadikan seorang anak itu baik atau buruk sifatnya dan biasanya pendidikan non formal itu diikuti dengan pergaulan dilingkungan sekitar yang juga membentuk pribadi anak (Ulwan, 1998).

4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan penyangga utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu cara yang utama untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Salah satu indikator untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) yang didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SMP, SMA dan Pendidikan tinggi) dan jumlah penduduk yang seharusnya berpartisipasi pada jenjang pendidikan tersebut yakni SD atau sederajat berumur 7-12 tahun, SMP atau sederajat berumur 13-15 tahun, SMA atau sederajat berumur 16-18 tahun serta Pendidikan Tinggi berumur 19-24 tahun. Yang cukup menggembirakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai diatas seratus persen. Hal ini berarti ada penduduk yang diluar umur yang seharusnya bersekolah di jenjang pendidikan SD atau sederajat namun pada kenyataannya masih bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat.

Hal yang sebaliknya terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dimana hanya ada tiga Kabupaten yakni Tapanuli Tengah, Padang Lawas dan Labuhanbatu Selatan yang telah memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas seratus persen (lampiran Tabel L-4.1.2). Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat ada empat Kabupaten yakni Langkat, Toba Samosir, Nias Barat dan Pakpak Bharat serta satu Kota yakni Pematangsiantar yang memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas seratus persen (lampiran Tabel 4.1.3). Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Tinggi hanya Kota Medan dan Kota Padangsidimpuan yang

memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) diatas 30% yakni masing-masing 52,80% untuk Kota Medan dan 32,86% untuk Kota Padangsidimpuan.

Kesenjangan tertinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin tertinggi untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat adalah Kabupaten Simalungun dimana APK untuk laki-laki 106,73% dan perempuan 116,13% yang artinya perempuan lebih tinggi angka partisipasi kasarnya untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat. Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Sekolah Menengah Pertama atau sederajat kesenjangan tertinggi di Kabupaten Padang Lawas dimana APK untuk laki-laki 113,76% dan perempuan 91,51% dan yang cukup harus mendapat perhatian khusus adalah kesenjangan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Pendidikan Tinggi dimana Kabupaten Nias Utara memiliki APK Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk laki-laki 118,14% dan perempuan 83,58% dan ini harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah setempat. Kemudian hal yang cukup harus mendapat perhatian lebih adalah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang Pendidikan Tinggi jenis kelamin laki-laki adalah 2,62% dan perempuan 24,93%. Tingkat kesenjangan yang tinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin mencerminkan bahwa diantara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang mencolok dalam partisipasi sekolah di jenjang pendidikan tertentu dan hal ini terutama disebabkan oleh berbagai faktor, disamping ketersediaan sarana pendidikan juga faktor dari keluarga dan lingkungan serta manusia itu sendiri dalam keinginan untuk berpartisipasi dalam bersekolah.

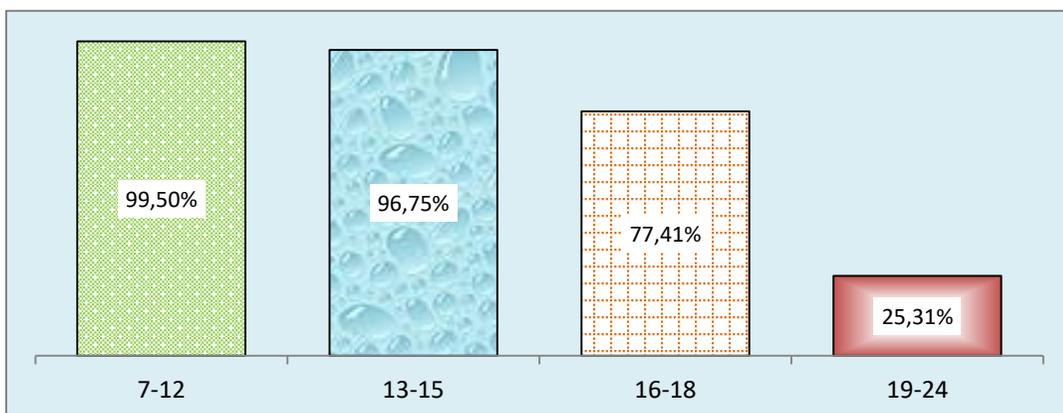
4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah pada jenjang manapun dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Sebagai contoh Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok umur 7-12 tahun adalah perbandingan jumlah penduduk usia 7-12 yang bersekolah pada jenjang pendidikan manapun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun tersebut. Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin berkurang seiring semakin meningkatnya usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 99,50% , usia 13-15 tahun 96,75%, usia 16-18 tahun 77,41 % dan usia 19-24 tahun sebesar 25,31%.

Perbedaan yang paling terbesar diantara jenis kelamin laki-laki dan perempuan untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara adalah Kota Tanjungbalai untuk kelompok usia sekolah 16-18 tahun dimana Angka Partisipasi Sekolah (APS) laki-laki sebesar 61,10% dan perempuan 84,27% atau memiliki perbedaan 23,17%. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, dimana partisipasi bersekolah pada kelompok umur 16-18 tahun di Kota Tanjungbalai memiliki jurang pemisah yang cukup tajam diantara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan ini sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah setempat untuk dicari penyebab dan jalan keluar agar kesenjangan tersebut dapat diturunkan pada tahun tahun mendatang.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kesenjangan Angka Partisipasi Sekolah diantara usia 16-18 tahun dan usia 19-24 tahun di Provinsi Sumatera Utara dimana terjadi penurunan sebesar 52,10% dan hal tersebut perlu mendapat perhatian khusus terutama kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bersekolah lagi yang bisa saja masuk ke angkatan kerja, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya.

Gambar 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Usia Sekolah Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara

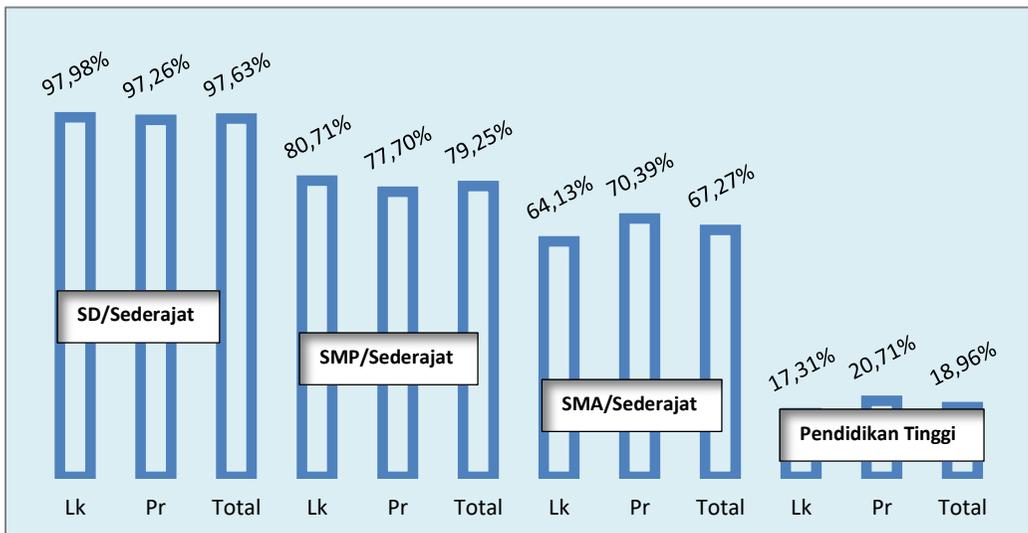
4.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan perbandingan antara penduduk yang bersekolah yang bersesuaian diantara usia sekolah dan jenjang pendidikannya dengan kelompok usia sekolah tersebut. Sebagai contoh, Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar menunjukkan bahwa perbandingan diantara penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di Sekolah Dasar dan penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum Angka Partisipasi Murni (APM) semakin berkurang seiring semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Utara untuk jenjang pendidikan SD atau sederajat sebesar 97,63%, SMP atau sederajat 79,25%, SMA atau sederajat 67,27% dan Pendidikan Tinggi 18,96%.

Ada tiga Kabupaten yakni Dairi, Labuhanbatu Utara dan Nias Barat serta dua Kota yakni Binjai dan Padangsidempuan yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat mencapai 100% dimana pada kelima daerah tersebut penduduknya sudah lebih optimal memanfaatkan fasilitas pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama

atau sederajat Kabupaten Nias Selatan memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) terendah yakni sebesar 69,16%. Sedangkan Kabupaten Asahan memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) terendah untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebesar 60,25%. Sementara itu, Kabupaten Toba Samosir memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) terendah untuk jenjang Pendidikan Tinggi sebesar 2,6%. Pada daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) yang terendah pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut hendaknya Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk lebih fokus mendorong penduduknya untuk bersekolah sesuai diantara usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

Gambar 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara

4.4 Angka Melek Huruf (AMH)

Kelompok penduduk sepuluh tahun keatas adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator Angka Melek Huruf untuk kelompok usia tersebut. Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki Angka Melek Huruf (AMH) mendekati 100% dan hanya ada satu Kabupaten yakni Nias Barat yang memiliki Angka Melek Huruf dibawah 90%, dan kondisi ini hendaknya ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Yang perlu mendapat perhatian khusus adalah di Kabupaten Nias Barat dimana untuk jenis kelamin perempuan memiliki Angka Melek Huruf terendah seluruh Sumatera Utara yakni 84,21%, yang berarti ada 15,79% perempuan di Kabupaten Nias Barat yang buta huruf, dan hal ini merupakan pekerjaan rumah Pemerintah Daerah setempat untuk menurunkan tingkat buta huruf khususnya kaum hawa tersebut. Namun secara umum Angka Melek Huruf di Provinsi Sumatera Utara secara Kabupaten/Kota tidak mengalami kesenjangan yang begitu berarti diantara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

4.5 Angka Putus Sekolah

Konsep dari persentase siswa putus sekolah adalah proporsi dari mereka yang memiliki status tidak bersekolah lagi sekarang pada suatu kelas tertentu pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan jumlah siswa yang masih bersekolah pada suatu kelas tertentu pada jenjang pendidikan yang sama pada tahun lalu ketika siswa yang putus sekolah masih berstatus masih sekolah. Sebagai contoh persentase siswa putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah jumlah seluruh siswa SD yang tidak bersekolah lagi pada saat ini namun masih bersekolah pada tahun

lalu untuk kelas tertentu dibagi dengan jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang masih sekolah pada kelas tertentu pada tahun lalu dikali 100.

Secara umum persentase siswa putus sekolah semakin besar seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Persentase siswa putus sekolah di Provinsi Sumatera Utara untuk jenjang Sekolah Dasar atau sederajat adalah 0,13% dengan rincian laki-laki 0,14% dan perempuan 0,12%, sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat persentase siswa putus sekolah adalah 1,02% dengan laki-laki sebesar 1,04% dan perempuan 1%. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat persentase siswa yang putus sekolah sebesar 1,18% dengan komposisi laki-laki 1,55% dan perempuan 0,82%.

Tabel 4.1 Sepuluh Besar Kabupaten/Kota dengan Persentase Siswa Putus Sekolah Terbesar Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	SD/ Sederajat	Kabupaten/ Kota	SMP/ Sederajat	Kabupaten/ Kota	SMA/ Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias Barat	0,41	Tanjung Balai	1,35	Dairi	2,59
Samosir	0,42	Sibolga	1,82	Sibolga	2,65
L.Batu Selatan	0,46	Mandailing Natal	2,36	Toba Samosir	2,73
Simalungun	0,47	H. Hasundutan	2,51	Nias Utara	2,80
Tanjung Balai	0,55	Padang Lawas	2,75	Nias	2,92
Tebing Tinggi	0,56	Medan	2,93	L.Batu Selatan	3,38
Labuhanbatu	0,83	Samosir	3,50	Nias Selatan	3,39
Pakpak Bharat	0,90	Gusit	4,78	H.Hasundutan	4,11
Nias	1,00	Nias Barat	6,83	Tanjung Balai	5,33
Sibolga	1,38	Padang Lawas Utara	7,55	Pakpak Bharat	9,86

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara

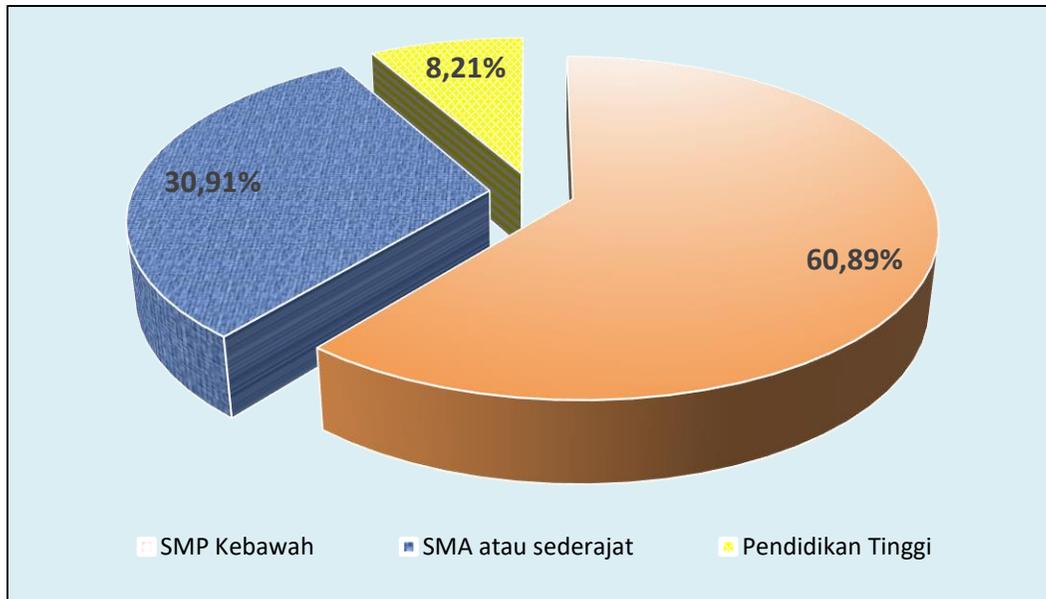
Kesenjangan tertinggi menurut jenis kelamin persentase siswa putus sekolah adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kabupaten Pakpak Bharat dimana persentase siswa putus sekolah jenis kelamin laki-laki sebesar 0% sedangkan perempuan mencapai 9,86% dan hal ini cukup memprihatinkan mengingat anggaran pendidikan yang digelontorkan pemerintah setiap tahun sudah cukup besar. Namun sangat disayangkan masih terjadi ketimpangan gender pada siswa yang putus sekolah dan hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah setempat untuk lebih proaktif dalam menurunkan persentase siswa putus sekolah di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan jika pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat persentase siswa putus sekolah sudah cukup tinggi di beberapa Kabupaten/Kota seperti Pakpak Bharat 9,86%, Tanjungbalai 5,33% dan Humbang Hasundutan 4,11%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ada dua Kabupaten yakni Padang Lawas Utara dengan persentase siswa putus sekolah 7,55%, Nias Barat dengan persentase 6,83% dan Kota Gunungsitoli dengan persentase 4,78% yang sudah masuk kategori tinggi tingkat putus sekolah.

4.6 Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Suatu Negara dikatakan maju jika penduduknya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam jumlah besar karena berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia penduduk di negara tersebut. Akan tetapi di negara-negara berkembang seperti di Asia dan Afrika dimana tingkat pendapatan perkapita belum begitu baik sangat berdampak terhadap tingkat pendidikan penduduknya.

Gambar 4.3 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara

Tingkat pendidikan tertinggi penduduk Provinsi Sumatera Utara masih didominasi pada tingkat dibawah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dengan persentase sebesar 60,89% disusul pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebesar 30,91% dan terendah pada tingkat Pendidikan Tinggi yang hanya 8,21%. Hal ini menunjukkan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi masih sangat rendah di Provinsi Sumatera Utara sehingga diperlukan upaya ekstra dari berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat peningkatan jumlah penduduk yang memiliki pendidikan tinggi.

Perbedaan yang signifikan diantara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak begitu tinggi pada jenjang pendidikan dibawah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, akan tetapi pada jenjang yang lebih tinggi baik di tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Pendidikan

Tinggi terlihat ketimpangan yang cukup tinggi di Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara. Setidaknya ada Sembilan Kabupaten yang perbedaan diantara laki-laki dan perempuan dalam menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang berbeda diatas sepuluh persen (lampiran Tabel L-4.6.2). Empat Kabupaten di pulau Nias memiliki perbedaan yang paling tinggi diantara laki-laki dan perempuan dalam menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat yakni Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Nias dimana jumlah laki-laki yang menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat lebih besar dari perempuan di keempat daerah tersebut.

Kabupaten Nias memiliki perbedaan terbesar diantara laki-laki dan perempuan dalam menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat dimana ada 63,47% laki-laki dan 36,53% perempuan yang pendidikan tertingginya Sekolah Menengah Atas atau sederajat dari keseluruhan penduduk sepuluh tahun keatas yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut.

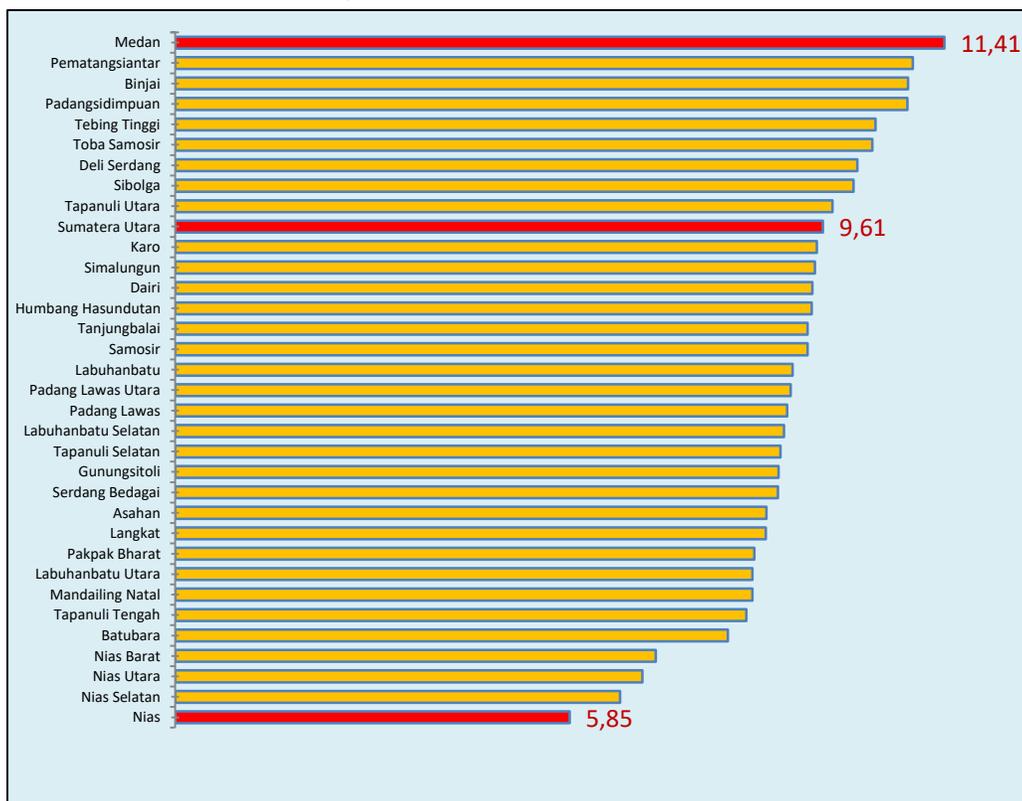
Kesenjangan diantara laki-laki dan perempuan dalam menamatkan Pendidikan Tinggi di Provinsi Sumatera Utara sangat memprihatinkan dimana ada 24 kabupaten/kota yang memiliki perbedaan diatas sepuluh persen bagi penduduk berusia sepuluh tahun keatas dalam menamatkan Pendidikan Tinggi, dimana secara umum perempuan lebih banyak yang menamatkan pendidikan tinggi dibanding laki-laki (lampiran Tabel L-4.6.3). Kabupaten Simalungun memiliki perbedaan tertinggi dimana 31,59% laki-laki berusia sepuluh tahun keatas menamatkan pendidikan tinggi sedangkan perempuan 68,41% dari keseluruhan penduduk berusia sepuluh tahun keatas yang menamatkan jenjang pendidikan tersebut. Selain Kabupaten Simalungun yang memiliki perbedaan diatas 30% diantara laki-laki dan perempuan dalam hal menamatkan jenjang Pendidikan Tinggi adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan persentase masing-masing untuk laki-laki sebesar 34,48% dan perempuan 65,52%. Tugas berat yang harus diemban oleh kedua Pemerintah Daerah setempat untuk lebih

mendorong penduduk laki-laki berusia sepuluh tahun keatas untuk meningkatkan taraf pendidikannya sehingga perbedaan yang cukup besar tersebut dapat dikurangi pada masa yang akan datang.

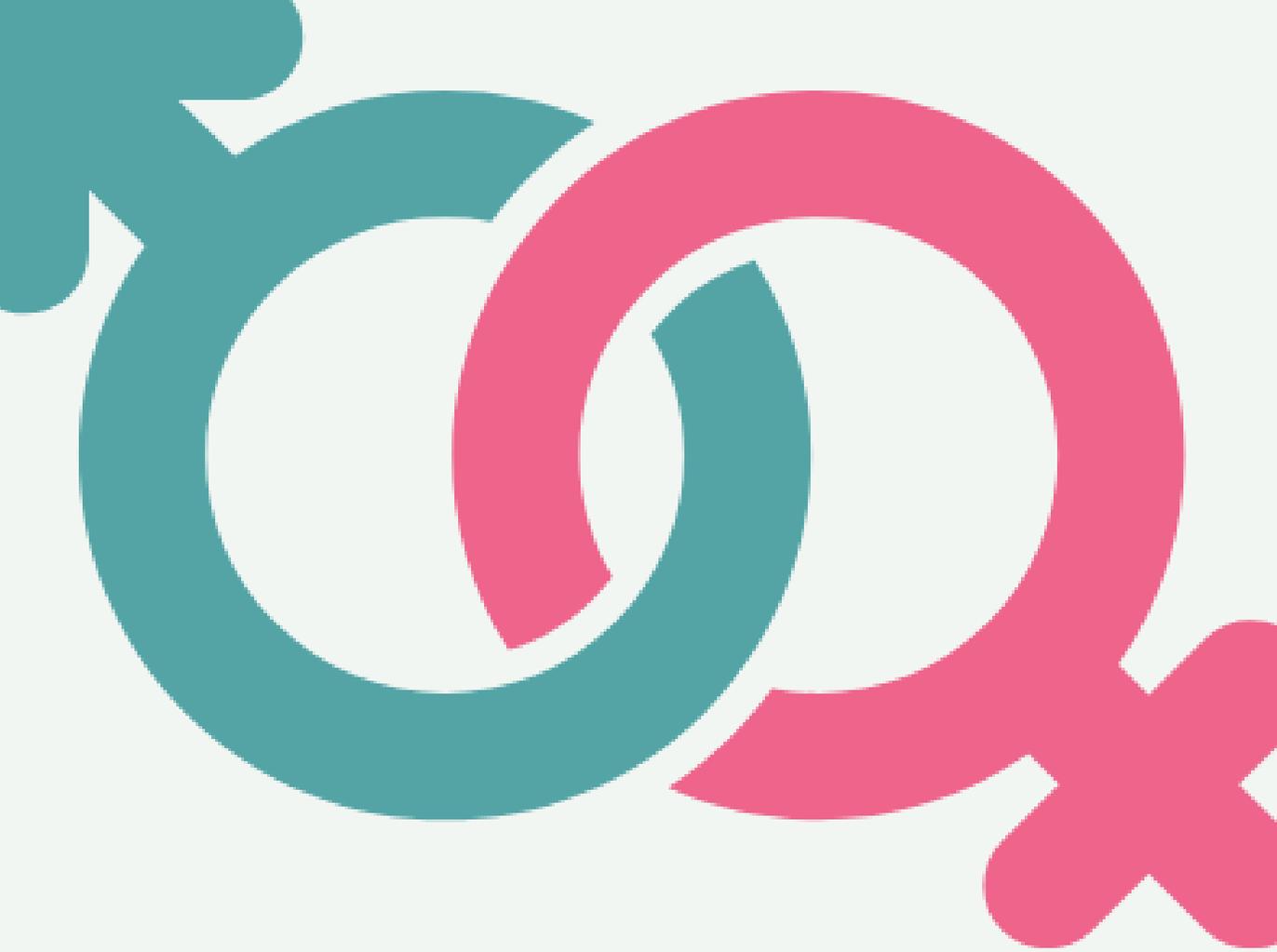
4.7 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mencerminkan seberapa lama penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menempuh pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun keatas di Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,61 tahun yang berarti secara rata-rata menduduki hingga jenjang kelas tiga Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Tiga kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi adalah Kota Medan 11,41 tahun, Kota Pematangsiantar 10,94 tahun dan Kota Binjai 10,87 tahun. Sedangkan tiga kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Nias (5,85 tahun), Kabupaten Nias Selatan (6,6 tahun) dan Kabupaten Nias Utara (6,93 tahun). Empat kabupaten di Pulau Nias merupakan yang terendah angka rata-rata lama sekolah sehingga perlu perhatian khusus baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan juga Pemerintah Provinsi bahkan Pemerintah Pusat dalam bersinergi meningkatkan rata-rata lama sekolah di empat daerah tersebut.

Gambar 4.4 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 BPS Provinsi Sumatera Utara



BAB 5

KESEHATAN



5

KESEHATAN

5.1 Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat.

Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan karena secara langsung memengaruhi tingkat produktivitas. Untuk itu pembangunan dibidang kesehatan yang bermutu hendaknya dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara adil karena setiap orang berhak hidup sehat tanpa membedakan jenis kelamin.

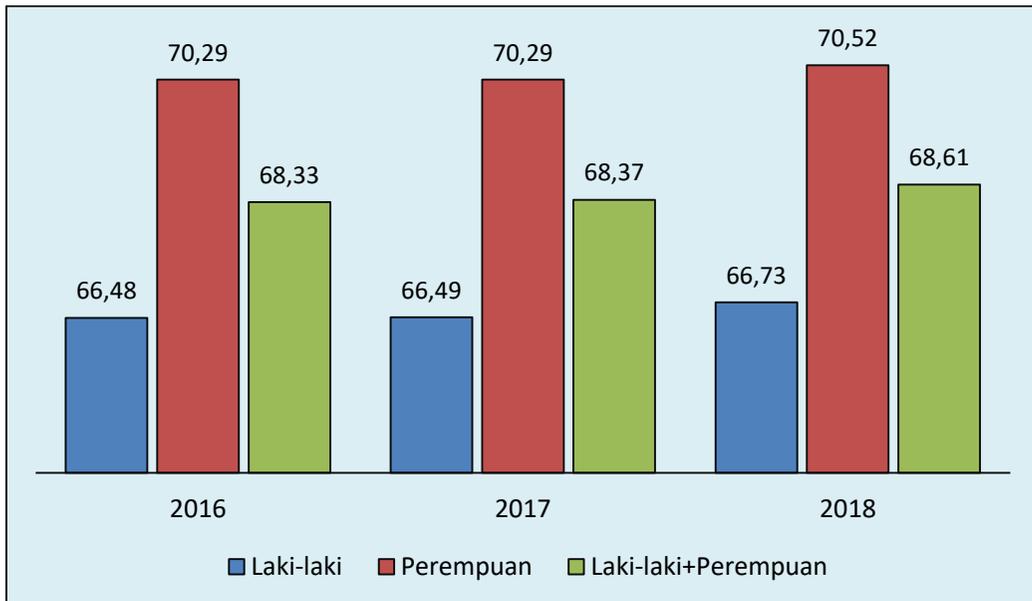
Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pelayanan kesehatan dan program/

kebijakan kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

5.2 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 5.1 Usia Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin, 2016-2018



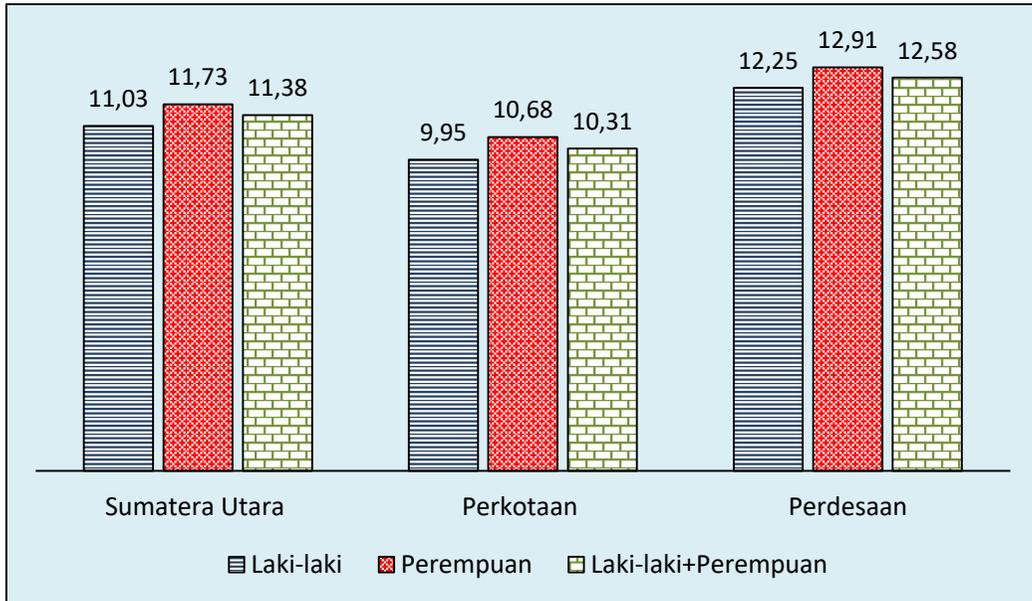
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar 5.1 dapat dilihat bahwa usia harapan hidup perempuan di Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2018 Usia Harapan Hidup perempuan mencapai 70,52 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 66,73 tahun. Sedangkan bila dilihat perbandingan antar kabupaten/kota berdasarkan Tabel L-5.1 pada lampiran, usia harapan hidup laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan di semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Dimana kabupaten/kota terendah usia harapan hidupnya adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan usia mencapai 60,32 dan 64,05 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sementara itu, Kota Pematangsiantar mempunyai usia harapan hidup tertinggi sebesar 70,95 dan 74,79 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

5.3 Angka Kesakitan

Angka kesakitan atau *Morbidity Rate* adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminalitas atau keluhan lainnya yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

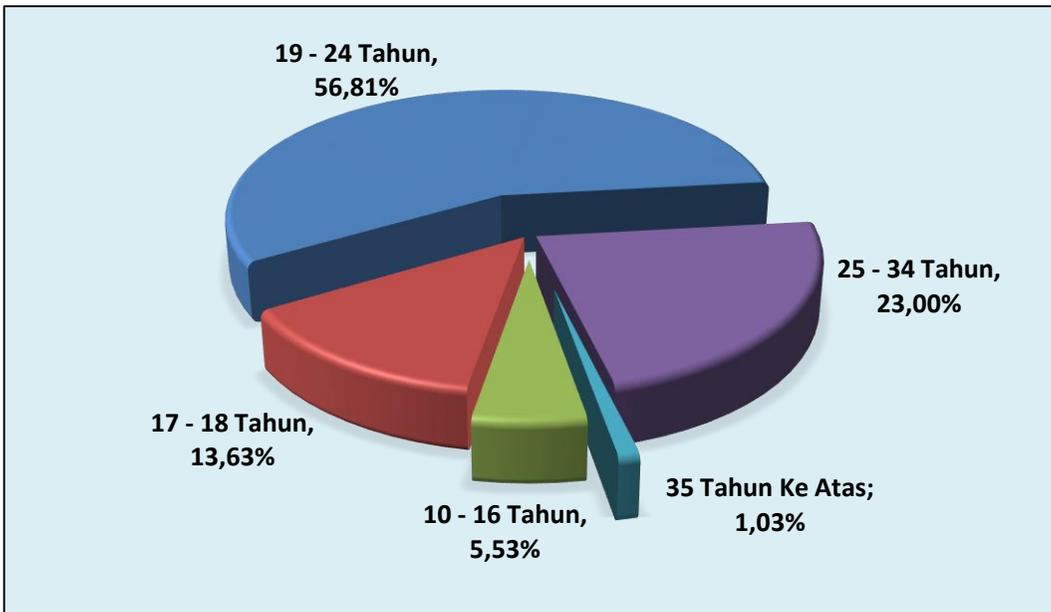
Angka kesakitan yang tinggi di suatu wilayah mengindikasikan buruknya kondisi kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Kardjati, Alisjahbana, dan Kusin (1985) menyebutkan jika angka kesakitan mencerminkan keadaan kesehatan yang sesungguhnya karena memiliki hubungan yang erat dengan faktor lingkungan seperti kemiskinan, kurang gizi, penyakit infeksi, pencemaran, air minum yang sehat, kebersihan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Dari hasil Susenas 2018 pada gambar 5.2 diketahui bahwa di Sumatera Utara ada sekitar 11 persen penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dilihat menurut wilayah, persentase penduduk perdesaan yang menderita sakit selama sebulan terakhir lebih besar dibanding penduduk perkotaan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat perkotaan lebih baik dibanding masyarakat di perdesaan.

5.4 Usia Perkawinan Pertama

Perkawinan usia muda dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor dominan yang mempengaruhi tindakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya adalah norma keagamaan, adat, kebiasaan, status sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan, nilai yang berlaku dalam komunitas. Dengan demikian keragaman pola perkawinan yang dijumpai dalam masyarakat disebabkan oleh perbedaan kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat tersebut. Namun demikian tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam memengaruhi tingkat kesadaran tentang arti sebuah perkawinan. Semakin tinggi pendidikannya, seseorang cenderung akan memilih saat yang tepat untuk melangsungkan perkawinan atau menunda usia perkawinan ke tingkat yang lebih dewasa. Semakin rendah umur perkawinan pertama maka masa reproduksi orang tersebut lebih panjang akibatnya semakin beresiko terhadap kesehatan ibu dan anaknya kelak disamping tingkat kesuburannya tinggi sehingga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk serta tingkat kesadaran dan pengetahuan dalam membina rumah tangga masih relatif rendah.

Berdasarkan data dari Susenas 2018 usia perkawinan pertama perempuan di Provinsi Sumatera Utara pada gambar 5.3 dominan di usia 19-24 tahun sebesar 56,81 persen. Masih ada sekitar 5,53 persen perkawinan pertama pada usia 10-16 tahun. Sedangkan rata-rata usia perkawinan pertama di Provinsi Sumatera Utara 21,92 tahun (Tabel L-5.3 lampiran). Pada tingkat kabupaten/kota rata-rata usia perkawinan pertama berkisar di angka 20,74 tahun sampai 23,73 tahun.

Gambar 5.3 Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin dan Usia perkawinan Pertama Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

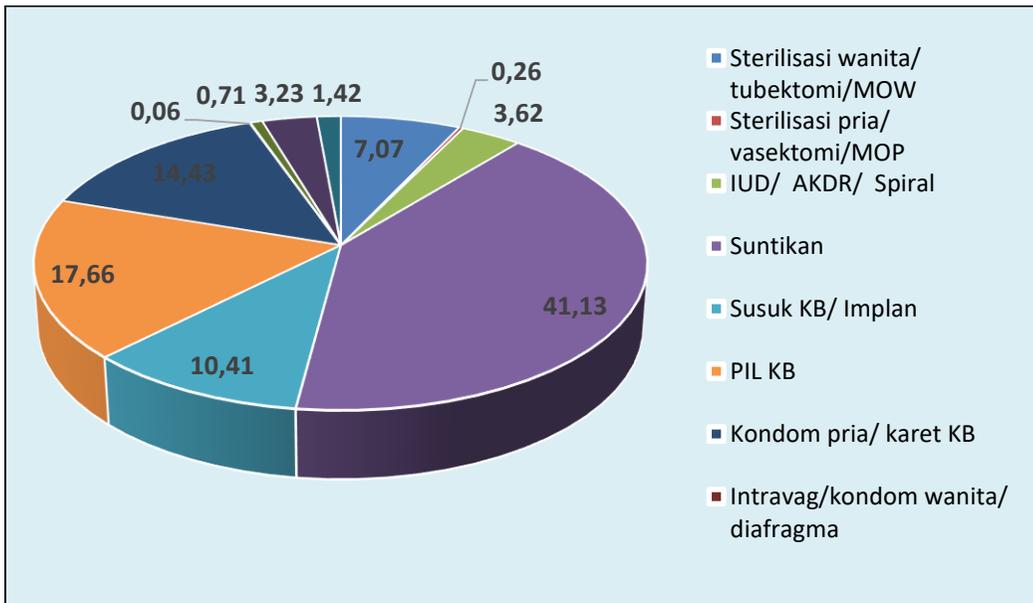
5.5 Keluarga Berencana

Kebijakan dan program pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk dan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak adalah Program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana (KB) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Peluang perempuan dengan usia perkawinan pertama pada usia muda terhadap jumlah anak yang dilahirkan akan relatif banyak. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan program KB sehingga dapat diatur jarak dan jumlah kelahiran.

Data dari hasil Susenas 2018 menunjukkan masih rendahnya laki-laki dalam ber-KB dibandingkan perempuan. Hal ini mungkin disebabkan lebih banyaknya

alat/cara KB untuk perempuan seperti MOW, IUD, suntikan, susuk dan pil, sedangkan alat/cara KB untuk laki-laki lebih sedikit seperti MOP dan kondom. Pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa dari 45,12 persen perempuan usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan alat kontrasepsi (Tabel L-5.4 pada lampiran), suntikan dan pil KB adalah yang paling banyak digunakan masing-masing sebesar 41,13 persen dan 17,66 persen. Sedangkan yang menggunakan alat/cara KB laki-laki yaitu MOP dan kondom masing-masing sebesar 0,26 persen dan 14,43 persen.

Gambar 5.4 Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun ke Atas yang Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

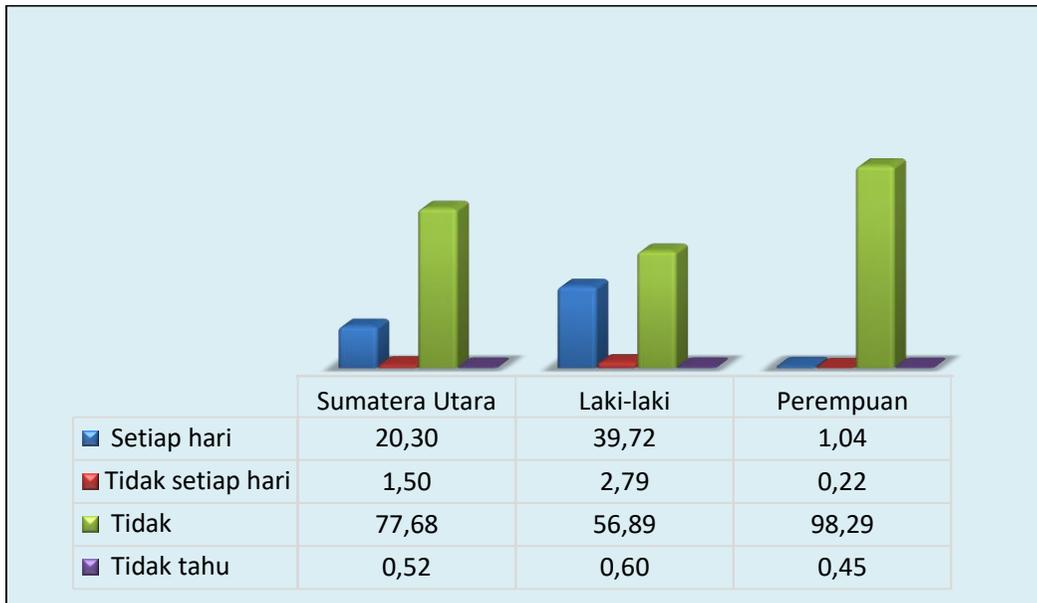
5.6 Perilaku Merokok

Salah satu masalah kesehatan yang dihadapi tidak hanya di Sumatera Utara, namun juga di Indonesia adalah perilaku merokok masyarakat. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok mulai dari kampanye anti rokok,

penerapan pajak yang tinggi, penayangan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, dan sebagainya. Dampak negatif dari merokok telah banyak disebarluaskan. Namun kenyataannya, kebiasaan merokok pada masyarakat sulit dikurangi. Masyarakat seakan acuh terhadap bahaya merokok walaupun telah banyak informasi yang diperoleh. Hal ini disebabkan efek negatif merokok umumnya tidak dirasakan secara langsung. Akibat langsung bagi perokok baru akan dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti kanker paru, kanker saluran pernafasan bagian atas, penyakit jantung, *stroke*, bronkitis, *emphysema*, dan lainnya. Bahaya merokok lebih dirasakan oleh perokok pasif.

Susenas mengumpulkan data perilaku merokok pada penduduk berusia lima tahun ke atas. Jumlah penduduk yang merokok setiap hari dalam sebulan terakhir di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017 sekitar 20 persen, yang berarti sekitar satu dari lima penduduk Sumatera Utara yang berumur lima tahun ke atas merokok setiap hari dalam sebulan terakhir. Pada tahun 2017, persentase penduduk berumur lima tahun ke atas yang merokok dalam sebulan terakhir (setiap hari ataupun kadang-kadang) sebesar 21,80 persen, yang terdiri dari 20,30 persen penduduk merokok setiap hari dan 1,50 persen penduduk yang merokok kadang-kadang. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki yang merokok dalam sebulan terakhir sebesar 42,51 persen, terdiri dari 39,72 persen penduduk merokok setiap hari dan 2,79 persen penduduk yang merokok kadang-kadang. Sedangkan penduduk perempuan yang merokok setiap hari sebesar 1,04 persen (Gambar 5.5).

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Merokok Dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

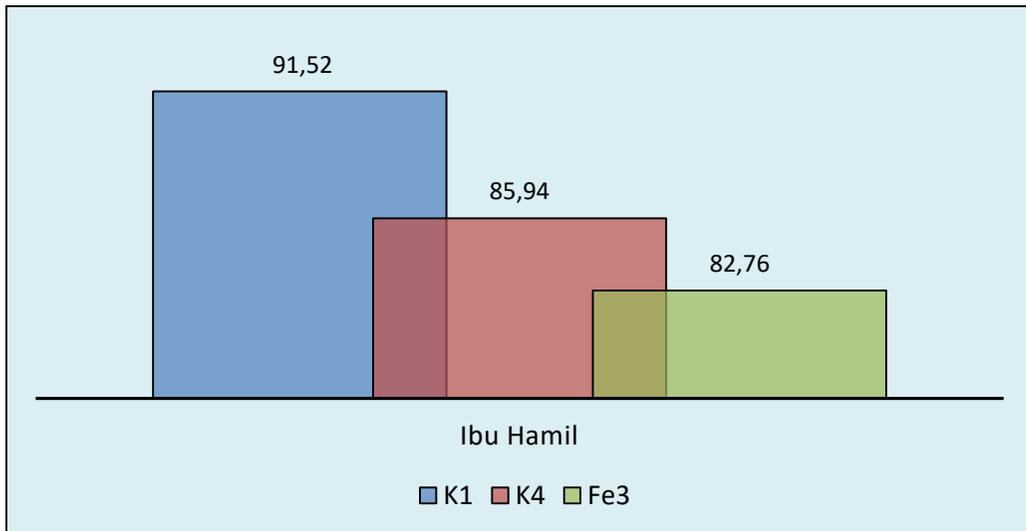


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, BPS Provinsi Sumatera Utara

5.7 Ibu Hamil

Upaya pemerintah dalam mengatasi anemia defisiensi besi ibu hamil yaitu terfokus pada pemberian tablet tambahan darah (Fe) pada ibu hamil. Anemia defisiensi besi merupakan masalah umum dan luas dalam bidang gangguan gizi di dunia. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 88 Tahun 2012 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil, bahwa untuk melindungi wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan gizi dan mencegah terjadinya anemia gizi besi maka perlu mengonsumsi tablet tambah darah (Kemenkes RI, 2013). Program pemberian tablet besi sangat terkait dengan pelayanan kesehatan pada ibu hamil (K1-K4) karena diberikan pada saat ibu hamil melakukan kunjungan ke pelayanan kesehatan, pemberian tablet besi juga menjadi salah satu syarat terpenuhinya kunjungan ibu hamil K4.

Gambar 5.6 Persentase Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan ke Pelayanan Kesehatan (K1-K4) dan yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Tahun 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

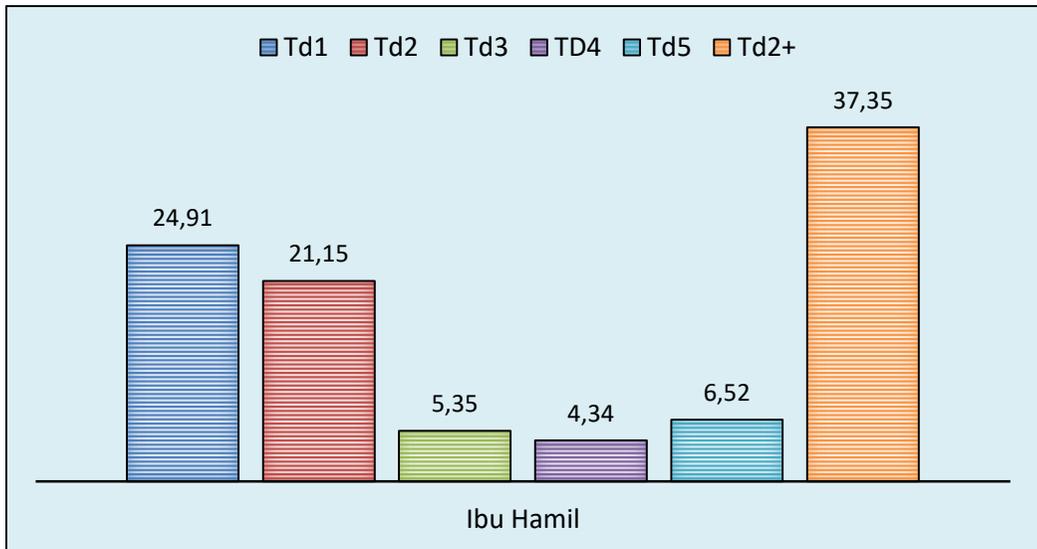
Berdasarkan gambar 5.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 dari 336.337 ibu hamil, ada sebesar 85,94 persen yang melakukan kunjungan K4 dan sebesar 82,76 persen ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (Fe3).

Salah satu cara untuk memastikan kehamilan tetap sehat adalah dengan mendapatkan vaksin sebelum hamil. Idealnya, vaksinasi harus didapatkan sebelum seorang ibu mulai merencanakan kehamilan. Vaksin yang didapat sebelum hamil tidak hanya penting untuk melindungi kesehatan untuk menghadapi kehamilan, tetapi juga untuk kesehatan bayi. Sistem kekebalan tubuh ibu merupakan pertahanan awal bayi untuk mencegahnya dari berbagai penyakit. Setelah ibu divaksin, antibodi yang terbentuk di tubuh si ibu akan diteruskan ke bayi dalam kandungan. Vaksin juga akan melindungi bayi selama beberapa bulan setelah kelahiran.

Salah satu penyakit yang sangat serius yang bisa terjadi pada ibu dan bayi adalah Tetanus dan Difteri. Orang terinfeksi sering mengalami komplikasi yang parah. Pemberian vaksin Tetanus Difteri (Td) dilakukan untuk melindungi ibu hamil dan janin dari penyakit Tetanus dan Difteri. Dari gambar 5.7 dapat dilihat bahwa dari 336.337

ibu hamil di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 yang mendapat imunisasi Td1 sebesar 24,91 persen, Td2 sebesar 21,15 persen dan Td2+ 37,35 persen.

Gambar 5.7 Persentase Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Imunisasi Td Tahun 2018



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

5.8 Jaminan Kesehatan

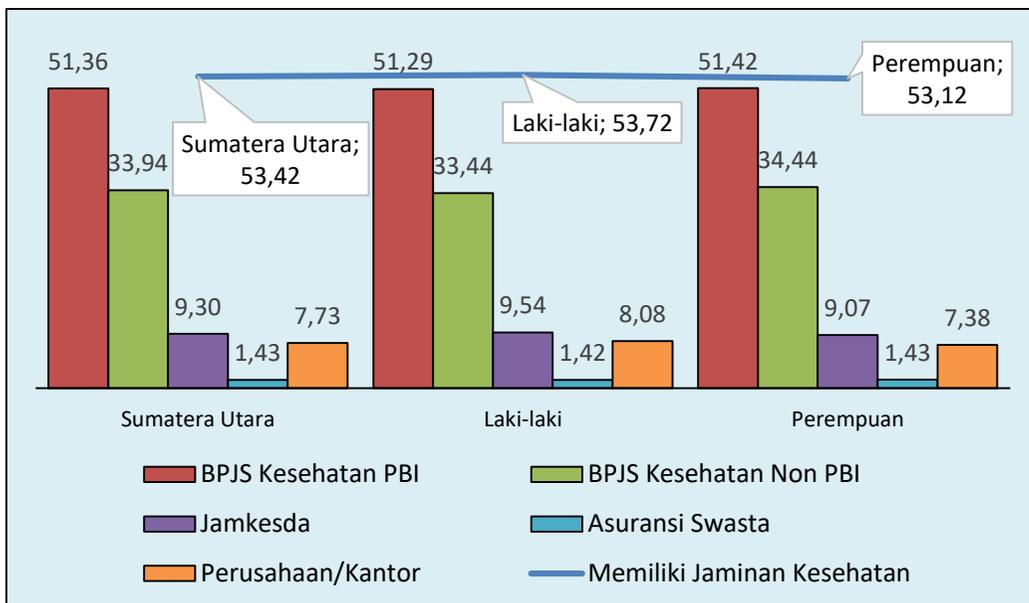
Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk (Perpres No. 12 Thn. 2013).

Pada pengumpulan data Susenas jaminan kesehatan dapat berupa jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang terdiri dari dua kelompok peserta BPJS Kesehatan, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Bukan Penerima Bantuan

luran (PBI) jaminan kesehatan. Program jaminan bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya (Jamkesda), asuransi swasta, dan jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor.

Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seseorang akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan dapat menjamin kesehatan seseorang.

Gambar 5.8 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2018



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tidak ada perbedaan persentase kepemilikan jaminan kesehatan antara laki-laki dan perempuan yaitu sama disekitar 53 persen berdasarkan dari hasil Susenas 2018. Jika dilihat dari jenis jaminan kesehatan yang dimiliki, BPJS Kesehatan PBI yang

mendominasi jaminan kesehatan yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan yaitu sekitar 51 persen diikuti BPJS Kesehatan Non PBI di sekitar 33 persen.

5.9 HIV/AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, yaitu jenis sel darah putih yang merupakan bagian yang penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit.

Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup mengkhawatirkan. Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga koordinasi dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Kegiatan penanggulangan HIV/AIDS diarahkan untuk melakukan upaya pokok berupa pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan serta kegiatan penunjang yang dibutuhkan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara pada tabel lampiran L-5.11, jumlah penderita HIV pada Tahun 2018 sebanyak 1498 orang, dimana sebesar 1097 orang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan kasus penderita AIDS sebesar 688 orang dengan jumlah kasus penderita laki-laki sebesar 442 orang. Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Sumatera Utara lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Pada banyak kasus, sering ditemukan seorang perempuan tidak melakukan perilaku berisiko ternyata terkena HIV. Mereka tertular dari suaminya yang melakukan hubungan seksual bergonta-ganti pasangan.



BAB 6

KETENAGAKERJAAN

6

KETENAGAKERJAAN

Program pemberdayaan perempuan dan isu gender dimulai dari pendekatan *Women in Development* (WID) yang berasal dari kaum Liberia Utara pada tahun 1970 dan 1980. Pendekatan ini didasari oleh paradigma modernisasi yang ditumpukan pada inisiatif serta pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat, guna meringankan kerja wanita. Seiring waktu paradigma ini mengalami kegagalan dari segi pemanfaatan sumber modal manusia yang efektif, produktif dan reproduktif (Mosse,1996:205). Oleh karena hal tersebut, paradigma ini beralih kepada konsep “Wanita dan Pembangunan” *Women and Development* (WAD).

Pembangunan akan berjalan baik jika sejalan dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi diperlukan oleh setiap penduduk usia kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara aktivitas ekonomi kerap dihubungkan dengan gender baik dari institusi unit kerja maupun kebijakan pemerintah itu sendiri. Isu gender yang paling menonjol dibidang ekonomi adalah masih adanya tradisi yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dari sisi ketenagakerjaan. Selain itu masih adanya norma masyarakat bahwa yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah adalah laki-laki, sedangkan perempuan sebagai istri bertugas mengurus rumah tangga dan melayani suami.

Inti dari kesetaraan gender adalah menempatkan peran dan kedudukan perempuan yang tidak kalah dengan laki-laki, terlepas dari kodrat utama perempuan yakni mengurus rumah tangga. Oleh karena itu guna mengekspresikan potensi lain

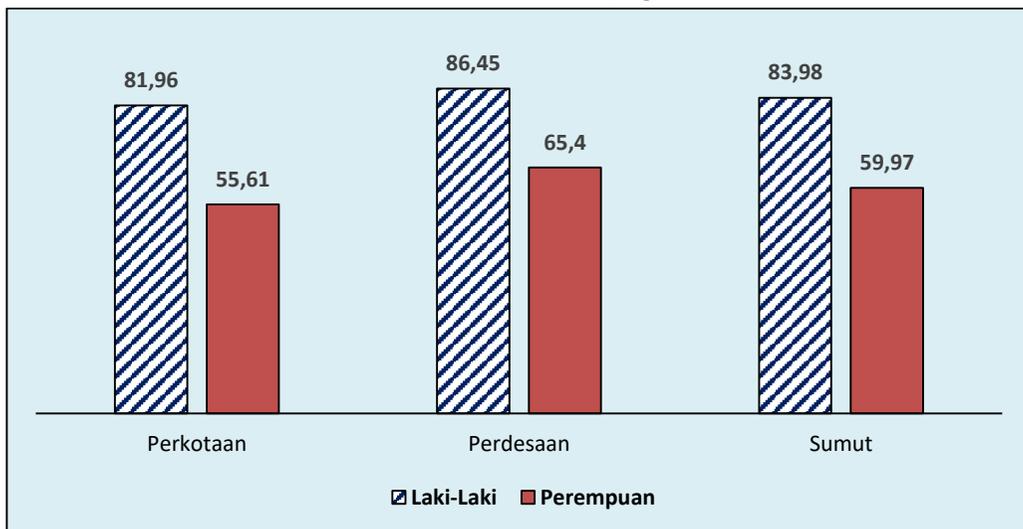
dalam diri perempuan menjadi alasan bagi perempuan untuk ikut terjun dalam dunia tenaga kerja.

Data ketenagakerjaan menurut jenis kelamin mampu memberikan informasi penting mengenai potensi penduduk laki-laki dan perempuan untuk dapat aktif dalam kegiatan ekonomi. Sehingga perencanaan maupun evaluasi pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan lebih baik kedepannya.

6.1 Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan rasio dari jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Indikator ini memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Gambar 6.1 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Klasifikasi Daerah dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar diatas terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baik di perdesaan maupun di perkotaan selalu lebih rendah dari tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki. Hal ini dapat diartikan bahwa keikutsertaan laki-laki yang aktif secara ekonomi lebih dominan dibanding perempuan. Kondisi ini wajar mengingat perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga dan bukan masuk dalam penduduk yang aktif secara ekonomi.

TPAK perempuan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan di perkotaan yakni sebesar 65,4 persen. Hal ini diduga karena sektor pekerjaan di daerah perdesaan lebih banyak memungkinkan para tenaga kerja perempuan untuk terlibat sebagai angkatan kerja. Misalnya di sektor pertanian yang merupakan sektor lapangan kerja terbesar di perdesaan. Akan tetapi sebagian besar dari tenaga kerja perempuan tersebut hanya berstatus sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar.

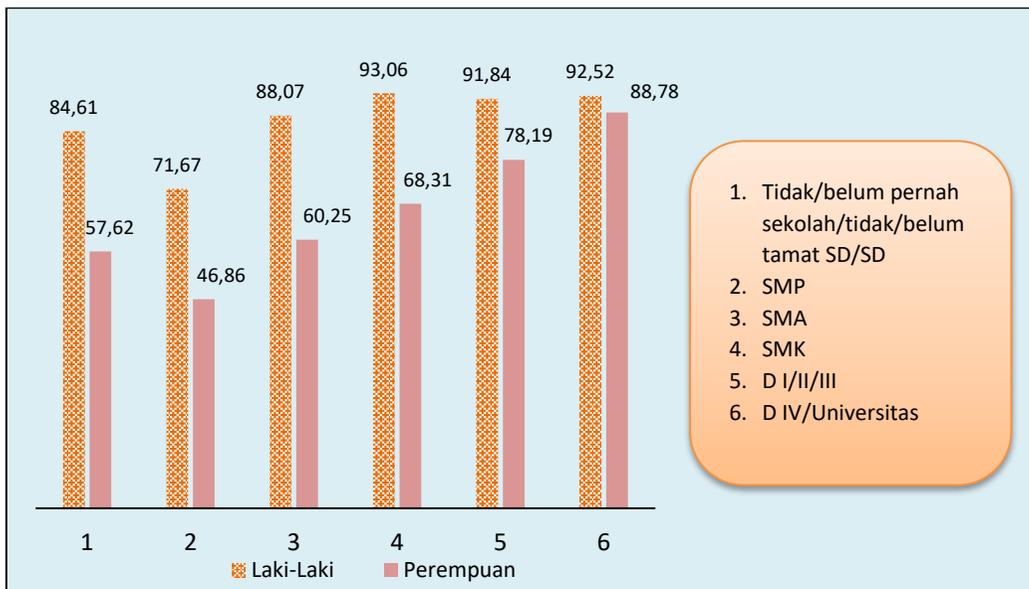
Tabel 6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
15 – 19	40,32	32,82
20 – 24	85,32	64,48
25 – 29	97,16	63,54
30 – 34	97,76	65,75
35 – 39	97,41	70,36
40 – 44	97,77	71,01
45 – 49	97,07	73,96
50 – 54	95,82	69,33
55 – 59	89,87	64,54
60 +	65,04	41,57
Sumatera Utara	83,98	59,97

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa di setiap kelompok umur TPAK perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. TPAK laki-laki cukup besar (> 95 persen) pada umur produktif yaitu umur 25 -54 tahun. Sementara itu TPAK perempuan mulai meningkat hingga diatas 70 persen pada umur 35-49 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa pada rentang umur tersebut pasokan tenaga kerja perempuan untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa lebih besar dibanding kelompok umur lainnya. Hal ini dimungkinkan dengan kenyataan bahwa perempuan akan masuk ke dalam aktifitas ekonomi sebagai angkatan kerja secara maksimal ketika sudah melewati masa melahirkan dan ketika anak-anak mereka sudah cukup besar untuk tidak memerlukan penjagaan khusus.

Gambar 6.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Sementara itu dari sisi pendidikan, pasokan tenaga kerja perempuan yang paling tinggi untuk terlibat aktif secara ekonomi adalah penduduk perempuan dengan tamatan D-IV/Universitas (88,78 persen). Sedangkan laki-laki pasokan tenaga kerja terbesar adalah penduduk dengan tamatan SMK (93,06 persen).

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, hampir seluruh kabupaten/kota TPAK laki-laki selalu lebih besar dari TPAK perempuan. Hanya di kabupaten Nias Barat TPAK perempuan lebih besar dari TPAK laki-laki. Di kabupaten ini juga dengan TPAK perempuan terbesar di Sumatera Utara (90,89 persen). Dengan kata lain, pasokan tenaga kerja perempuan terbesar untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa berada di Nias Barat (lampiran Tabel L-6.1).

Rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki terkecil berada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (55,65). Hal ini memperlihatkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan yang terlibat aktif secara ekonomi separuh dari angkatan kerja laki-laki. Relatif kecilnya rasio ini diduga karena lapangan pekerjaan yang tersedia pada umumnya membutuhkan keahlian khusus dan dengan jam kerja penuh. Kondisi ini berakibat keterlibatan perempuan dalam ekonomi lebih rendah dibanding laki-laki.

6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka terdiri dari:

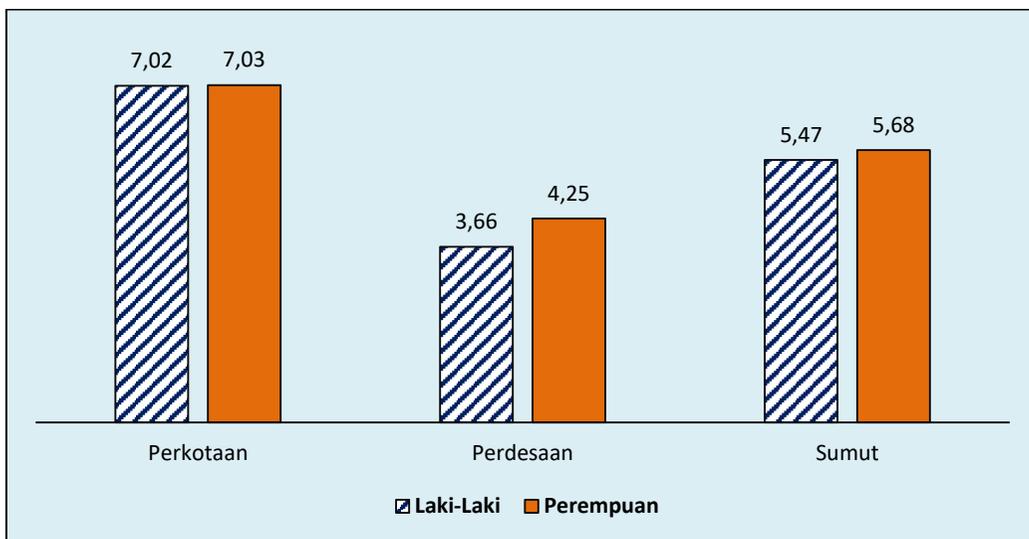
- a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio dari jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan

besarnya persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Berbeda dengan TPAK, persentase TPT perempuan selalu lebih besar dari TPT laki-laki. Perbedaan TPT yang cukup kecil antara laki-laki dan perempuan berada di daerah perkotaan. Hal ini diduga karena peluang kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di daerah perkotaan hampir sama. Berbeda halnya dengan di perdesaan, kesempatan kerja untuk perempuan lebih kecil dibanding laki-laki.

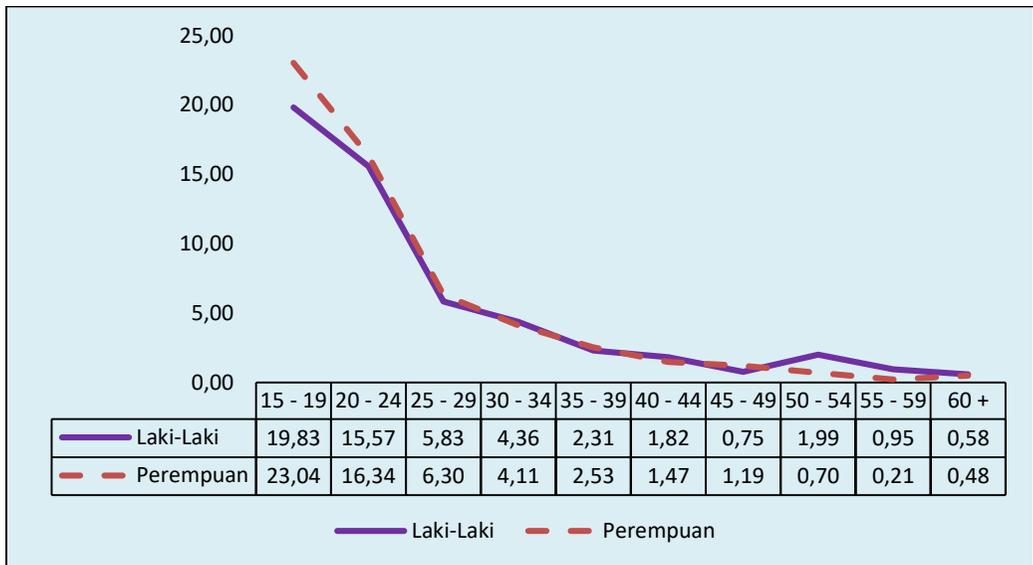
Gambar 6.3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Klasifikasi Daerah dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Pola TPT baik laki-laki maupun perempuan jika dilihat menurut kelompok umur hampir memperlihatkan pola yang sama. Dimana TPT tertinggi baik laki-laki maupun perempuan berada pada kelompok umur 15-19 tahun. Dimana pada umumnya kondisi TPT perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal berbeda terjadi khususnya pada umur 50 tahun ke atas, yakni TPT perempuan lebih rendah dibanding TPT laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa angkatan kerja perempuan pada usia lanjut lebih banyak terserap di pasar kerja.

Gambar 6.4 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Menurut kabupaten/kota pada lampiran Tabel L-6.2 perbandingan TPT perempuan dan laki-laki pada umumnya diatas 100 persen, kecuali ada beberapa kabupaten yang diatas 100 persen bahkan diatas 200 persen. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Toba Samosir, Asahan, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu Utara. Hal ini berarti TPT perempuan di daerah tersebut dua kali lipat dari TPT laki-laki.

6.3 Pekerja Formal dan Informal

Pekerja formal adalah mereka yang bekerja dengan status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar ataupun mereka yang berstatus buruh/karyawan. Sementara mereka yang bekerja dengan status pekerjaan lain masuk dalam pekerja informal. Dari tabel 6.2 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh penduduk Sumatera Utara yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan bekerja di sektor informal.

Jika dilihat lebih dalam lagi dari sisi sektor informal, persentase penduduk perempuan lebih besar dibanding laki-laki dimana masing-masing sebesar 62,09 persen dan 52,80 persen. Akan tetapi penduduk perempuan yang bekerja di sektor informal didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan status sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Sementara itu untuk penduduk laki-laki didominasi oleh penduduk yang bekerja dengan status berusaha sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa masih rendahnya eksistensi perempuan di dunia kerja sebagai wirausahawan. Bahkan sebagian besar perempuan mayoritas bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar dari sisi sektor informal.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Bekerja Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2018

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)	(4)
Formal	47,2	37,91	43,28
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	4,34	1,73	3,24
Buruh/pegawai/karyawan	42,86	36,18	40,04
Informal	52,80	62,09	56,72
Berusaha Sendiri	18,72	18,90	18,80
Berusaha dibantu buruh tidak dibayar/tidak tetap	16,09	14,49	15,41
Pekerja bebas	9,80	3,88	7,30
Pekerja keluarga/tidak dibayar	8,19	24,82	15,21

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

6.4 Pekerja Menurut Lapangan Usaha

Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) sektor, yaitu: (1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan (2) Pertambangan dan Penggalian (3) Industri, (4) Listrik, Gas dan Air Minum, (5) Konstruksi, (6) Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi (7) Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi (8) Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan (9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Dari sisi sektor lapangan pekerjaan utama, mayoritas penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor pertanian. Dimana penduduk laki-laki sebesar 37,66 persen dan perempuan sebesar 32,62 persen. Perbedaan jenis kelamin ternyata juga memengaruhi struktur lapangan pekerjaan utama.

Di perdesaan sektor lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan adalah sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan; Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Sementara itu di perkotaan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan; dan industri.

Hampir sama dengan tenaga kerja perempuan, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja laki-laki adalah sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Akan tetapi setelah jasa diikuti oleh sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

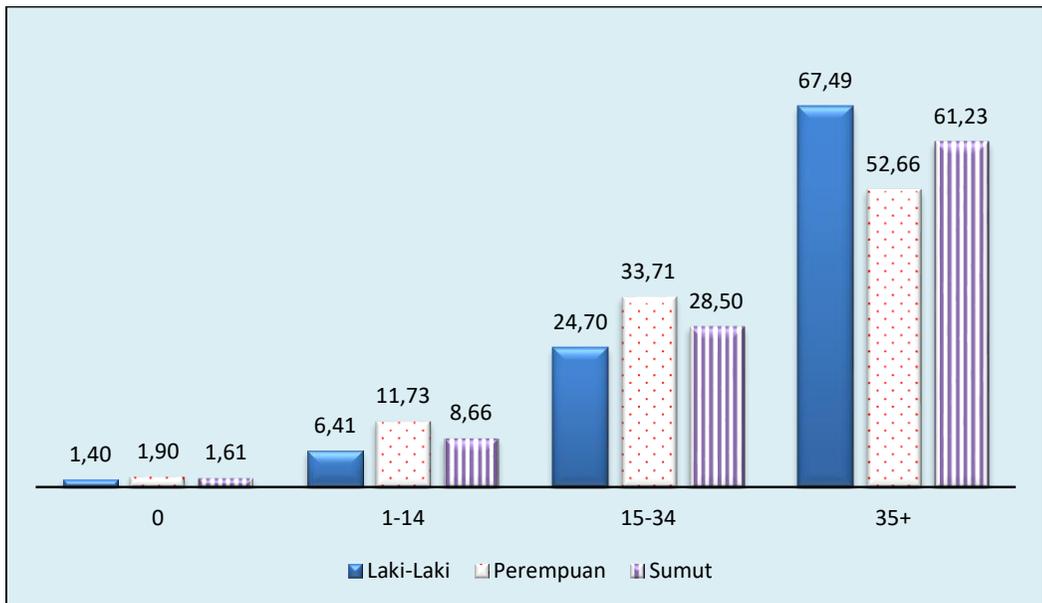
Lapangan Pekerjaan Utama	Perkotaan		Perdesaan		Sumatera Utara	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan	16,11	8,55	61,85	57,37	37,66	32,62
2. Pertambangan dan Penggalian	0,65	0,07	1,26	0,27	0,94	0,17
3. Industri	13,64	12,37	5,75	6,91	9,92	9,68
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,67	0,39	0,39	0,17	0,54	0,29
5. Konstruksi	10,41	0,49	7,13	0,12	8,86	0,31
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	24,35	41,57	9,64	18,95	17,42	30,42
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	12,79	1,86	4,26	0,18	8,77	1,03
8. Lembaga Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3,74	2,79	1,09	0,43	2,49	1,63
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	17,63	31,92	8,63	15,58	13,39	23,87

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

6.5 Pekerja Menurut Jam Kerja

Jumlah jam kerja selama seminggu yang lalu dapat menunjukkan produktivitas pekerja dalam suatu jenis kegiatan pekerjaan. Seseorang dikatakan bekerja penuh (*full time worker*) jika jumlah jam kerja yang dijalannya memenuhi jumlah jam kerja normal atau diatas 35 jam selama seminggu. Mereka yang bekerja dengan jam kerja dibawah jam kerja normal atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu dianggap sebagai pekerja tidak penuh. Termasuk ke dalam pekerja tidak penuh adalah mereka yang setengah menganggur dan pekerja paruh waktu.

Gambar 6.5 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

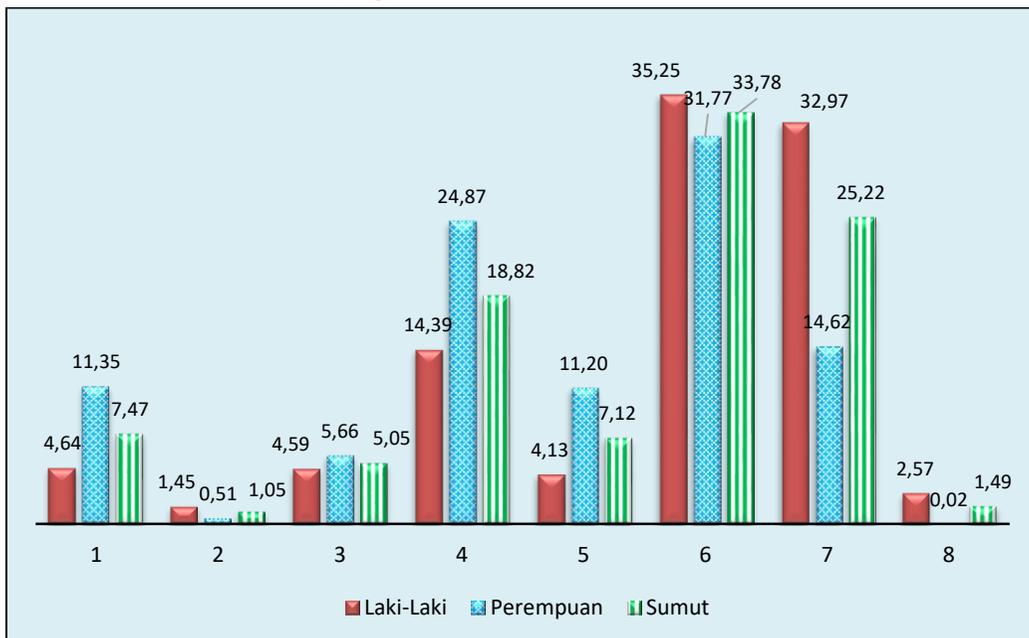
Dari gambar 6.5 diperlihatkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Sumatera Utara bekerja lebih dari jam kerja normal (>35 jam) selama seminggu. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk perempuan yang bekerja dibawah jam kerja normal

lebih banyak dibanding laki-laki yakni 47,34 persen. Hal ini wajar karena sebagian besar perempuan masih harus menyisihkan banyak waktu untuk mengurus rumah tangga dan keluarganya.

6.6 Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan utama dikelompokkan menjadi 8 (delapan), yaitu: (1) Tenaga professional, teknisi dan sejenis; (2) Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; (3) Tenaga tata usaha dan yang sejenis; (4) Tenaga usaha penjualan; (5) Tenaga usaha jasa; (6) Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan; (7) Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar dan (8) lainnya.

Gambar 6.6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



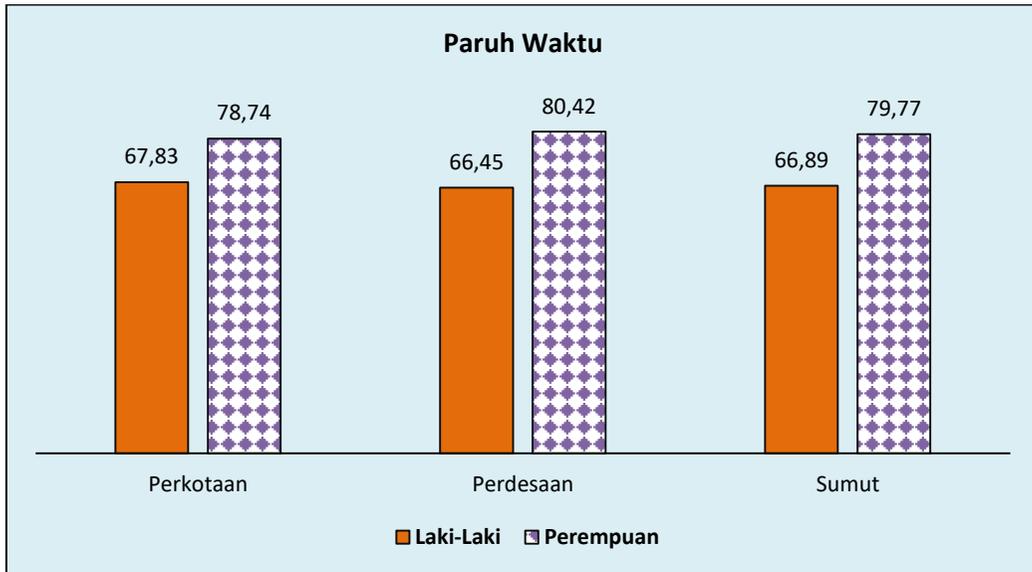
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2018 penduduk Sumatera Utara mayoritas bekerja sebagai tenaga usaha di Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 33,78 persen. Selanjutnya bekerja sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar sebesar 25,22 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, penduduk laki-laki sebagian besar bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 35,25 persen dan sebagai tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar sebesar 32,97 persen. Sementara itu penduduk perempuan mayoritas bekerja sebagai tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan yakni sebesar 31,77 persen dan sebagai tenaga usaha penjualan sebesar 24,87 persen.

6.7 Setengah Pengangguran

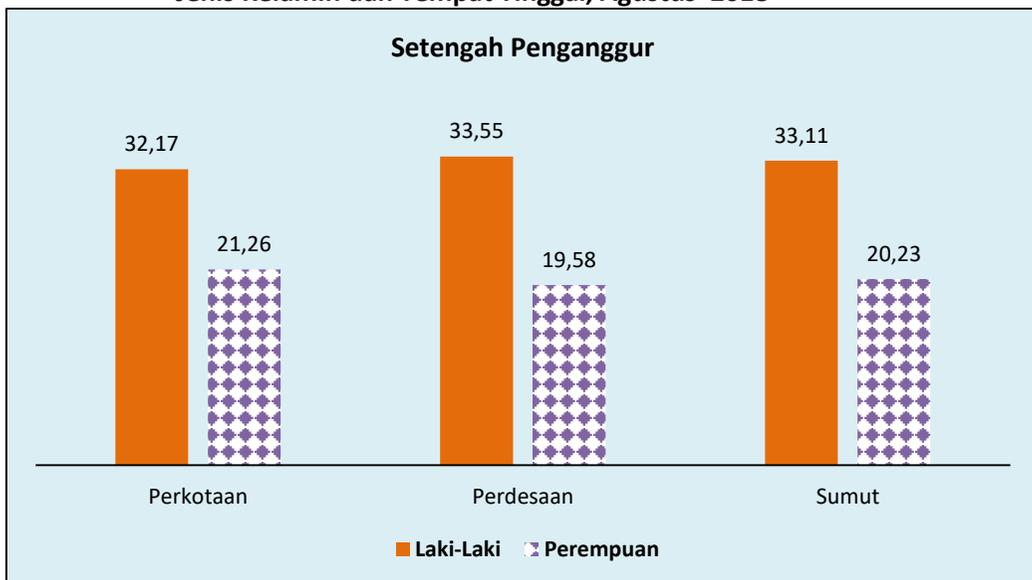
Kondisi ketenagakerjaan lain yang kadang dikesampingkan oleh pemerintah adalah masalah setengah pengangguran. Mereka yang disebut sebagai setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu, dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa). Sementara mereka yang termasuk ke dalam pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal yaitu kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

Gambar 6.7a Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pekerja Paruh Waktu, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, Agustus 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 6.7b Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pekerja Setengah Penganggur, Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal, Agustus 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dari gambar 6.7a terlihat bahwa penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas yang bekerja paruh waktu sebesar 79,77 persen dan laki-laki sebesar 66,89 persen. Baik di perkotaan maupun di perdesaan penduduk perempuan yang bekerja paruh waktu lebih banyak dari laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena perempuan masih harus membagi waktunya antara pekerjaan dengan tanggungjawabnya sebagai ibu rumah tangga. Akibatnya mereka hanya bisa bekerja paruh waktu meskipun pendapatan atau gaji yang diterima bisa saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

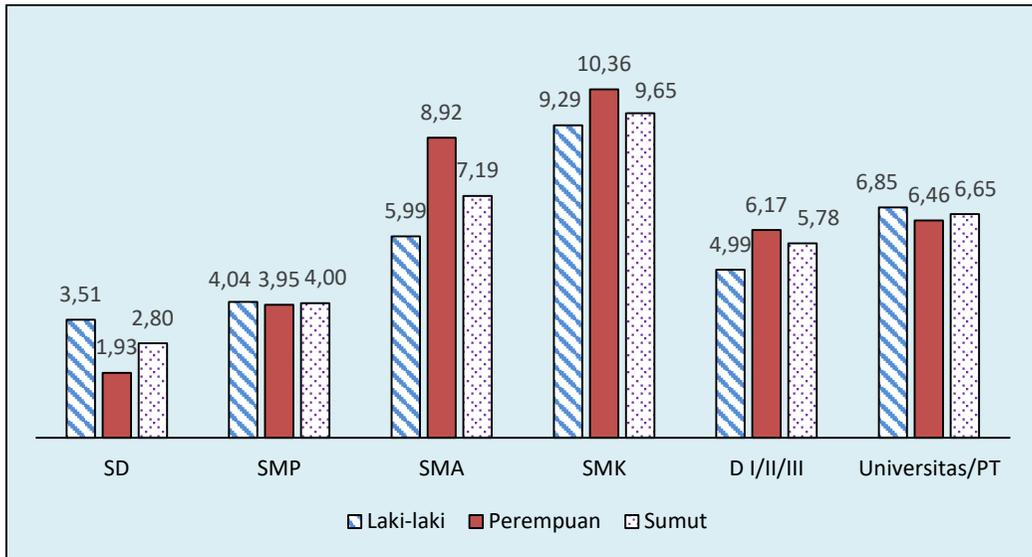
Sementara itu kondisi lain baik di perkotaan maupun perdesaan dimana masing-masing sebesar 21,26 persen dan 19,58 persen tenaga kerja perempuan yang jam kerja dibawah normal masih mencari pekerjaan ataupun menginginkan pekerjaan. Atau dengan kata lain masih ada setengah penganggur perempuan di Sumatera Utara yang harus menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena masih sedikitnya lapangan kerja yang mampu menerima tenaga kerja perempuan dengan jam kerja penuh. Dimana dimungkinkan dengan jam kerja yang masih dibawah normal mereka masih mencari pekerjaan ataupun menginginkan pekerjaan dikarenakan masih kurangnya pendapatan yang diterima.

6.8 Pengangguran Terdidik

Pengangguran akan terus menjadi masalah dan perhatian penting bagi pemerintah. Salah satunya adalah masalah pengangguran terdidik. Dimana masih sedikitnya kesempatan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Padahal seyogyanya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang mudah mendapatkan pekerjaan. Mutu pendidikan saat ini oleh beberapa kalangan masih dianggap rendah. Akibatnya banyak lulusan pendidikan menengah maupun tinggi belum siap/mampu memasuki dunia

kerja karena kompetensi yang mereka miliki belum sesuai dengan kualifikasi lapangan kerja sekarang ini.

Gambar 6.8 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Agustus 2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada gambar 6.8 terlihat bahwa jenjang pendidikan SMA ke atas persentase pengangguran cukup besar. Pengangguran tertinggi adalah tamatan SMK sebesar 9,65 persen diikuti dengan SMA sebesar 7,19 persen. Selanjutnya pengangguran yang merupakan tamatan universitas ada sebesar 6,65 persen. Jika dilihat dari jenis kelamin, persentase pengangguran tertinggi baik laki-laki maupun perempuan adalah penduduk dengan tamatan SMK.

Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Dimana pendidikan SMK diselenggarakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang siap masuk dalam pasar tenaga kerja maupun menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Tetapi pada kenyataannya justru penduduk dengan tamatan SMK paling banyak menganggur.



BAB 7

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

7

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

7.1 Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk Kepala Daerah di Kabupaten. Seorang Bupati sejajar dengan Walikota, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kota. Pada dasarnya, Bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Aparatur Sipil Negera (ASN).

Sebelum tahun 1945 gelar Bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda (bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda) istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah Bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan istilah "bupati" sendiri berasal dari bahasa Sansekerta.

Dalam prasasti Telaga Batu, yang ditemukan di kampung Telaga Batu dekat Kota Palembang yang berisi pemujaan terhadap Raja Sriwijaya, terdapat kata Bhupati. Prasasti tersebut diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-7 Masehi. Pakar prasasti Indonesia J. G. de Casparis menerjemahkan bhupati dengan istilah "kepala" atau *hoofd* dalam bahasa Belanda. Kata bhupati juga ditemukan dalam prasasti Ligor, yang ditemukan di provinsi Nakhon Si Thammarat di Muangthai. Pada abad ke-17, orang

Eropa menyebut daerah tersebut dengan nama "Ligor". Prasasti ini mengandung tanggal 775 Masehi. Istilah bhupati digunakan untuk menyebut Nama Raja Sriwijaya. Dalam bukunya *"Océanie ou cinquième partie du monde: revue géographique et ethnographique de la Malaisie, de la Micronésie, de la Polynésie et de la Mélanésie, ainsi que ses nouvelles classifications et divisions de ces contrées* ("Oceania atau bagian dunia yang kelima: majalah geografi dan etnografi tentang Malaisia, Mikronesia, Polynesia dan Melanesia, dan klasifikasi dan divisi baru untuk kawasan tersebut"), penjelajah asal Prancis Gérard Louis Dorney de Rienzi (1834) juga mencatat istilah "bupati". Jabatan bupati dalam arti modern berasal dari masa awal kerajaan Mataram, yakni pada masa Sultan Agung bertahta (1613-1645). Beliau menitip pengurusan daerah yang ditaklukkannya kepada orang yang dipercayainya. Saat itu nama pejabat tersebut adalah "adipati". Pada masa Hindia Belanda, para adipati disebut regent. Biasanya mereka dipilih dari kalangan saudagar atau priyayi.

Selanjutnya dalam konteks Otonomi Daerah di Indonesia, disebutkan bahwa tugas dan fungsi Bupati/Walikota adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Mengajukan rancangan Perda.
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah.
6. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari tugas yang harus diemban oleh seorang Bupati/Walikota, sebenarnya tugas tersebut sah-sah saja dilaksanakan oleh perempuan maupun laki-

laki. Namun kenyataannya berdasarkan data pada tabel 7.1 mengenai jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang ada di Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari 33 Bupati/Walikota pada tahun 2018 belum ada satupun Bupati atau Walikota perempuan. Semua Kepala Daerah Kabupaten/Walikota adalah laki-laki (100%). Sedangkan yang menduduki jabatan Wakil Bupati/Walikota hanya terdapat 1 perempuan (3.03%), yakni wakil Bupati Karo, selebihnya laki-laki (96.97%).

Seharusnya dengan adanya pemilihan langsung terhadap Kepala Daerah, maka perlu adanya dorongan dari Partai Politik dan masyarakat untuk mencalonkan perempuan yang berkualitas untuk menduduki jabatan Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Walikota. Sebagaimana perlu menjadi pertimbangan bahwa jika dilihat dari beberapa daerah yang dipimpin oleh perempuan ternyata tidak kalah bagus komitmennya dalam Pembangunan Daerah.

Tabel 7.1 Jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Bupati/Walikota		Wakil Bupati/Walikota	
		L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nias	1	0	1	0
2.	Mandailing Natal	1	0	1	0
3.	Tapanuli Selatan	1	0	1	0
4.	Tapanuli Tengah	1	0	1	0
5.	Tapanuli Utara	1	0	1	0
6.	Toba Samosir	1	0	1	0
7.	Labuhanbatu	1	0	1	0
8.	Asahan	1	0	1	0
9.	Simalungun	1	0	1	0
10.	Dairi	1	0	1	0
11.	Karo	1	0	0	1
12.	Deli Serdang	1	0	1	0
13.	Langkat	1	0	1	0
14.	Nias Selatan	1	0	1	0
15.	Humbang Hasundutan	1	0	1	0
16.	Pakpak Bharat	1	0	1	0
17.	Samosir	1	0	1	0
18.	Serdang Bedagai	1	0	1	0
19.	Batu Bara	1	0	1	0
20.	Padang Lawas Utara	1	0	1	0
21.	Padang Lawas	1	0	1	0
22.	Labuhanbatu Selatan	1	0	1	0
23.	Labuhanbatu Utara	1	0	1	0
24.	Nias Utara	1	0	1	0
25.	Nias Barat	1	0	1	0
26.	Sibolga	1	0	1	0
27.	Tanjungbalai	1	0	1	0
28.	Pematangsiantar	1	0	1	0
29.	Tebing Tinggi	1	0	1	0
30.	Medan	1	0	1	0
31.	Binjai	1	0	1	0
32.	Padangsidempuan	1	0	1	0
33.	Gunungsitoli	1	0	1	0
Jumlah		33	0	32	1

Sumber: Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara

7.2 Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin

Camat merupakan pemimpin sebuah kecamatan, dimana kecamatan sendiri merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten atau kota. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang kecamatan, Camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Sekretaris Daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keterwakilan perempuan di pemerintahan menjadi hal yang sering di perdebatkan di berbagai pertemuan, baik pertemuan yang bersifat formal maupun non formal. Beberapa daerah telah melibatkan perempuan dalam pengambil keputusan.

Tabel 7.2 memperlihatkan jumlah Camat menurut jenis kelamin yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018. Dari 450 Camat yang ada terdiri dari 414 Camat adalah laki-laki (92%) dan 36 Camat (8%) adalah perempuan. Dilihat dari persentase jumlah penduduk Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak perbedaan yakni 49,90% laki-laki dan 50,10% untuk perempuan, maka diharapkan keterwakilan perempuan untuk posisi Camat juga harus dipertimbangkan.

Tabel 7.2 Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Camat			Persentase	
		L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nias	10	0	10	100,00	0,00
2.	Mandailing Natal	22	1	23	95,65	4,35
3.	Tapanuli Selatan	15	0	15	100,00	0,00
4.	Tapanuli Tengah	17	3	20	85,00	15,00
5.	Tapanuli Utara	15	0	15	100,00	0,00
6.	Toba Samosir	14	2	16	87,50	12,50
7.	Labuhanbatu	9	0	9	100,00	0,00
8.	Asahan	25	0	25	100,00	0,00
9.	Simalungun	22	10	32	68,75	31,25
10.	Dairi	12	3	15	80,00	20,00
11.	Karo	14	3	17	82,35	17,65
12.	Deli Serdang	21	1	22	95,45	4,55
13.	Langkat	21	2	23	91,30	8,70
14.	Nias Selatan	34	1	35	97,14	2,86
15.	Humbang Hasundutan	9	1	10	90,00	10,00
16.	Pakpak Bharat	7	1	8	87,50	12,50
17.	Samosir	8	1	9	88,89	11,11
18.	Serdang Bedagai	16	1	17	94,12	5,88
19.	Batu Bara	12	0	12	100,00	0,00
20.	Padang Lawas Utara	12	0	12	100,00	0,00
21.	Padang Lawas	11	1	12	91,67	8,33
22.	Labuhanbatu Selatan	5	0	5	100,00	0,00
23.	Labuhanbatu Utara	8	0	8	100,00	0,00
24.	Nias Utara	11	0	11	100,00	0,00
25.	Nias Barat	7	1	8	87,50	12,50
26.	Sibolga	3	1	4	75,00	25,00
27.	Tanjungbalai	6	0	6	100,00	0,00
28.	Pematangsiantar	8	0	8	100,00	0,00
29.	Tebing Tinggi	4	1	5	80,00	20,00
30.	Medan	21	0	21	100,00	0,00
31.	Binjai	3	2	5	60,00	40,00
32.	Padangsidempuan	6	0	6	100,00	0,00
33.	Gunungsitoli	6	0	6	100,00	0,00
Jumlah		414	36	450	92,00	8,00

Sumber: Biro Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

7.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Setelah adanya reformasi pada tahun 1998, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah, kini diharapkan menjadi unsur aparatur negara yang profesional dan netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik (misalnya menggunakan fasilitas negara untuk golongan tertentu) serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas tersebut, Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Aparatur Sipil Negara memiliki hak memilih dalam Pemilu, sedangkan anggota TNI maupun Polri tidak memiliki hak memilih atau dipilih dalam Pemilu. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang terdiri atas:

1. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. PPPK, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dituntut memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. ASN juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Sehingga ASN perlu di tetapkan sebagai profesi yang memiliki kewajiban pengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen ASN dengan fungsi, tugas dan peran sebagai berikut:

1. Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksana kebijakan publik.
 - b. Pelayan publik.
 - c. Perikat dan pemersatu bangsa.
2. Tugas pegawai ASN:
 - a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
 - c. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI.
3. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Jumlah ASN menurut golongan, jenis kelamin yang bekerja di Kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3 Jumlah ASN Menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Pangkat ASN	Aparatur Sipil Negara			Persentase	
		L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1.	I/a	71	1	72	98,61	1.39
2.	I/b	246	41	287	85,71	14.29
3.	I/c	440	46	486	90,53	9.47
4.	I/d	520	46	566	91,87	8.13
5.	GOLONGAN I	1 277	134	1 411	90,50	9.50
6.	II/a	2 491	1 190	3 681	67,67	32.33
7.	II/b	3 169	1 654	4 823	65,71	34.29
8.	II/c	5 647	8 249	13 896	40,64	59.36
9.	II/d	3 837	4 538	8 375	45,81	54.19
10.	GOLONGAN II	15 144	15 631	30 775	49,21	50.79
11.	III/a	6 904	12 130	19 034	36,27	63.73
12.	III/b	9 503	17 829	27 332	34,77	65.23
13.	III/c	10 638	16 941	27 579	38,57	61.43
14.	III/d	11 213	19 383	30 596	36,65	63.35
15.	GOLONGAN III	38 258	66 283	104 541	36,60	63.40
16.	IV/a	11 261	23 318	34 579	32,57	67.43
17.	IV/b	6 417	12 420	18 837	34,07	65.93
18.	IV/c	831	244	1 075	77,30	22.70
19.	IV/d	65	61	126	51,59	48.41
20.	IV/e	14	12	26	53,85	46.15
21.	GOLONGAN IV	18 588	36 055	54 643	34,02	65.98
Jumlah		73 267	118 103	191 370	38,29	61,71

Sumber: Badan Kepegawaian Nasional Provinsi Sumatera Utara

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah ASN di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 191.370 orang yang terdiri dari 73.267 orang (38,29%) laki-laki dan 118.103 (61,71%) perempuan. Dilihat dari golongan ruang kepangkatan ASN yang ada di Sumatera Utara, ternyata laki-laki dan perempuan tersebar disemua golongan ruang dan kepangkatan. Pada golongan dan ruang terendah yaitu golongan I didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 1.277 orang (90,50%). Pada golongan II, mulai terjadi pemerataan antara jumlah ASN laki-laki dan perempuan. Dilihat pada golongan III, jumlah ASN mulai didominasi oleh perempuan yaitu 66.283 orang (63,40%). Lebih jauh lagi pada golongan tertinggi yaitu IV juga didominasi oleh perempuan, yaitu 36.055 orang (65,98%).

7.4 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (disingkat DPRD Kabupaten/Kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:

1. Membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

5. Memilih Wakil Bupati/Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan Gubernur.

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten/Kota dan 2 dua orang wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua. Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari

partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Kabupaten/Kota mempunyai beberapa hak, yakni:

1. Hak interpelasi yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak angket yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD Kabupaten/Kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati/Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Tabel 7.4 Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Anggota DPRD			Persentase	
		L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nias	25	0	25	100,00	0,00
2.	Mandailing Natal	36	3	39	92,31	7,69
3.	Tapanuli Selatan	27	3	30	90,00	10,00
4.	Tapanuli Tengah	33	2	35	94,29	5,71
5.	Tapanuli Utara	32	3	35	91,43	8,57
6.	Toba Samosir	28	2	30	93,33	6,67
7.	Labuhanbatu	31	14	45	68,89	31,11
8.	Asahan	38	7	45	84,44	15,56
9.	Simalungun	44	6	50	88,00	12,00
10.	Dairi	33	2	35	94,29	5,71
11.	Karo	28	7	35	80,00	20,00
12.	Deli Serdang	44	6	50	88,00	12,00
13.	Langkat	46	4	50	92,00	8,00
14.	Nias Selatan	30	5	35	85,71	14,29
15.	Humbang Hasundutan	24	1	25	96,00	4,00
16.	Pakpak Bharat	20	0	20	100,00	0,00
17.	Samosir	21	4	25	84,00	16,00
18.	Serdang Bedagai	37	8	45	82,22	17,78
19.	Batu Bara	29	5	34	85,29	14,71
20.	Padang Lawas Utara	28	2	30	93,33	6,67
21.	Padang Lawas	29	1	30	96,67	3,33
22.	Labuhanbatu Selatan	32	3	35	91,43	8,57
23.	Labuhanbatu Utara	33	1	34	97,06	2,94
24.	Nias Utara	23	2	25	92,00	8,00
25.	Nias Barat	17	3	20	85,00	15,00
26.	Sibolga	16	4	20	80,00	20,00
27.	Tanjungbalai	21	4	25	84,00	16,00
28.	Pematangsiantar	23	7	30	76,67	23,33
29.	Tebing Tinggi	23	2	25	92,00	8,00
30.	Medan	45	5	50	90,00	10,00
31.	Binjai	26	4	30	86,67	13,33
32.	Padangsidempuan	26	4	30	86,67	13,33
33.	Gunungsitoli	22	3	25	88,00	12,00
Jumlah		970	127	1097	88.42	11.58

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

Data pada tabel 7.4 adalah jumlah anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dilihat dari penyebaran anggota DPRD tersebut ternyata anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara masih didominasi oleh laki-laki (88%), sementara itu perempuan hanya 12%. Lebih lanjut lagi dilihat bahwa tidak semua Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara memiliki perwakilan perempuan di legislatifnya. Kabupaten Nias dan Pakpak Bharat tidak memiliki perwakilan perempuan. Dilihat dari tabel 7.4, Kabupaten Labuhanbatu memiliki keterwakilan legislatif perempuan sebesar 31%. Perlu perhatian yang besar terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Utara, khususnya partai-partai yang ada harus mempertimbangkan keterwakilan kader perempuan dalam kepengurusan dan kualitas kader perempuan. Dalam pemilihan legislatif ke depan perempuan Sumatera Utara harus menjadi pertimbangan untuk duduk di legislatif.

Padahal UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Kemudian, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Artinya pendidikan politik untuk perempuan harus dipertajam sehingga kedepan perempuan tidak hanya duduk di 30% sebagai calon legislatif. Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat diharapkan terutama untuk organisasi-organisasi perempuan untuk menghasilkan perempuan yang berkualitas untuk duduk sebagai perwakilan di legislatif yang mampu menyuarkan hak-hak perempuan dalam pembangunan.

7.5 Jumlah Jaksa Menurut Jabatan Jaksa dan Jenis Kelamin

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang." Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan (lihat Pasal 54 ayat [2] UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hubungan perdata merupakan hubungan antar-anggota masyarakat yang biasanya didasarkan pada perjanjian. Jaksa dapat berperan dalam perkara perdata apabila Negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya dan jaksa diberikan kuasa untuk mewakili. Jadi, peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sedangkan dalam perkara perdata, jaksa berperan sebagai kuasa dari Negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata.

Secara umum, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.

- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut juga menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Tabel 7.5 Jumlah Jaksa Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Struktural				Fungsional			
		Jumlah		Persentase		Jumlah		Persentase	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kejati Sumut	35	8	81.40	18.60	73	82	47.10	52.90
2.	Kejari Medan	13	1	92.86	7.14	12	22	35.29	64.71
3.	Kejari Binjai	5	1	83.33	16.67	4	7	36.36	63.64
4.	Kejari Deli Serdang	14	7	66.67	33.33	7	5	58.33	41.67
5.	Kejari P. Siantar	7	0	100.00	0.00	6	6	50.00	50.00
6.	Kejari Sibolga	7	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00
7.	Kejari P. Sidempuan	7	0	100.00	0.00	4	4	50.00	50.00
8.	Kejari S. Bedagai	10	1	90.91	9.09	8	5	61.54	38.46
9.	Kejari Tebing Tinggi	8	4	66.67	33.33	5	6	45.45	54.55
10.	Kejari Tanjungbalai	9	0	100.00	0.00	5	4	55.56	44.44
11.	Kejari Labuhanbatu	12	1	92.31	7.69	7	2	77.78	22.22
12.	Kejari Batu Bara	7	0	100.00	0.00	9	3	75.00	25.00
13.	Kejari Asahan	6	1	85.71	14.29	4	7	36.36	63.64
14.	Kejari Tapanuli Utara	8	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00
15.	Kejari Toba Samosir	8	0	100.00	0.00	1	2	33.33	66.67
16.	Kejari M. Natal	8	0	100.00	0.00	1	2	33.33	66.67
17.	Kejari Gunungsitoli	5	1	83.33	16.67	1	0	100.00	0.00
18.	Kejari Nias Selatan	8	0	100.00	0.00	2	1	66.67	33.33
19.	Kejari Karo	11	0	100.00	0.00	5	1	83.33	16.67
20.	Kejari Dairi	7	0	100.00	0.00	3	2	60.00	40.00
21.	Kejari Simalungun	6	3	66.67	33.33	12	10	54.55	45.45
22.	Kejari Belawan	6	2	75.00	25.00	9	11	45.00	55.00
23.	Kejari Langkat	11	1	91.67	8.33	11	9	55.00	45.00
24.	Kejari Samosir	6	0	100.00	0.00	1	1	50.00	50.00
25.	Kejari H. Hasundutan	6	1	85.71	14.29	2	0	100.00	0.00
26.	Kejari P. Lawas Utara	7	0	100.00	0.00	4	1	80.00	20.00
27.	Kejari Tap. Selatan	6	0	100.00	0.00	2	1	66.67	33.33
28.	Kejari L. Batu Selatan	6	2	75.00	25.00	2	0	100.00	0.00
29.	Kejari Padang Lawas	6	2	75.00	25.00	1	0	100.00	0.00
30.	Cabjari Labuhan Deli	2	1	66.67	33.33	5	7	41.67	58.33
31.	Cabjari Pancur Batu	2	1	66.67	33.33	1	6	14.29	85.71
32.	Cabjari P. Brandan	2	1	66.67	33.33	3	1	75.00	25.00
33.	Cabjari Tiga Binanga	0	1	0.00	100.00	1	0	100.00	0.00

Bersambung....

Sambungan

No.	Kabupaten/Kota	Struktural				Fungsional			
		Jumlah		Persentase		Jumlah		Persentase	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
34.	Cabjari Porsea	1	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00
35.	Cabjari Siborong	1	0	100.00	0.00	1	1	50.00	50.00
36.	Cabjari Kotanopan	1	0	100.00	0.00	1	1	50.00	50.00
37.	Cabjari Natal	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00
38.	Cabjari Pulau Tello	1	0	100.00	0.00	0	0		
Jumlah		266	40	86.93	13.07	220	210	51.16	48.84

Sumber: Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara

Dilihat dari tugas dan wewenang yang harus diemban oleh seorang jaksa, sebenarnya tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh perempuan maupun laki laki. Namun kenyataannya berdasarkan data pada tabel 7.5 mengenai jumlah Jaksa menurut jabatannya yang ada di Sumatera Utara menunjukkan bahwa dari 38 kantor kejaksaan yang ada di Sumatera Utara jumlah pegawai struktural masih didominasi laki-laki. Dominasi pejabat laki-laki pada jabatan struktural mencapai 87 %. Sedangkan untuk jabatan fungsional kombinasi laki-laki dan perempuan sudah seimbang yakni 51 % laki-laki dan 49 % perempuan.

7.6 Jumlah Hakim dan Pejabat Pengadilan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Pengadilan Tinggi merupakan pengawal terdepan (*Voorj post*) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tinggi mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal 51 menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
5. **Fungsi Lainnya:**
 - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.
4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infaq.
8. Shadaqah.
9. Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (istbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hokum masing-masing (Pasal 49 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).
5. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitiaisertanya lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Tabel 7.6 Jumlah Hakim Dan Pejabat Pengadilan Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Pangkat ASN	Aparatur Sipil Negara			Persentase	
		L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A Pengadilan Tinggi						
1.	Jumlah Hakim	20	2	22	90,91	9.09
2.	Pejabat Struktural	8	5	13	61,54	38.46
3.	Pejabat Fungsional	26	10	36	72,22	27.78
B Pengadilan Tinggi Agama						
4.	Jumlah Hakim	19	3	22	86,36	13.64
5.	Pejabat Struktural	8	1	9	88,89	11.11
6.	Pejabat Fungsional	8	7	15	53,33	46.67
Jumlah		89	28	117	76.07	23,93

Sumber: Kantor Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data pada tabel 7.6, terlihat bahwa jumlah hakim di tingkat pengadilan tinggi masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini terjadi baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi Agama. Hal yang senada juga terjadi pada Jabatan Struktural dan Fungsional. Kedua jabatan tersebut juga masih didominasi oleh kaum Adam. Padahal apabila kita lihat kembali, tugas dan fungsi pengadilan tinggi (sepaimana telah diuraikan di atas), tidak ada tugas dan fungsi yang bersifat bias gender artinya tugas tersebut hanya dapat dikejakan kaum laki-laki saja.

7.7 Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Lembaga Peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, Hakim saat ini juga mendapat sorotan relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis Hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon *good goverment* dan *good governance* yang selama ini digembar-gemborkan oleh banyak pihak tidak dapat terealisasi, hanya sebatas “mimpi” semata.

Secara normatif menurut pasal 1 ayat 5 UU komisi yudisial nomor 22 tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara RI. Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang tidak bersalah dan membenarkan orang yang benar dan didalam menjalankan tugasnya ia tidak hanya bertanggung-jawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, dan menjadi tumpuan harapan mencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pada tabel 7.7 tertera Jumlah Hakim (ketua dan wakil ketua) berdasarkan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 20 Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Utara. Dilihat dari sebaran jumlah hakim berdasarkan jenis kelamin, maka hakim yang ada di Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Utara masih didominasi oleh hakim laki-laki (baik pada posisi ketua dan wakil ketua). Keberadaan ketua hakim yang tersebar di 20 Pengadilan Negeri hanya menempatkan 3 (tiga) hakim ketua perempuan yakni: Hakim Ketua yang bertugas di PN Kota Pematangsiantar, PN Kota Gunungsitoli dan Hakim Ketua yang bertugas di PN Tanjungbalai. Hal ini mestinya

menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya pada bidang yudikatif untuk mempertimbangkan hakim-hakim perempuan menempati posisi strategis dalam peradilan.

Tabel 7.7 Jumlah Hakim Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Jabatan Hakim						Persentase	
		Ketua		Wakil Ketua		Anggota		L	P
		L	P	L	P	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	PT. Medan	1	0	1	0	25	1	96.43	3.57
2.	PN Medan	1	0	1	0	44	6	88.46	11.54
3.	PN Lubuk Pakam	1	0	1	0	9	12	47.83	52.17
4.	PN Binjai	1	0	1	0	2	5	44.44	55.56
5.	PN Pematangsiantar	0	1	1	0	3	3	50.00	50.00
6.	PN Simalungun	1	0	1	0	3	4	55.56	44.44
7.	PN Kaban Jahe	1	0	0	1	1	4	28.57	71.43
8.	PN Padangsidempuan	1	0	1	0	3	1	83.33	16.67
9.	PN Gunungsitoli	0	1	1	0	5	0	85.71	14.29
10.	PN Kisaran	1	0	0	1	4	1	71.43	28.57
11.	PN Rantau Prapat	1	0	1	0	8	0	100.00	0.00
12.	PN Stabat	1	0	1	0	6	3	72.73	27.27
13.	PN Tebing Tinggi	1	0	1	0	4	5	54.55	45.45
14.	PN Tarutung	1	0	1	0	3	0	100.00	0.00
15.	PN Balige	1	0	1	0	3	0	100.00	0.00
16.	PN Sidikalang	1	0	0	1	0	2	25.00	75.00
17.	PN Tanjungbalai	0	1	1	0	2	2	50.00	50.00
18.	PN Sibolga	1	0	1	0	2	1	80.00	20.00
19.	PN Mandailing Natal	1	0	1	0	2	0	100.00	0.00
20.	PN Sei Rampah	1	0	1	0	2	1	80.00	20.00
21.	PN Sibuhuan	1	0	0	1	1	0	66.67	33.33
Jumlah		18	3	17	4	132	51	74.22	25.78

Sumber: Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Utara

7.8 Jumlah Polisi Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut

dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Selanjutnya bahwa susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, selanjutnya Kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-Undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-Undang itu juga telah memberikan Kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
6. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyidik dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak azasi manusia.

Tabel 7.8 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Pangkat	Personel Polisi			Persentase	
		L	P	Jumlah	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	IRJEN	1	0	1	100,00	0,00
2.	BRIGJEN	1	0	1	100,00	0,00
3.	KOMBES	24	1	25	96,00	4,00
4.	AKBP	153	21	174	87,93	12,07
5.	KOMPOL	383	45	428	89,49	10,51
6.	AKP	517	50	567	91,18	8,82
7.	IPTU/IPDA	1 657	85	1 742	95,12	4,88
8.	BRIGADIR	16 071	830	16 901	95,09	4,91
Jumlah		18 807	1 032	19 839	94,80	5,20

Sumber: Polisi Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan Tabel Jumlah Polisi menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa personel polisi masih didominasi oleh laki-laki yaitu 94,80 %. Keberadaan perempuan di bidang kepolisian masih sangat rendah. Seolah-olah dunia polisi adalah dunianya laki-laki. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari persentasi jumlah penduduk Sumatera Utara, berbanding jumlah laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak perbedaan yakni 49,90% laki-laki dan 50,10% untuk perempuan. Maka kedepan, keberadaan Polisi Wanita (Polwan), diharapkan dapat mewakili porsi penduduk perempuan di Sumatera Utara.



BAB 8

HUKUM



HUKUM

8.1 Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara

Penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak memandang jenis kelamin. Di mata hukum, perempuan yang melakukan suatu tindak pidana akan menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan seperti laki-laki. Namun, perlakuan dan pembekalan kepada narapidana/tahanan perempuan tentunya akan berbeda dengan laki-laki. Perempuan akan diajarkan kembali tentang ketrampilan, kerohanian, dan kemandirian agar mampu dan siap kembali dalam masyarakat ketika sudah selesai menjalani masa tahanannya. Negara telah mengatur penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tabel 8.1 menyajikan jumlah narapidana dan tahanan/titipan menurut jenis kelamin dan bulan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa total narapidana dan tahanan/titipan terus mengalami peningkatan setiap bulannya. Jumlah narapidana dan tahanan laki-laki konsisten menunjukkan jumlah yang selalu lebih tinggi daripada perempuan di sepanjang tahun 2018. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada jumlah narapidana masih lebih banyak daripada tahanan/titipan.

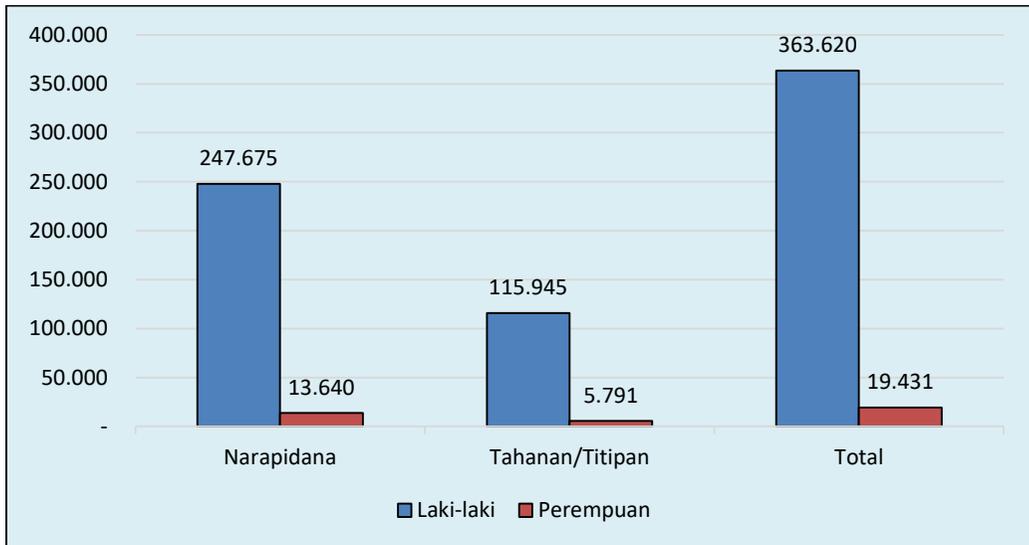
Tabel 8.1 Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/ Kota	Narapidana		Tahanan/Titipan		Total	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari	18 689	999	9 831	523	28 520	1 522
Februari	18 956	1 051	9 864	497	28 820	1 548
Maret	19 799	1 086	9 509	478	29 308	1 564
April	20 194	1 114	9 474	475	29 668	1 589
Mei	20 665	1 124	9 534	484	30 199	1 608
Juni	20 664	1 125	9 501	469	30 165	1 594
Juli	21 192	1 153	9 131	475	30 323	1 628
Agustus	21 285	1 195	9 276	445	30 561	1 640
September	21 175	1 187	9 696	452	30 871	1 639
Oktober	21 645	1 210	9 885	488	31 530	1 698
November	21 762	1 220	10 019	493	31 781	1 713
Desember	21 649	1 176	10 225	512	31 874	1 688

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2019

Gambar 8.1 menyajikan jumlah narapidana dan tahanan/titipan menurut jenis kelamin di Provinsi Sumatera Utara. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa baik narapidana dan tahanan/titipan didominasi oleh laki-laki, yaitu sekitar 19 kali lebih besar daripada perempuan. Jumlah narapidana dan tahanan mencapai 363.620 orang. Data tersebut juga menunjukkan bahwa pada jumlah narapidana masih lebih banyak daripada tahanan/titipan.

Gambar 8.1 Jumlah Narapidana, Tahanan/Titipan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara, 2018



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2019

Dalam lembaga pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana akan menghadapi sejumlah permasalahan yang berpengaruh terhadap psikologis mereka. Kehidupan yang dijalani seorang narapidana selama berada di penjara, membuat dirinya menghadapi berbagai masalah antara lain kehilangan keluarga, kehilangan kontrol diri, kehilangan model, dan kehilangan dukungan. Narapidana juga akan mengalami kehidupan yang lain dengan kehidupan yang sebelumnya dijalani antara lain rentan kehilangan hubungan dengan lawan jenis, kehilangan hak untuk menentukan segala sesuatunya sendiri, kehilangan hak memiliki barang, kehilangan hak mendapat pelayanan dan kehilangan rasa aman.



BAB 9

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK

9

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

9.1 Upaya Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Berbagai program dan kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak terus digalakkan di seluruh negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) secara khusus mengikutsertakan aspek mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai target penting yang harus dicapai. Hal ini tertuang pada Tujuan 5 dari SDGs yang berbunyi “Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak-anak perempuan” dan Tujuan 16 yang berbunyi “Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif untuk semua tingkatan”.

Secara spesifik perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari tindak kekerasan secara dinyatakan pada Target 5.2 “Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan dan seksual dan jenis-jenis eksploitasi” dan Target 5.3 “Hilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa pada anak, dan mutilasi alat kelamin perempuan”. Sementara itu, Target 16.1 juga secara eksplisit menyebutkan adanya penurunan yang signifikan pada semua bentuk kekerasan dimanapun, bahkan pada Target 16.2 secara spesifik disebutkan untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dalam segala bentuknya.

Kekerasan terhadap perempuan juga telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Upaya perlindungan perempuan dan anak juga tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014 yang dilanjutkan dengan RPJMN 2015-2019, yaitu melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan serta diperkuat dengan Program Nawacita yang disampaikan oleh Presiden Indonesia, yaitu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal. Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan juga telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Upaya untuk menghapus diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, tapi juga perlu melibatkan masyarakat, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur pemerintah dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintahan daerah termasuk lembaga masyarakat dan swasta, serta mengacu pada koridor pembagian kewenangan antara pusat dan daerah.

Tindak lanjut dari upaya mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan perbup/perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti *Women Crisis Center* (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Tantangan utama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia adalah ketersediaan data dan informasi yang komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbatas. Untuk itu, Pemerintah

Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara *up to date*, *real time* dan akurat, untuk menuju Satu Data, Data Kekerasan Nasional. Informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disajikan dalam publikasi ini berasal dari data pelaporan (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

9.2 Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

9.2.1 Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan. Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang berakibat, atau kemungkinan

berakibat pada penderitaan fisik, seksual atau psikologis perempuan, termasuk ancaman tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi". Definisi tersebut mencakup semua bentuk kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik.

Secara umum, definisi kekerasan yang dirumuskan dalam deklarasi PBB mencakup antara lain:

- **Kekerasan Yang Terjadi Dalam Keluarga**

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, dan diwujudkan melalui:

1. Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan.
2. Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain.
3. Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus.
4. Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan, dll.

- Kekerasan Yang Terjadi Di Masyarakat Umum

Kekerasan yang terjadi di masyarakat umum mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan intimidasi di tempat kerja, institusi pendidikan dan tempat lain, serta perdagangan wanita dan pelacuran paksa.

- Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Negara

Kekerasan yang dilakukan oleh Negara dapat berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis secara institusi/kelembagaan, dimanapun itu terjadi.

9.2.2 Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Definisi kekerasan terhadap anak menurut WHO (2012) mencakup semua bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Berdasarkan definisi tersebut, kekerasan anak dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan emosional atau psikis.

Kekerasan fisik terhadap anak merupakan kekerasan yang kemungkinan besar terjadi. Termasuk dalam kekerasan fisik adalah ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan/tindakan anak. Kekerasan fisik dapat berupa mendorong, menarik rambut, menendang, menggigit, menonjok, membakar, melukai dengan benda, dan jenis kekerasan fisik lain termasuk membunuh. Kekerasan terhadap anak juga dapat dipandang dari sisi perlindungan anak. UNICEF (2014) mendefinisikan 'perlindungan anak' sebagai cara yang terukur untuk mencegah dan memerangi kekerasan, eksploitasi, memperlakukan tidak semestinya terhadap anak termasuk eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, perdagangan anak, pekerja anak dan tradisi yang membahayakan anak seperti sunat perempuan dan perkawinan anak. Dalam

konteks tersebut jelas bahwa kekerasan anak tercermin dalam berbagai aspek terkait perlindungan anak sesuai dengan definisi dari UNICEF.

Jenis kekerasan terhadap anak berikutnya adalah kekerasan seksual dan psikis. Kekerasan seksual terhadap anak mencakup beberapa hal seperti menyentuh anak yang bermodus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi dan eksploitasi seksual, dan lain-lain.

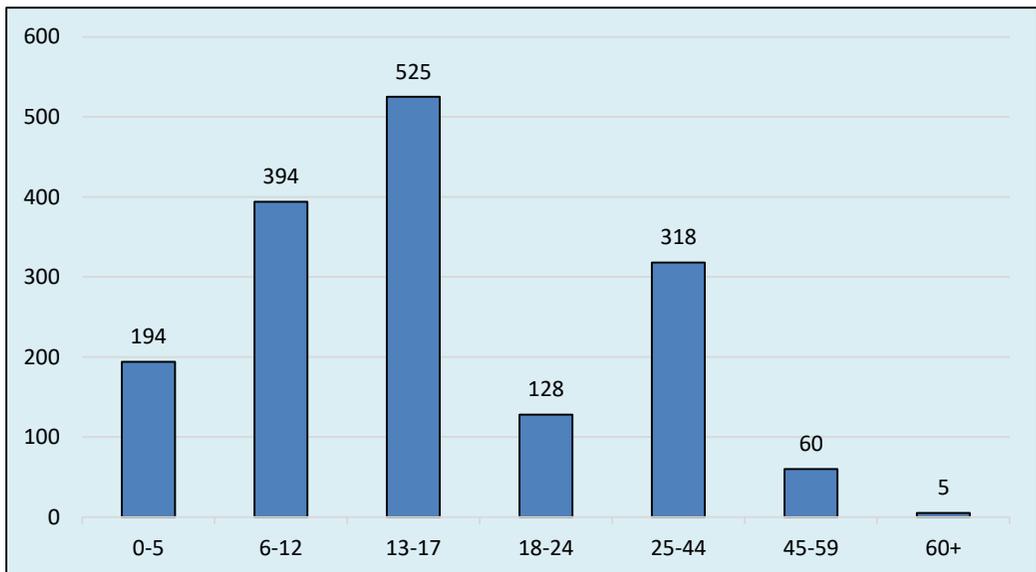
Selanjutnya kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menakut-nakuti seorang anak termasuk mengisolasi dari keluarga dan teman. Kekerasan yang juga sangat dekat dengan kekerasan psikis adalah kekerasan emosional melalui perkataan atau perbuatan yang membuat anak merasa bodoh atau tak berharga. Kekerasan emosional mencakup antara lain mengkritik terus menerus, menyalahkan semua masalah keluarga kepada anak, memalukan anak di depan orang lain, intimidasi, dan lain-lain.

Beberapa teori tentang penyebab tindak kekerasan terhadap perempuan diambil dari literatur tentang agresi dan kekerasan umum. Baik penelitian tentang kekerasan umum maupun kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa kekerasan timbul dari interaksi antara faktor sosial dan psikososial individu dan proses sosial (misalnya Reiss dan Roth, 1993). Tetapi yang jelas bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan bisa sangat kompleks. Hosking (2005) menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.

9.3 Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di suatu wilayah digunakan data dari sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Data yang disajikan pada publikasi ini adalah data-data tentang kekerasan yang terjadi pada Januari 2018 sampai Desember 2018. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan tidaklah mudah. Data yang tersedia sering kali masih *underestimate* karena kemungkinan besar banyak kasus yang sulit terungkap dan tidak dilaporkan. Meskipun demikian, bukan berarti data hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan tidak bermanfaat. Hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan jumlah kasus kekerasan dari waktu ke waktu.

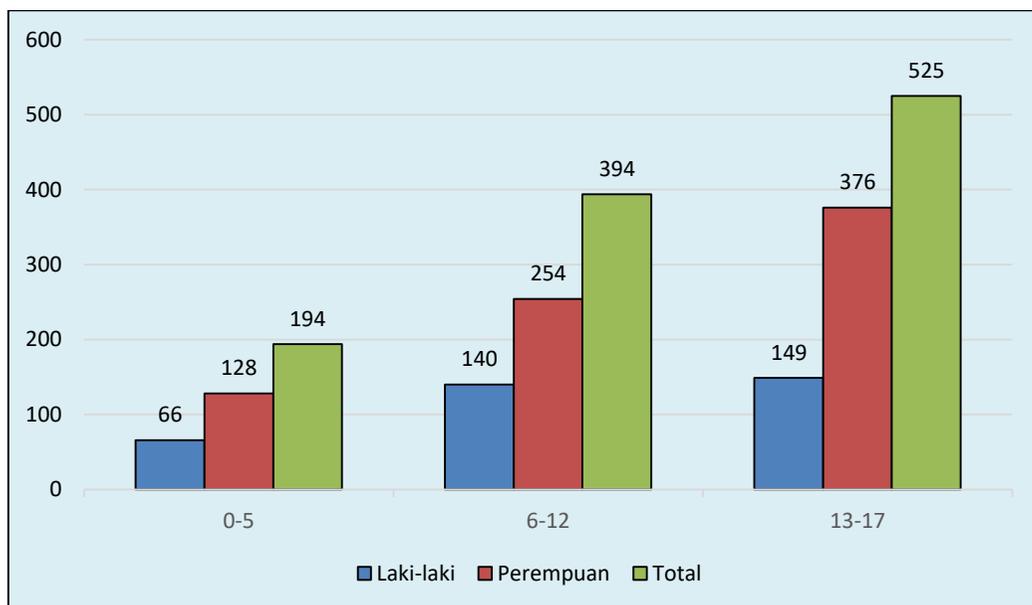
Gambar 9.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.1 menyajikan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menurut kelompok umur di Provinsi Sumatera Utara. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi pada semua kelompok umur, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi mencapai 1624 kasus kekerasan. Korban tertinggi terdapat pada kelompok umur 13-17 tahun, yaitu 525 korban dan kelompok umur 6-12 tahun, yaitu 394 korban. Data tersebut menunjukkan bahwa pada kelompok umur anak-anak lebih dominan menjadi korban kekerasan.

Gambar 9.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

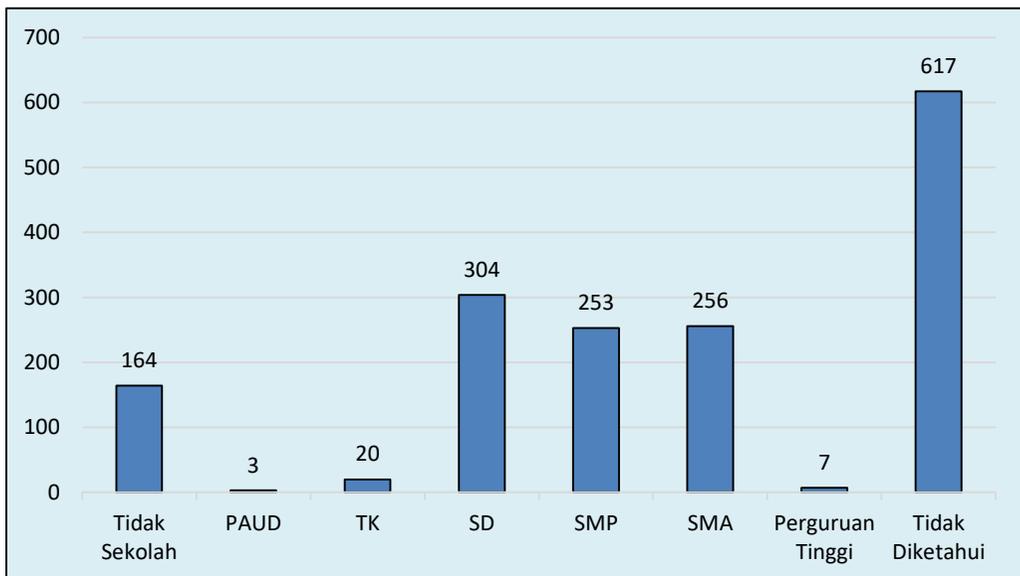


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Selanjutnya jika dilihat menurut jenis kelamin, kasus kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan di semua kelompok umur. Jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan pada kelompok umur 0-5 tahun dan 6-12

tahun mencapai lebih dari 2 kali lipat dari jumlah kasus yang menimpa anak laki-laki, bahkan untuk kelompok umur 13-17 tahun, jumlah kasus yang terjadi pada anak perempuan hampir mencapai 3 kali lipat dari jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak laki-laki. Meskipun kekerasan terhadap anak lebih banyak terjadi pada anak perempuan, tetapi kekerasan terhadap anak laki-laki juga dapat menimbulkan dampak psikologis dalam perkembangannya yang mungkin berdampak pada perilaku yang buruk atau bahkan rentan untuk melakukan tindak kekerasan ketika dewasa.

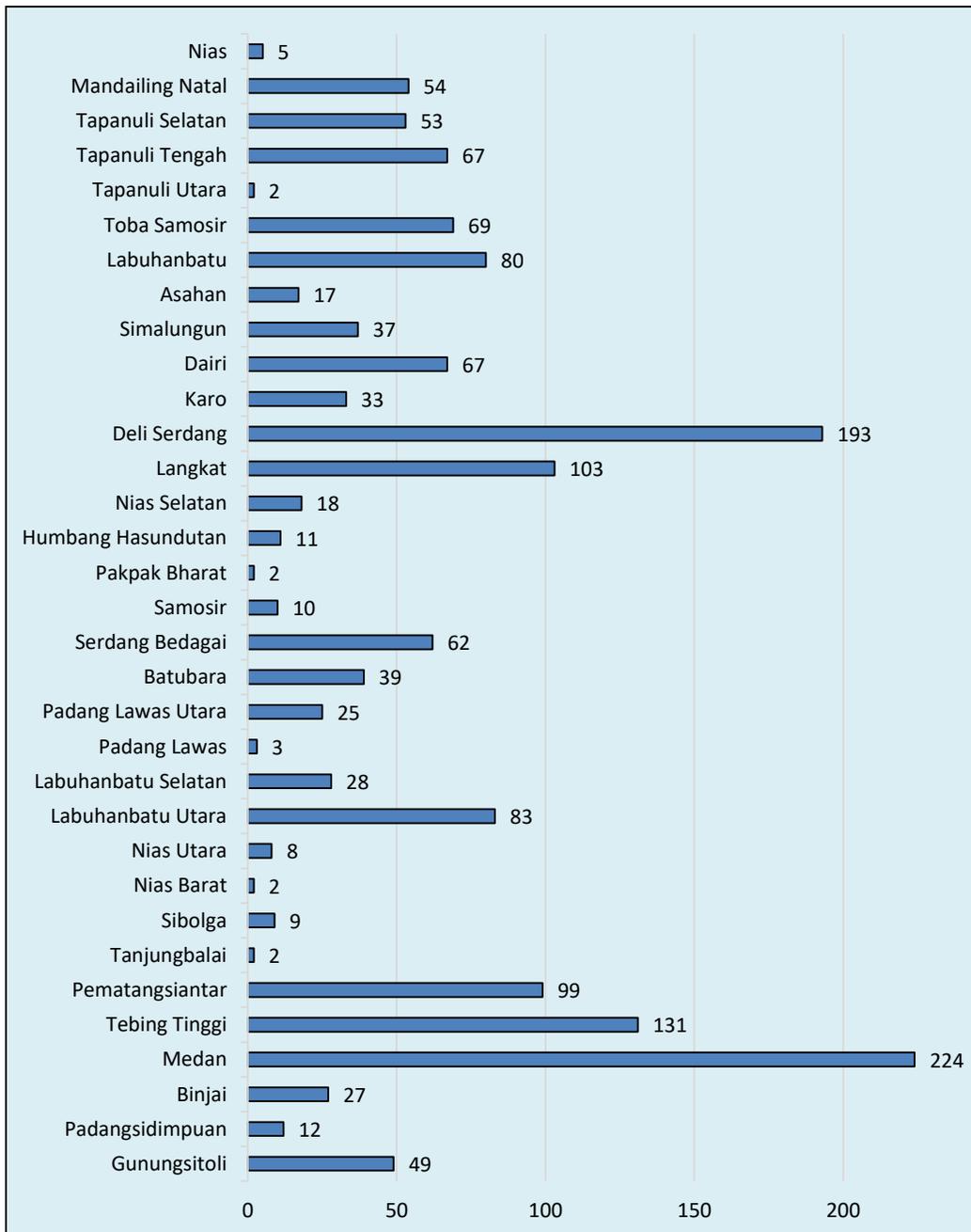
Gambar 9.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.3 menyajikan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menurut tingkat pendidikan di Provinsi Sumatera Utara. Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya terjadi pada mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA yang mencapai 813 kasus kekerasan.

Gambar 9.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

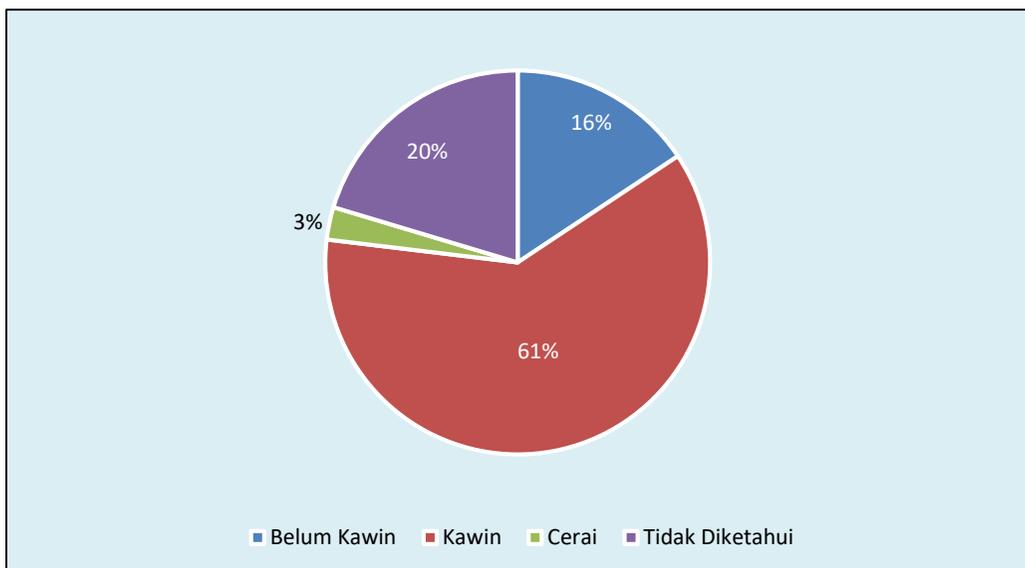


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, gambar 9.4 menunjukkan bahwa di seluruh kabupaten/kota terdapat korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Langkat menjadi wilayah dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Sumatera Utara yang mencapai lebih dari 100 korban (lampiran Tabel L-9.1).

Berdasarkan karakteristik korban yaitu status perkawinan, dapat dilihat bahwa sebagian besar dari korban kekerasan terjadi pada perempuan berumur 18 tahun ke atas yang berstatus kawin, yaitu 313 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan berstatus kawin cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, baik dari pasangan maupun bukan pasangan. Dengan diketahuinya karakteristik dari korban kekerasan ini, diharapkan pihak-pihak yang terkait dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

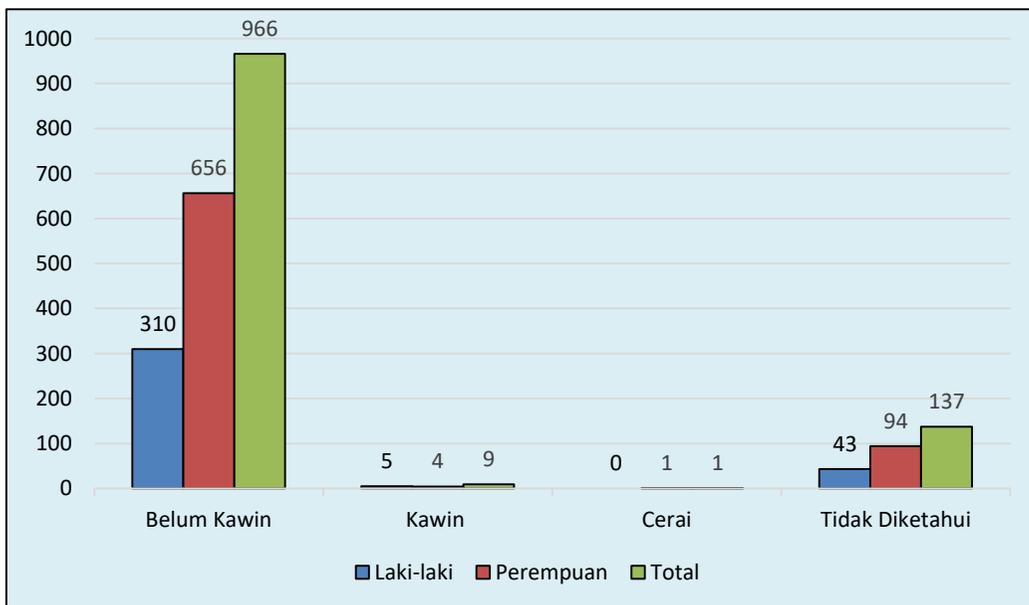
Gambar 9.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.6 menyajikan jumlah korban kekerasan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menurut status perkawinan di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan berstatus belum kawin. Meskipun demikian, diantara korban kekerasan anak ini, terdapat 9 kasus kekerasan yang terjadi pada korban berstatus kawin dan masih terdapat 137 kasus yang tidak diketahui status perkawinannya. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa perkawinan dini juga memberikan risiko terjadinya kekerasan pada anak. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut tingkat pendidikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel L-10.3.

Gambar 9.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



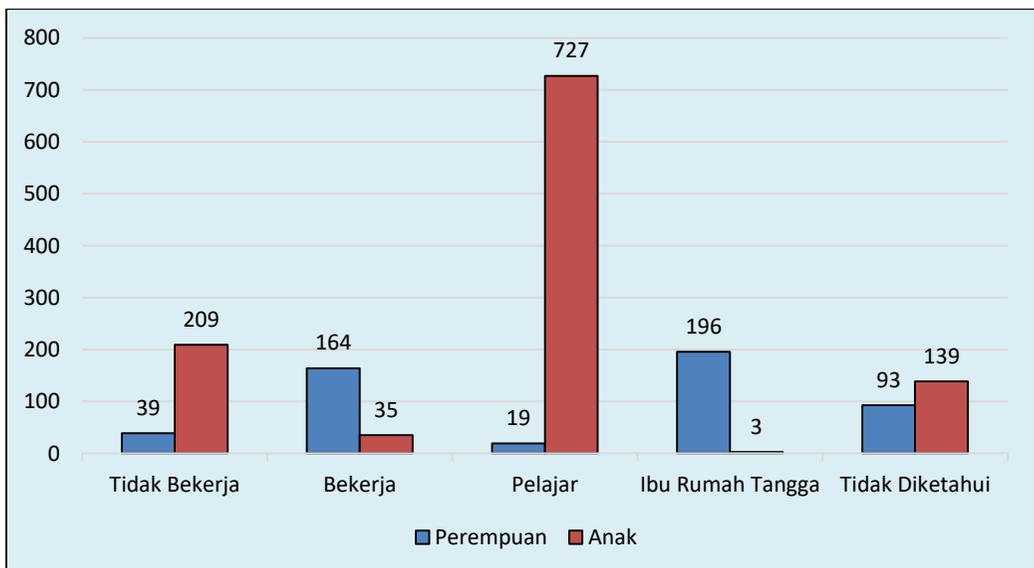
Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Karakteristik korban kekerasan selanjutnya adalah berdasarkan status kegiatan utama dari perempuan. Pada gambar 9.7, status kegiatan utama dibagi menjadi beberapa kategori yaitu tidak bekerja, bekerja, pelajar, ibu rumah tangga, dan tidak

diketahui. Perempuan berumur 18 tahun ke atas yang berstatus ibu rumah tangga menjadi kelompok yang mengalami kekerasan terbesar yaitu sebanyak 196 kasus. Selanjutnya, perempuan yang bekerja mengalami kekerasan sebanyak 164 kasus.

Untuk korban kekerasan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan di Provinsi Sumatera Utara, sebagian besar anak yang menjadi korban kekerasan memiliki status pelajar yaitu sebanyak 727 kasus. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah pelajar perempuan yang mengalami kekerasan (229 kasus) mencapai lebih dari 2 kali lipat dari jumlah kasus yang menimpa pelajar laki-laki (498 kasus). Meskipun demikian, diantara korban kekerasan anak ini, terdapat 35 kasus kekerasan yang terjadi pada korban berstatus bekerja, 3 kasus pada anak dengan status ibu rumah tangga, dan 139 kasus yang tidak diketahui status pekerjaannya. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa pekerja anak juga memberikan risiko terjadinya kekerasan pada anak.

Gambar 9.7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Kegiatan Utama di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

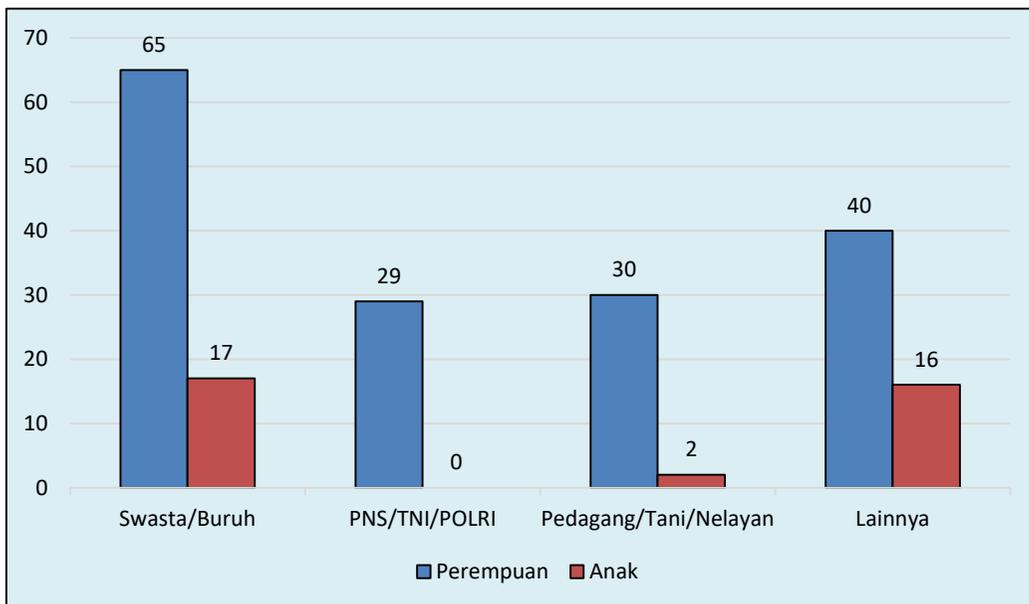


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan menjadi wilayah dengan korban kekerasan terhadap pelajar anak tertinggi di Sumatera Utara yaitu 110 korban, sedangkan di Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kota Tanjung Balai tidak terjadi kasus kekerasan terhadap pelajar anak (lampiran Tabel L-9.4).

Dari gambar 9.8, jumlah korban kekerasan terbesar berada pada jenis pekerjaan swasta/buruh, baik untuk perempuan (65 kasus) maupun anak (17 kasus) yang bekerja. Selanjutnya, perempuan berumur 18 tahun ke atas yang bekerja sebagai PNS/TNI/Polri adalah yang paling sedikit mengalami kekerasan. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja menurut status pekerjaan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada lampiran Tabel L-9.4.1.

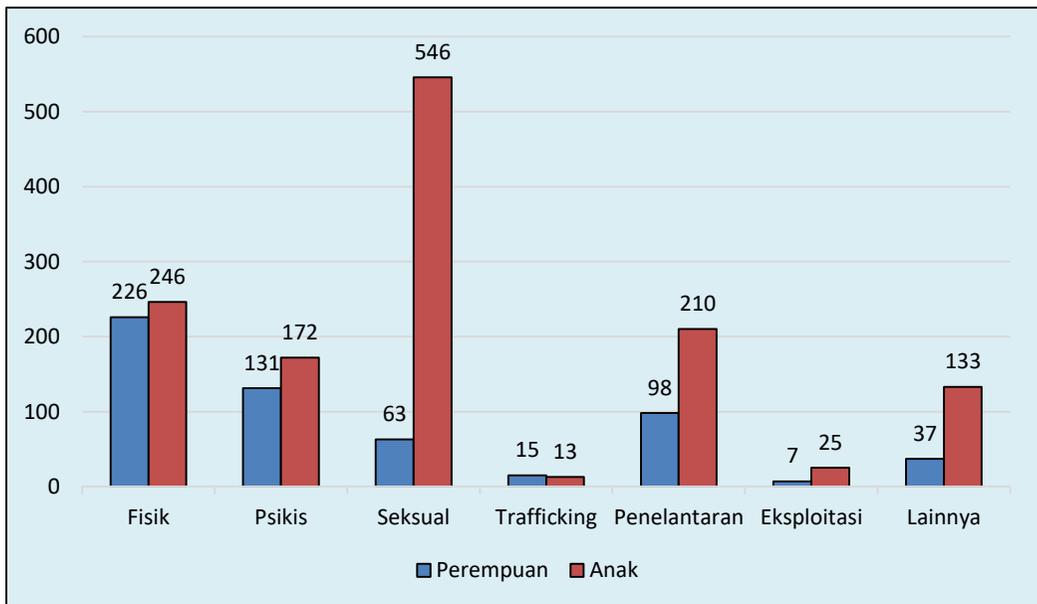
Gambar 9.8 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.9 menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dibagi berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi dan lainnya. Seseorang dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Gambar tersebut menunjukkan kasus kekerasan terbanyak yang dialami perempuan berumur 18 tahun ke atas adalah kekerasan fisik (226 kasus), diikuti oleh kekerasan psikis (131 kasus) dan penelantaran (98 kasus). Bila dilihat berdasarkan wilayah, korban perempuan yang mengalami kekerasan fisik terbanyak terjadi di Kabupaten Deli Serdang (41 kasus), untuk korban kekerasan psikis terbanyak terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah (30 kasus), dan untuk korban kekerasan seksual terbanyak terjadi di Kota Pematang Siantar (14 kasus).

Gambar 9.9 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

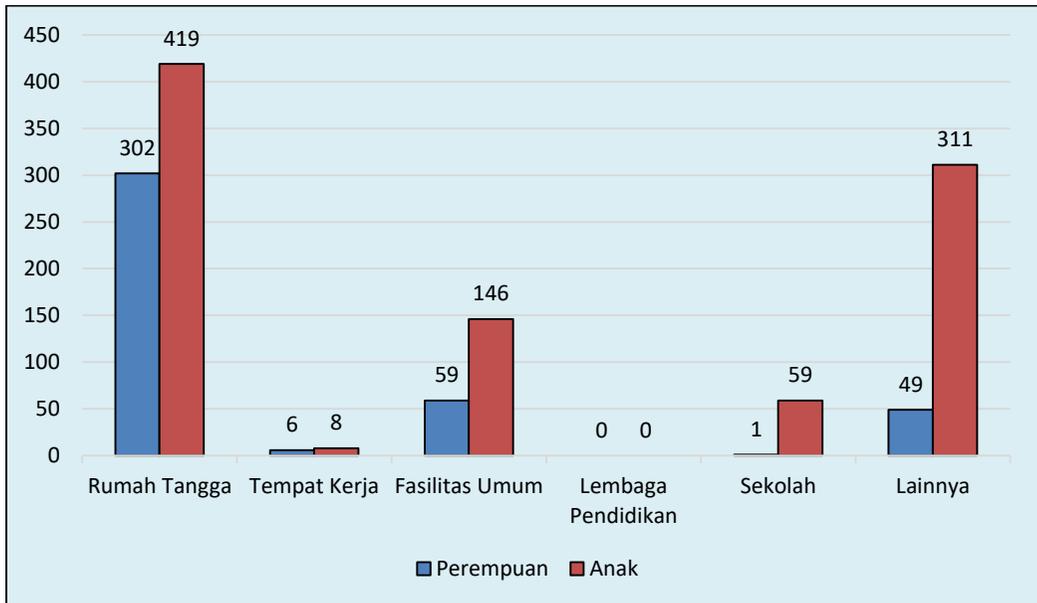


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.9 juga menunjukkan kasus kekerasan terbanyak yang dialami anak adalah kekerasan seksual (546 kasus), diikuti oleh kekerasan fisik (246 kasus) dan penelantaran (210 kasus). Korban kekerasan seksual anak didominasi oleh anak perempuan (483 kasus) sedangkan korban kekerasan fisik dan penelantaran didominasi oleh anak laki-laki, secara berturut-turut sebesar 125 kasus dan 108 kasus (Lampiran Tabel 10.5). Bila dilihat berdasarkan wilayah, korban anak yang mengalami kekerasan terbanyak terjadi di Kota Medan yaitu sebanyak 253 kasus, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang sebanyak 138 kasus, dan Kota Tebing Tinggi sebanyak 115 kasus.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak bisa terjadi dimana saja. Seseorang dapat mengalami kekerasan di lebih dari satu tempat. Gambar 9.10 menunjukkan tentang jumlah korban kekerasan terhadap perempuan berumur 18 tahun ke atas dan anak menurut tempat kejadian kekerasan. Tempat kejadian kekerasan meliputi rumah tangga, tempat kerja, fasilitas umum, lembaga pendidikan, sekolah, dan lainnya. Jika dilihat dari tempat kejadian kekerasan, baik pada perempuan maupun anak sebagian besar terjadi di rumah tangga, yaitu secara berturut-turut sebanyak 302 kasus dan 419 kasus. Fasilitas umum dan sekolah juga menjadi tempat yang cukup rentan untuk terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bila dilihat berdasarkan wilayah, korban yang mengalami kekerasan di rumah tangga dan sekolah terbanyak terjadi di Kota Medan, yaitu secara berturut-turut sebanyak 134 kasus dan 11 kasus, sedangkan untuk korban kekerasan di fasilitas umum terbanyak terjadi di Kota Pematang Siantar (44 kasus) (lampiran Tabel L-9.6).

Gambar 9.10 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian Kekerasan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



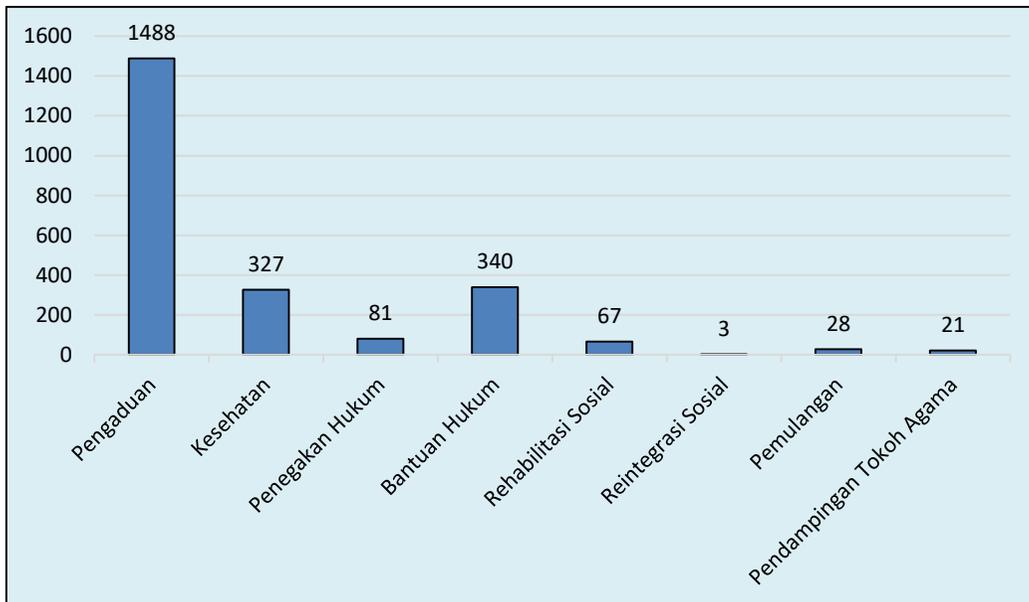
Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial telah menyusun sebuah Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, disahkan oleh Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 tahun 2010. Pelayanan yang diberikan pada korban kekerasan antara lain berupa Penanganan Pengaduan, Pelayanan Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pemulangan, Reintegrasi Sosial, dan Pendampingan Tokoh Agama.

Gambar 9.11 menunjukkan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut jenis layanan yang diberikan. Seseorang dapat menerima lebih dari satu jenis pelayanan. Dari sejumlah layanan yang diberikan, layanan pengaduan adalah jenis layanan terbanyak yang diberikan yaitu sebanyak 1.488 layanan, diikuti oleh bantuan hukum (340 layanan), dan kesehatan (327 layanan). Bila dilihat berdasarkan

wilayah, Kota Medan menjadi wilayah yang memberikan layanan terbanyak yaitu sebanyak 375 layanan, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang (328 layanan), Kota Tebing Tinggi (211 layanan), dan Kabupaten Langkat (206 layanan).

Gambar 9.11 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

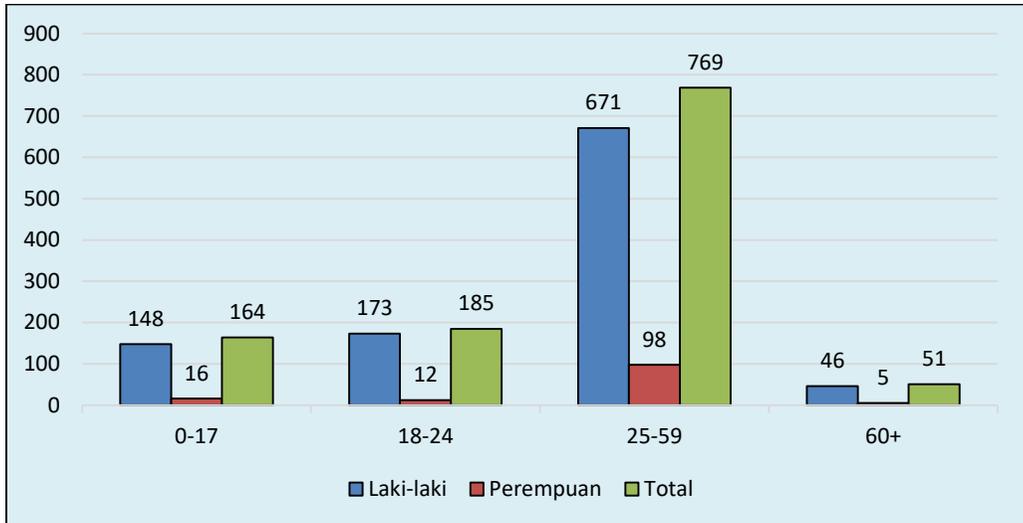


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

9.4 Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Untuk para pelaku kekerasan, pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga menerapkan bentuk pencegahan dengan menetapkan Undang-Undang No 17 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Gambar 9.12 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

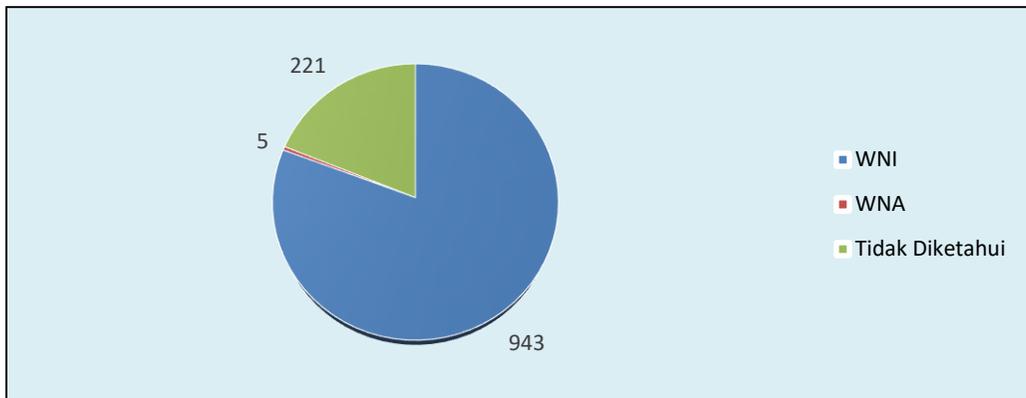


Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.12 menunjukkan jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Persentase terbesar pelaku kekerasan adalah pada kelompok umur 25-59 tahun, dimana gambar diatas juga menunjukkan bahwa 87 persen diantaranya adalah laki-laki. Selanjutnya, bila dilihat secara keseluruhan, pelaku kekerasan didominasi oleh jenis kelamin laki-laki pada semua kelompok umur.

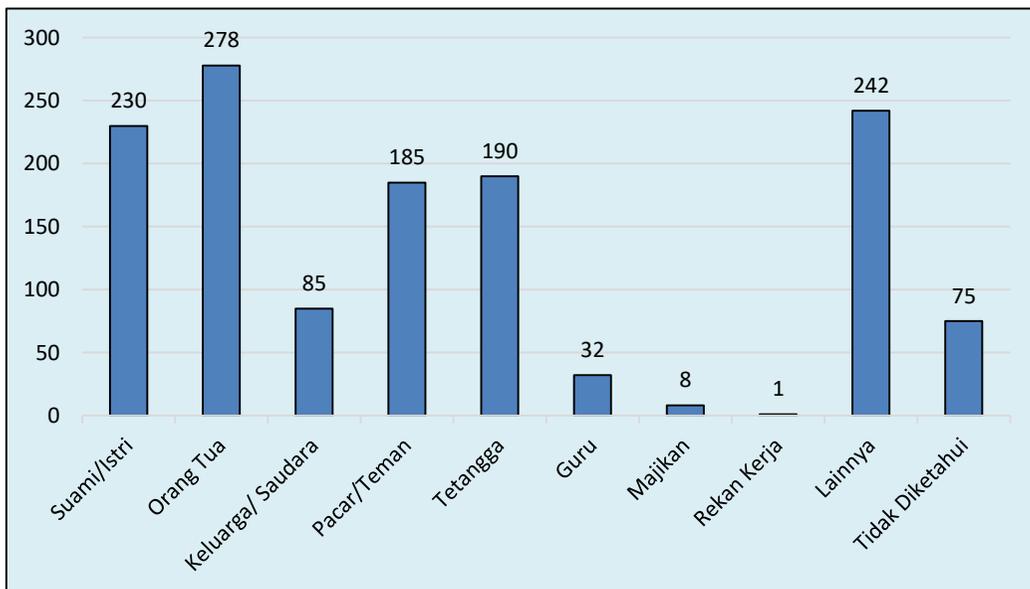
Gambar 9.13 menunjukkan jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kewarganegaraan. Persentase terbesar pelaku kekerasan adalah warga negara Indonesia, yaitu sebanyak 81 persen (943 orang). Untuk pelaku kekerasan yang merupakan warga negara asing hanya ada di Kota Medan (2 orang), Kabupaten Deli Serdang (2 orang), dan Kabupaten Simalungun (1 orang). Pelaku kekerasan yang tidak diketahui kewarganegaraannya juga masih cukup banyak, yaitu sebesar 221 orang (lampiran Tabel L-9.9).

Gambar 9.13 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kewarganegaraan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.14 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018



Sumber: Dinas PPPA Provinsi Sumatera Utara (SIMFONI PPA kondisi 2 April 2019)

Gambar 9.14 menunjukkan jumlah pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut hubungan dengan korban. Seorang pelaku dapat memiliki lebih dari satu jenis hubungan dengan korbannya ketika dia melakukan kekerasan pada lebih dari satu korban. Jumlah terbesar pelaku kekerasan adalah yang memiliki status hubungan sebagai orang tua (278 kasus), lainnya (242 kasus), dan suami/istri (230 kasus). Bila dikaitkan dengan tempat kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang paling banyak terjadi di rumah tangga dapat memperkuat indikasi bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya terjadi di ranah rumah tangga (KDRT). Peran dari pasangan (suami/istri) maupun orangtua yang diharapkan dapat melindungi dan turut memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera malah sebaliknya menjadi pelaku kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2019. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Hosking, G and Walsh, Ita. 2005. *The WAVE Report 2005: Violence and What To Do About It*. Surrey, England.
- Kardjati, S., Alisjahbana, A., dan Kusin, J.A. (1985). Aspek Kesehatan dan Gizi Anak Balita.
- Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Permenkes RI. No 88 Tahun 2012 Tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur Dan Ibu Hamil.
- Republik Indonesia. 1995. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1995. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Reiss, A.J. and Roth, J.A. (Eds.), 1993. *Understanding and Preventing Violence*. Washington, DC: National Academy Press.
- Republik Indonesia. 2017. UU No. 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2004. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

UNICEF, 2014. *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*. New York, USA.

WHO, 2012. *Understanding and addressing violence against women: Intimate Partner Violence*. Geneva, Switzerland.



LAMPIRAN

Tabel L-3.1 Persentase Penduduk Laki-laki Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	0-14	15-64	65+	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	37,10	59,05	3,85	100,00
Mandailing Natal	33,83	62,10	4,06	100,00
Tapanuli Selatan	32,48	63,76	3,76	100,00
Tapanuli Tengah	36,01	60,48	3,51	100,00
Tapanuli Utara	34,79	59,19	6,01	100,00
Toba Samosir	31,43	61,66	6,91	100,00
Labuhanbatu	29,67	67,21	3,12	100,00
Asahan	28,75	66,51	4,74	100,00
Simalungun	27,32	66,72	5,96	100,00
Dairi	34,28	60,75	4,97	100,00
Karo	28,12	66,53	5,34	100,00
Deli Serdang	27,75	68,74	3,51	100,00
Langkat	27,45	67,39	5,16	100,00
Nias Selatan	33,58	63,37	3,05	100,00
Humbang Hasundutan	36,44	55,19	8,37	100,00
Pakpak Bharat	33,87	60,54	5,59	100,00
Samosir	31,42	61,73	6,85	100,00
Serdang Bedagai	28,26	66,53	5,21	100,00
Batubara	29,61	66,52	3,87	100,00
Padang Lawas Utara	36,14	60,40	3,46	100,00
Padang Lawas	35,15	60,94	3,91	100,00
Labuhanbatu Selatan	32,63	64,88	2,49	100,00
Labuhanbatu Utara	31,51	65,12	3,36	100,00
Nias Utara	34,71	60,90	4,39	100,00
Nias Barat	37,21	57,24	5,55	100,00
Sibolga	29,79	67,38	2,84	100,00
Tanjungbalai	30,64	65,24	4,12	100,00
Pematangsiantar	25,70	69,11	5,19	100,00
Tebing Tinggi	26,58	69,44	3,99	100,00
Medan	24,29	71,31	4,40	100,00
Binjai	26,44	69,57	3,98	100,00
Padangsidempuan	29,16	66,95	3,89	100,00
Gunungsitoli	30,92	65,73	3,35	100,00
Sumatera Utara	29,21	66,40	4,38	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.2 Persentase Penduduk Perempuan Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	0-14	15-64	65+	Total
(1)	(2)	(3)		(4)
Nias	33,62	62,56	3,82	100,00
Mandailing Natal	31,43	63,08	5,49	100,00
Tapanuli Selatan	29,39	64,75	5,86	100,00
Tapanuli Tengah	33,87	60,66	5,47	100,00
Tapanuli Utara	30,68	59,50	9,82	100,00
Toba Samosir	31,18	59,39	9,43	100,00
Labuhanbatu	30,58	65,31	4,10	100,00
Asahan	28,29	65,46	6,25	100,00
Simalungun	26,85	65,92	7,23	100,00
Dairi	30,42	62,03	7,54	100,00
Karo	27,00	64,84	8,16	100,00
Deli Serdang	27,52	68,11	4,37	100,00
Langkat	26,50	67,77	5,73	100,00
Nias Selatan	32,73	64,87	2,40	100,00
Humbang Hasundutan	33,81	56,34	9,86	100,00
Pakpak Bharat	32,61	62,00	5,39	100,00
Samosir	31,55	58,97	9,48	100,00
Serdang Bedagai	26,58	67,28	6,14	100,00
Batubara	28,84	65,86	5,30	100,00
Padang Lawas Utara	34,34	61,85	3,81	100,00
Padang Lawas	33,88	61,88	4,24	100,00
Labuhanbatu Selatan	32,24	64,88	2,88	100,00
Labuhanbatu Utara	30,95	64,39	4,66	100,00
Nias Utara	31,28	65,21	3,51	100,00
Nias Barat	33,39	62,09	4,52	100,00
Sibolga	29,11	66,47	4,42	100,00
Tanjungbalai	30,82	64,82	4,36	100,00
Pematangsiantar	24,64	69,03	6,33	100,00
Tebing Tinggi	24,93	69,82	5,25	100,00
Medan	22,79	72,03	5,19	100,00
Binjai	24,74	70,31	4,96	100,00
Padangsidempuan	26,91	68,07	5,02	100,00
Gunungsitoli	29,18	65,94	4,87	100,00
Sumatera Utara	30,85	64,34	4,81	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.3 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	0-14	15-64	65+	Total
(1)	(2)	(3)		(4)
Nias	35,32	60,85	3,83	100,00
Mandailing Natal	32,61	62,60	4,79	100,00
Tapanuli Selatan	30,93	64,26	4,81	100,00
Tapanuli Tengah	34,94	60,57	4,49	100,00
Tapanuli Utara	32,72	59,35	7,93	100,00
Toba Samosir	31,31	60,52	8,18	100,00
Labuhanbatu	30,12	66,27	3,61	100,00
Asahan	28,52	65,99	5,49	100,00
Simalungun	27,08	66,32	6,60	100,00
Dairi	32,35	61,39	6,26	100,00
Karo	27,56	65,68	6,76	100,00
Deli Serdang	27,64	68,43	3,93	100,00
Langkat	26,98	67,58	5,44	100,00
Nias Selatan	33,15	64,13	2,72	100,00
Humbang Hasundutan	35,11	55,77	9,12	100,00
Pakpak Bharat	33,25	61,25	5,49	100,00
Samosir	31,48	60,35	8,16	100,00
Serdang Bedagai	27,42	66,90	5,67	100,00
Batubara	29,23	66,19	4,58	100,00
Padang Lawas Utara	35,24	61,12	3,63	100,00
Padang Lawas	34,51	61,41	4,08	100,00
Labuhanbatu Selatan	32,44	64,88	2,68	100,00
Labuhanbatu Utara	31,24	64,76	4,01	100,00
Nias Utara	32,98	63,08	3,95	100,00
Nias Barat	35,22	59,77	5,01	100,00
Sibolga	29,45	66,92	3,63	100,00
Tanjungbalai	30,73	65,03	4,24	100,00
Pematangsiantar	25,15	69,07	5,77	100,00
Tebing Tinggi	25,75	69,63	4,62	100,00
Medan	23,53	71,67	4,80	100,00
Binjai	25,59	69,94	4,47	100,00
Padangsidempuan	28,00	67,53	4,47	100,00
Gunungsitoli	30,03	65,84	4,13	100,00
Sumatera Utara	28,61	66,45	4,94	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.4 Persentase Penduduk Laki-laki 10 tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	50,44	46,95	0,29	2,32	100,00
Mandailing Natal	44,39	52,37	1,23	2,01	100,00
Tapanuli Selatan	44,91	51,07	1,20	2,82	100,00
Tapanuli Tengah	46,68	49,77	1,31	2,24	100,00
Tapanuli Utara	44,09	50,89	1,42	3,61	100,00
Toba Samosir	44,17	52,13	0,80	2,90	100,00
Labuhanbatu	43,75	53,87	0,99	1,39	100,00
Asahan	40,43	56,39	0,93	2,24	100,00
Simalungun	39,69	56,74	0,65	2,91	100,00
Dairi	43,66	52,29	1,31	2,73	100,00
Karo	37,16	58,01	1,04	3,78	100,00
Deli Serdang	41,37	55,71	0,76	2,16	100,00
Langkat	39,11	57,09	1,46	2,34	100,00
Nias Selatan	49,61	46,33	1,28	2,78	100,00
Humbang Hasundutan	44,76	51,66	0,31	3,26	100,00
Pakpak Bharat	46,12	52,53	0,10	1,25	100,00
Samosir	44,85	52,03	0,72	2,39	100,00
Serdang Bedagai	38,47	58,06	0,98	2,49	100,00
Batubara	40,09	54,96	1,82	3,13	100,00
Padang Lawas Utara	38,24	57,85	1,22	2,69	100,00
Padang Lawas	43,12	54,74	0,47	1,67	100,00
Labuhanbatu Selatan	40,39	57,33	0,92	1,37	100,00
Labuhanbatu Utara	41,14	55,60	0,77	2,48	100,00
Nias Utara	45,08	52,51	0,27	2,14	100,00
Nias Barat	47,83	49,88	0,50	1,79	100,00
Sibolga	48,64	48,72	0,72	1,91	100,00
Tanjungbalai	43,33	53,45	1,72	1,50	100,00
Pematangsiantar	45,96	50,93	0,93	2,17	100,00
Tebing Tinggi	40,00	55,95	0,96	3,10	100,00
Medan	47,16	49,42	1,32	2,10	100,00
Binjai	41,49	54,82	1,88	1,81	100,00
Padangsidempuan	46,97	50,46	0,97	1,60	100,00
Gunungsitoli	48,62	47,57	0,63	3,19	100,00
Sumatera Utara	42,86	53,73	1,06	2,35	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.5 Persentase Penduduk Perempuan 10 tahun ke Atas Menurut Kabupaten/ Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	45,45	44,21	0,30	10,03	100,00
Mandailing Natal	35,57	49,80	2,38	12,25	100,00
Tapanuli Selatan	33,56	49,79	2,83	13,81	100,00
Tapanuli Tengah	37,34	49,88	0,94	11,84	100,00
Tapanuli Utara	32,51	50,06	1,96	15,48	100,00
Toba Samosir	31,78	52,43	1,21	14,57	100,00
Labuhanbatu	34,67	54,98	2,55	7,80	100,00
Asahan	30,08	58,80	1,45	9,66	100,00
Simalungun	28,15	57,11	1,94	12,81	100,00
Dairi	33,39	52,45	1,50	12,66	100,00
Karo	25,71	57,53	3,14	13,62	100,00
Deli Serdang	33,57	56,53	2,02	7,88	100,00
Langkat	29,96	59,81	1,87	8,36	100,00
Nias Selatan	42,69	47,83	0,18	9,30	100,00
Humbang Hasundutan	32,35	51,01	1,90	14,74	100,00
Pakpak Bharat	34,40	54,01	1,06	10,53	100,00
Samosir	31,73	52,57	0,52	15,18	100,00
Serdang Bedagai	28,48	58,72	2,96	9,85	100,00
Batubara	30,62	57,18	2,38	9,81	100,00
Padang Lawas Utara	30,68	58,11	1,35	9,85	100,00
Padang Lawas	34,49	55,16	2,07	8,28	100,00
Labuhanbatu Selatan	32,05	59,95	2,25	5,76	100,00
Labuhanbatu Utara	31,86	57,57	2,40	8,17	100,00
Nias Utara	39,47	50,50	0,13	9,90	100,00
Nias Barat	44,51	45,03	0,18	10,27	100,00
Sibolga	37,10	48,48	2,72	11,70	100,00
Tanjungbalai	33,13	55,40	2,55	8,92	100,00
Pematangsiantar	36,75	48,38	3,24	11,63	100,00
Tebing Tinggi	31,59	56,17	1,74	10,50	100,00
Medan	40,32	48,33	2,04	9,30	100,00
Binjai	33,69	54,27	3,26	8,78	100,00
Padangsidempuan	40,62	47,39	2,07	9,92	100,00
Gunungsitoli	43,63	44,68	0,50	11,18	100,00
Sumatera Utara	34,10	53,93	2,00	9,97	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.6 Persentase Penduduk 10 tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	47,85	45,53	0,30	6,32	100,00
Mandailing Natal	39,85	51,05	1,82	7,27	100,00
Tapanuli Selatan	39,16	50,42	2,03	8,40	100,00
Tapanuli Tengah	41,99	49,83	1,12	7,06	100,00
Tapanuli Utara	38,16	50,46	1,69	9,68	100,00
Toba Samosir	37,89	52,28	1,01	8,82	100,00
Labuhanbatu	39,25	54,42	1,76	4,57	100,00
Asahan	35,27	57,59	1,19	5,95	100,00
Simalungun	33,87	56,93	1,30	7,90	100,00
Dairi	38,49	52,37	1,41	7,74	100,00
Karo	31,35	57,77	2,11	8,77	100,00
Deli Serdang	37,48	56,12	1,39	5,01	100,00
Langkat	34,56	58,44	1,66	5,34	100,00
Nias Selatan	46,14	47,08	0,73	6,05	100,00
Humbang Hasundutan	38,45	51,33	1,12	9,10	100,00
Pakpak Bharat	40,30	53,27	0,57	5,86	100,00
Samosir	38,26	52,30	0,62	8,82	100,00
Serdang Bedagai	33,48	58,39	1,97	6,17	100,00
Batubara	35,36	56,07	2,10	6,47	100,00
Padang Lawas Utara	34,47	57,98	1,29	6,26	100,00
Padang Lawas	38,78	54,95	1,28	4,99	100,00
Labuhanbatu Selatan	36,30	58,61	1,57	3,52	100,00
Labuhanbatu Utara	36,54	56,58	1,58	5,30	100,00
Nias Utara	42,20	51,48	0,20	6,12	100,00
Nias Barat	46,06	47,31	0,33	6,30	100,00
Sibolga	42,86	48,60	1,72	6,82	100,00
Tanjungbalai	38,24	54,42	2,14	5,20	100,00
Pematangsiantar	41,20	49,62	2,13	7,06	100,00
Tebing Tinggi	35,72	56,06	1,35	6,87	100,00
Medan	43,68	48,86	1,69	5,77	100,00
Binjai	37,56	54,54	2,58	5,32	100,00
Padangsidempuan	43,70	48,88	1,53	5,89	100,00
Gunungsitoli	46,03	46,07	0,56	7,33	100,00
Sumatera Utara	38,45	53,83	1,53	6,19	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.7 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur Tahun 2018

Kelompok Umur	Laki-laki	%	Perempuan	%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	772 571	50,90	745 274	49,10	1 517 845
5-9	791 487	50,89	763 839	49,11	1 555 326
10-14	740 044	51,28	703 105	48,72	1 443 149
15-19	685 502	51,04	657 449	48,96	1 342 951
20-24	629 918	50,78	610 618	49,22	1 240 536
25-29	552 644	50,21	547 917	49,79	1 100 561
30-34	519 108	49,78	523 688	50,22	1 042 796
35-39	488 114	49,37	500 569	50,63	988 683
40-44	452 685	49,50	461 874	50,50	914 559
45-49	406 469	49,08	421 724	50,92	828 193
50-54	353 651	48,60	374 076	51,40	727 727
55-59	295 419	48,34	315 693	51,66	611 112
60-64	223 606	48,41	238 253	51,59	461 859
65-69	137 776	47,24	153 888	52,76	291 664
70-74	75 372	43,52	97 810	56,48	173 182
75+	68 834	39,28	106 414	60,72	175 248
Sumatera Utara	7 193 200	49,90	7 222 191	50,10	14 415 391

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.8 Persentase Penduduk yang Ber-status Kepala Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	82,22	17,78	100,00
Mandailing Natal	81,04	18,96	100,00
Tapanuli Selatan	79,49	20,51	100,00
Tapanuli Tengah	81,15	18,85	100,00
Tapanuli Utara	78,70	21,30	100,00
Toba Samosir	77,29	22,71	100,00
Labuhanbatu	87,68	12,32	100,00
Asahan	84,99	15,01	100,00
Simalungun	81,67	18,33	100,00
Dairi	79,68	20,32	100,00
Karo	80,18	19,82	100,00
Deli Serdang	85,33	14,67	100,00
Langkat	86,62	13,38	100,00
Nias Selatan	82,66	17,34	100,00
Humbang Hasundutan	75,08	24,92	100,00
Pakpak Bharat	81,24	18,76	100,00
Samosir	75,36	24,64	100,00
Serdang Bedagai	86,31	13,69	100,00
Batubara	86,26	13,74	100,00
Padang Lawas Utara	84,43	15,57	100,00
Padang Lawas	86,21	13,79	100,00
Labuhanbatu Selatan	90,86	9,14	100,00
Labuhanbatu Utara	85,04	14,96	100,00
Nias Utara	84,74	15,26	100,00
Nias Barat	80,86	19,14	100,00
Sibolga	80,95	19,05	100,00
Tanjungbalai	83,37	16,63	100,00
Pematangsiantar	77,36	22,64	100,00
Tebing Tinggi	80,41	19,59	100,00
Medan	80,08	19,92	100,00
Binjai	83,82	16,18	100,00
Padangsidempuan	80,12	19,88	100,00
Gunungsitoli	81,20	18,80	100,00
Sumatera Utara	83,03	16,97	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-3.9 Angka IPM dan IPG Menurut Kabupaten/Kota dan IPM Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

Kabupaten/Kota	IPM			IPG
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	75,28	68,25	60,82	90,66
Mandailing Natal	64,20	58,33	65,83	90,86
Tapanuli Selatan	70,06	65,49	69,10	93,48
Tapanuli Tengah	73,50	67,04	68,27	91,21
Tapanuli Utara	71,68	67,57	72,91	94,27
Toba Samosir	74,18	72,60	74,48	97,87
Labuhanbatu	75,36	73,80	71,39	97,93
Asahan	75,75	68,95	69,49	91,02
Simalungun	73,92	67,42	72,49	91,21
Dairi	76,50	70,99	70,89	92,80
Karo	71,78	69,94	73,91	97,44
Deli Serdang	75,12	72,32	74,92	96,27
Langkat	79,48	72,47	70,27	91,18
Nias Selatan	74,24	66,29	60,75	89,29
Humbang Hasundutan	66,69	58,36	67,96	87,51
Pakpak Bharat	69,46	67,33	66,63	96,93
Samosir	67,24	66,57	69,99	99,00
Serdang Bedagai	72,26	69,68	69,69	96,43
Batubara	74,03	65,60	67,67	88,61
Padang Lawas Utara	72,45	60,06	68,77	82,90
Padang Lawas	73,86	64,10	67,59	86,79
Labuhanbatu Selatan	72,24	61,48	70,98	85,11
Labuhanbatu Utara	76,45	66,49	71,08	86,97
Nias Utara	75,54	67,85	61,08	89,82
Nias Barat	68,22	53,63	60,42	78,61
Sibolga	67,20	57,77	72,65	85,97
Tanjungbalai	74,19	72,21	68,00	97,33
Pematangsiantar	72,46	64,76	77,88	89,37
Tebing Tinggi	80,55	76,78	74,50	95,32
Medan	78,28	73,06	80,65	93,33
Binjai	84,78	79,68	75,21	93,98
Padangsidempuan	79,65	72,14	74,38	90,57
Gunungsitoli	76,20	74,04	68,33	97,17
Sumatera Utara	75,28	68,25	71,18	90,66

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	117,29	117,60	117,45
Mandailing Natal	109,15	107,65	108,35
Tapanuli Selatan	117,41	111,75	114,46
Tapanuli Tengah	109,25	115,15	112,22
Tapanuli Utara	109,92	111,18	110,54
Toba Samosir	111,65	111,25	111,47
Labuhanbatu	107,17	111,70	109,51
Asahan	114,91	116,50	115,67
Simalungun	106,73	116,13	111,25
Dairi	114,55	110,61	112,64
Karo	106,08	108,06	107,03
Deli Serdang	108,62	117,83	112,82
Langkat	117,37	109,54	113,49
Nias Selatan	103,52	107,71	105,47
Humbang Hasundutan	118,42	115,07	116,78
Pakpak Bharat	111,20	111,89	111,52
Samosir	110,13	115,76	112,89
Serdang Bedagai	114,44	114,65	114,54
Batubara	120,36	119,95	120,17
Padang Lawas Utara	106,66	114,56	110,67
Padang Lawas	107,29	108,86	108,06
Labuhanbatu Selatan	109,38	106,03	107,70
Labuhanbatu Utara	111,12	111,71	111,42
Nias Utara	116,26	116,81	116,52
Nias Barat	124,72	125,98	125,36
Sibolga	111,86	109,92	110,91
Tanjungbalai	116,10	112,82	114,35
Pematangsiantar	113,83	109,90	111,77
Tebing Tinggi	111,25	112,52	111,91
Medan	105,12	101,08	103,12
Binjai	109,44	111,56	110,51
Padangsidempuan	113,55	111,51	112,48
Gunungsitoli	117,30	113,89	115,66
Sumatera Utara	110,57	111,66	111,10
Perkotaan	109,53	111,12	110,31
Perdesaan	111,56	112,17	111,86

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	82,77	90,37	86,85
Mandailing Natal	95,72	94,15	95,06
Tapanuli Selatan	89,91	83,69	86,65
Tapanuli Tengah	99,51	102,91	101,00
Tapanuli Utara	98,46	90,24	94,61
Toba Samosir	90,89	96,56	94,01
Labuhanbatu	92,45	88,77	90,83
Asahan	90,85	82,21	86,13
Simalungun	94,77	77,87	86,25
Dairi	97,48	97,75	97,62
Karo	92,17	85,04	88,67
Deli Serdang	88,79	85,07	87,07
Langkat	90,51	83,21	87,02
Nias Selatan	80,52	75,54	78,07
Humbang Hasundutan	91,00	93,34	92,16
Pakpak Bharat	92,77	91,83	92,29
Samosir	104,72	95,41	99,62
Serdang Bedagai	78,42	77,49	77,94
Batubara	79,83	85,88	82,95
Padang Lawas Utara	96,31	78,56	88,16
Padang Lawas	113,76	91,51	102,15
Labuhanbatu Selatan	109,66	101,20	105,80
Labuhanbatu Utara	95,08	95,91	95,48
Nias Utara	86,02	89,83	87,78
Nias Barat	95,83	84,19	90,65
Sibolga	88,22	88,57	88,40
Tanjungbalai	75,12	85,83	80,23
Pematangsiantar	93,07	86,54	89,50
Tebing Tinggi	85,11	80,50	83,01
Medan	95,39	98,66	96,97
Binjai	82,29	84,47	83,42
Padangsidempuan	88,22	87,62	87,97
Gunungsitoli	88,06	90,54	89,34
Sumatera Utara	91,77	88,08	89,98
Perkotaan	92,10	87,30	89,73
Perdesaan	91,45	88,90	90,23

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	85,18	74,50	79,93
Mandailing Natal	73,54	78,62	76,14
Tapanuli Selatan	71,56	87,49	77,89
Tapanuli Tengah	69,05	75,22	72,38
Tapanuli Utara	88,58	105,89	97,28
Toba Samosir	103,08	102,12	102,66
Labuhanbatu	94,54	94,27	94,39
Asahan	63,91	82,81	72,18
Simalungun	71,47	105,29	85,46
Dairi	84,19	97,42	90,77
Karo	73,07	100,90	87,20
Deli Serdang	89,11	106,17	98,63
Langkat	92,86	107,07	100,00
Nias Selatan	98,93	97,83	98,41
Humbang Hasundutan	82,25	101,75	91,16
Pakpak Bharat	107,00	101,92	104,32
Samosir	81,01	102,10	88,56
Serdang Bedagai	81,32	90,78	85,91
Batubara	81,70	85,34	83,45
Padang Lawas Utara	91,14	108,80	99,98
Padang Lawas	91,80	94,94	93,32
Labuhanbatu Selatan	81,91	86,83	84,44
Labuhanbatu Utara	101,96	84,63	93,46
Nias Utara	118,14	83,58	99,11
Nias Barat	106,90	101,95	104,22
Sibolga	89,59	100,88	95,06
Tanjungbalai	61,45	85,94	72,37
Pematangsiantar	94,58	115,68	104,36
Tebing Tinggi	82,80	84,89	83,85
Medan	106,48	92,88	99,28
Binjai	82,80	93,83	88,12
Padangsidempuan	83,54	94,28	89,12
Gunungsitoli	84,32	96,71	90,34
Sumatera Utara	87,47	95,65	91,57
Perkotaan	91,01	98,17	94,68
Perdesaan	83,64	92,67	88,05

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	9,36	5,18	7,26
Mandailing Natal	13,84	21,96	17,82
Tapanuli Selatan	19,80	21,17	20,44
Tapanuli Tengah	19,38	16,97	18,32
Tapanuli Utara	21,18	16,55	19,37
Toba Samosir	4,20	10,10	6,34
Labuhanbatu	7,51	16,86	11,89
Asahan	9,54	22,98	16,16
Simalungun	25,23	17,17	21,30
Dairi	21,35	4,40	14,53
Karo	16,49	10,87	13,88
Deli Serdang	31,32	26,70	29,12
Langkat	18,72	13,80	16,27
Nias Selatan	14,57	16,01	15,25
Humbang Hasundutan	8,75	19,70	13,18
Pakpak Bharat	9,80	7,44	8,90
Samosir	7,05	2,09	4,76
Serdang Bedagai	13,97	11,96	13,01
Batubara	7,91	17,95	12,68
Padang Lawas Utara	5,41	11,02	8,23
Padang Lawas	10,75	12,07	11,38
Labuhanbatu Selatan	14,02	9,88	12,05
Labuhanbatu Utara	2,62	24,93	13,72
Nias Utara	11,57	12,30	11,93
Nias Barat	7,96	3,46	5,61
Sibolga	8,74	15,29	11,88
Tanjungbalai	7,93	8,33	8,13
Pematangsiantar	25,99	26,04	26,01
Tebing Tinggi	13,86	12,49	13,19
Medan	43,31	62,13	52,80
Binjai	32,55	22,85	27,62
Padangsidempuan	25,67	39,15	32,86
Gunungsitoli	17,88	21,08	19,50
Sumatera Utara	23,31	28,12	25,64
Perkotaan	29,52	36,35	32,86
Perdesaan	15,08	16,66	15,83

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 7-12 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	98,88	98,99	98,94
Mandailing Natal	100,00	99,72	99,85
Tapanuli Selatan	100,00	97,88	98,90
Tapanuli Tengah	100,00	99,31	99,65
Tapanuli Utara	99,63	99,53	99,58
Toba Samosir	98,58	100,00	99,21
Labuhanbatu	99,57	100,00	99,79
Asahan	99,34	100,00	99,66
Simalungun	99,75	98,83	99,31
Dairi	100,00	100,00	100,00
Karo	98,76	99,56	99,15
Deli Serdang	99,75	100,00	99,87
Langkat	100,00	100,00	100,00
Nias Selatan	95,66	96,43	96,02
Humbang Hasundutan	100,00	98,08	99,06
Pakpak Bharat	99,55	100,00	99,76
Samosir	100,00	99,30	99,66
Serdang Bedagai	99,25	99,79	99,51
Batubara	99,56	100,00	99,77
Padang Lawas Utara	98,14	99,50	98,83
Padang Lawas	99,65	100,00	99,82
Labuhanbatu Selatan	99,55	97,85	98,70
Labuhanbatu Utara	100,00	100,00	100,00
Nias Utara	97,16	99,28	98,17
Nias Barat	100,00	100,00	100,00
Sibolga	99,26	98,95	99,11
Tanjungbalai	98,10	99,46	98,82
Pematangsiantar	99,53	100,00	99,77
Tebing Tinggi	97,28	100,00	98,69
Medan	100,00	99,46	99,73
Binjai	100,00	100,00	100,00
Padangsidempuan	100,00	100,00	100,00
Gunungsitoli	98,69	100,00	99,32
Sumatera Utara	99,48	99,51	99,50
Perkotaan	99,64	99,69	99,66
Perdesaan	99,33	99,35	99,34

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.2.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 13-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	91,47	93,77	92,71
Mandailing Natal	97,19	96,13	96,74
Tapanuli Selatan	95,62	100,00	97,91
Tapanuli Tengah	99,30	96,85	98,23
Tapanuli Utara	98,34	100,00	99,12
Toba Samosir	100,00	100,00	100,00
Labuhanbatu	95,67	97,70	96,56
Asahan	96,59	96,41	96,49
Simalungun	95,37	96,84	96,11
Dairi	100,00	100,00	100,00
Karo	95,93	90,74	93,38
Deli Serdang	96,93	97,75	97,31
Langkat	95,87	100,00	97,85
Nias Selatan	84,08	88,43	86,22
Humbang Hasundutan	97,77	99,15	98,45
Pakpak Bharat	98,97	96,09	97,50
Samosir	100,00	100,00	100,00
Serdang Bedagai	94,71	97,62	96,21
Batubara	93,64	98,37	96,08
Padang Lawas Utara	94,67	98,05	96,22
Padang Lawas	96,87	95,67	96,24
Labuhanbatu Selatan	93,14	90,19	91,79
Labuhanbatu Utara	96,34	99,39	97,80
Nias Utara	98,58	95,15	96,99
Nias Barat	97,94	96,54	97,32
Sibolga	97,81	100,00	98,96
Tanjungbalai	93,34	99,34	96,20
Pematangsiantar	98,17	97,69	97,90
Tebing Tinggi	94,14	100,00	96,82
Medan	97,73	96,87	97,32
Binjai	94,74	99,98	97,45
Padangsidempuan	99,98	98,40	99,33
Gunungsitoli	97,77	100,00	98,92
Sumatera Utara	96,26	97,27	96,75
Perkotaan	96,74	97,75	97,24
Perdesaan	95,79	96,78	96,26

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.2.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	76,39	67,80	72,17
Mandailing Natal	71,26	78,09	74,75
Tapanuli Selatan	77,80	81,42	79,24
Tapanuli Tengah	82,65	88,79	85,97
Tapanuli Utara	82,90	84,91	83,91
Toba Samosir	89,29	89,80	89,51
Labuhanbatu	78,21	68,98	73,32
Asahan	65,51	72,28	68,47
Simalungun	67,31	75,78	70,81
Dairi	86,48	92,09	89,27
Karo	75,00	90,76	83,00
Deli Serdang	70,90	83,54	77,95
Langkat	79,35	70,04	74,67
Nias Selatan	84,28	73,02	78,99
Humbang Hasundutan	79,02	95,21	86,41
Pakpak Bharat	89,59	91,89	90,81
Samosir	90,88	100,00	94,15
Serdang Bedagai	73,25	75,65	74,41
Batubara	68,83	66,57	67,74
Padang Lawas Utara	67,12	78,08	72,60
Padang Lawas	72,54	77,23	74,81
Labuhanbatu Selatan	76,64	78,38	77,54
Labuhanbatu Utara	74,20	77,04	75,59
Nias Utara	84,60	78,20	81,08
Nias Barat	88,44	89,95	89,26
Sibolga	72,06	86,39	79,00
Tanjungbalai	61,10	84,27	71,44
Pematangsiantar	77,75	87,18	82,12
Tebing Tinggi	63,34	69,99	66,69
Medan	70,45	87,90	79,69
Binjai	79,72	81,01	80,34
Padangsidempuan	72,20	90,68	81,80
Gunungsitoli	82,52	86,74	84,57
Sumatera Utara	73,88	80,92	77,41
Perkotaan	73,57	83,44	78,63
Perdesaan	74,21	77,95	76,03

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.2.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 19-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	19,60	10,57	15,06
Mandailing Natal	15,21	19,37	17,25
Tapanuli Selatan	16,25	20,49	18,22
Tapanuli Tengah	16,28	15,95	16,14
Tapanuli Utara	26,95	27,51	27,17
Toba Samosir	8,91	24,23	14,46
Labuhanbatu	15,76	31,28	23,04
Asahan	10,35	19,65	14,93
Simalungun	24,04	19,95	22,05
Dairi	16,42	12,75	14,94
Karo	15,42	14,42	14,96
Deli Serdang	25,39	23,06	24,28
Langkat	24,01	22,22	23,12
Nias Selatan	20,03	21,52	20,73
Humbang Hasundutan	10,51	19,53	14,16
Pakpak Bharat	15,58	12,90	14,56
Samosir	7,05	2,09	4,76
Serdang Bedagai	12,96	7,90	10,55
Batubara	17,67	28,23	22,68
Padang Lawas Utara	21,25	18,91	20,07
Padang Lawas	34,87	23,60	29,52
Labuhanbatu Selatan	26,20	21,97	24,19
Labuhanbatu Utara	20,51	33,47	26,96
Nias Utara	23,25	11,38	17,43
Nias Barat	20,38	8,20	14,04
Sibolga	12,13	14,83	13,42
Tanjungbalai	7,93	8,81	8,36
Pematangsiantar	33,51	35,89	34,72
Tebing Tinggi	20,12	12,49	16,40
Medan	39,19	45,60	42,42
Binjai	25,12	20,60	22,82
Padangsidempuan	23,12	34,31	29,09
Gunungsitoli	18,50	21,27	19,90
Sumatera Utara	24,19	26,50	25,31
Perkotaan	26,71	29,66	28,16
Perdesaan	20,85	22,09	21,44

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.3.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	98,88	98,99	98,94
Mandailing Natal	100,00	99,72	99,85
Tapanuli Selatan	100,00	97,88	98,90
Tapanuli Tengah	100,00	99,31	99,65
Tapanuli Utara	99,63	99,53	99,58
Toba Samosir	98,58	100,00	99,21
Labuhanbatu	99,57	100,00	99,79
Asahan	99,34	100,00	99,66
Simalungun	98,70	98,83	98,77
Dairi	100,00	100,00	100,00
Karo	98,76	99,56	99,15
Deli Serdang	96,47	91,79	94,34
Langkat	97,90	98,75	98,32
Nias Selatan	95,66	96,43	96,02
Humbang Hasundutan	100,00	98,08	99,06
Pakpak Bharat	99,55	100,00	99,76
Samosir	100,00	99,30	99,66
Serdang Bedagai	99,25	99,79	99,51
Batubara	99,56	100,00	99,77
Padang Lawas Utara	98,14	99,50	98,83
Padang Lawas	99,65	100,00	99,82
Labuhanbatu Selatan	99,55	97,85	98,70
Labuhanbatu Utara	100,00	100,00	100,00
Nias Utara	97,16	99,28	98,17
Nias Barat	100,00	100,00	100,00
Sibolga	99,26	98,95	99,11
Tanjungbalai	98,10	99,46	98,82
Pematangsiantar	99,53	100,00	99,77
Tebing Tinggi	97,28	100,00	98,69
Medan	93,85	91,35	92,61
Binjai	100,00	100,00	100,00
Padangsidempuan	100,00	100,00	100,00
Gunungsitoli	98,69	100,00	99,32
Sumatera Utara	97,98	97,26	97,63
Perkotaan	97,03	95,58	96,33
Perdesaan	98,90	98,84	98,87

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	72,81	81,52	77,48
Mandailing Natal	84,06	81,90	83,15
Tapanuli Selatan	79,48	83,69	81,68
Tapanuli Tengah	90,20	85,21	88,02
Tapanuli Utara	89,48	86,40	88,03
Toba Samosir	85,81	93,22	89,88
Labuhanbatu	88,93	81,14	85,50
Asahan	80,45	80,59	80,53
Simalungun	78,29	76,60	77,44
Dairi	86,63	91,53	89,17
Karo	83,10	83,19	83,14
Deli Serdang	78,90	61,80	71,00
Langkat	78,02	79,25	78,61
Nias Selatan	69,55	68,75	69,16
Humbang Hasundutan	91,00	93,34	92,16
Pakpak Bharat	87,08	87,47	87,28
Samosir	88,93	92,36	90,80
Serdang Bedagai	69,06	77,49	73,41
Batubara	69,09	70,95	70,05
Padang Lawas Utara	90,57	73,67	82,81
Padang Lawas	85,59	76,62	80,91
Labuhanbatu Selatan	86,54	83,35	85,08
Labuhanbatu Utara	74,13	73,32	73,74
Nias Utara	79,54	81,99	80,68
Nias Barat	85,53	78,29	82,31
Sibolga	84,24	88,57	86,52
Tanjungbalai	75,12	85,83	80,23
Pematangsiantar	85,27	81,04	82,96
Tebing Tinggi	85,11	80,50	83,01
Medan	79,70	76,67	78,24
Binjai	80,80	82,85	81,86
Padangsidempuan	87,15	82,15	85,08
Gunungsitoli	82,63	83,68	83,17
Sumatera Utara	80,71	77,70	79,25
Perkotaan	81,71	75,00	78,39
Perdesaan	79,73	80,54	80,12

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Total (4)
Nias	66,03	57,76	61,97
Mandailing Natal	57,59	68,55	63,20
Tapanuli Selatan	61,70	76,67	67,65
Tapanuli Tengah	66,93	74,07	70,79
Tapanuli Utara	71,92	83,18	77,58
Toba Samosir	83,49	81,52	82,62
Labuhanbatu	72,88	62,24	67,24
Asahan	55,09	66,87	60,25
Simalungun	54,94	74,19	62,90
Dairi	73,95	86,62	80,25
Karo	63,01	84,08	73,71
Deli Serdang	62,33	72,69	68,11
Langkat	66,02	66,41	66,21
Nias Selatan	66,96	62,62	64,92
Humbang Hasundutan	79,02	95,21	86,41
Pakpak Bharat	78,08	79,48	78,82
Samosir	76,30	93,89	82,60
Serdang Bedagai	64,49	72,53	68,39
Batubara	61,69	59,88	60,82
Padang Lawas Utara	59,23	78,08	68,66
Padang Lawas	62,28	64,65	63,42
Labuhanbatu Selatan	68,30	73,64	71,04
Labuhanbatu Utara	65,16	61,56	63,39
Nias Utara	76,26	71,13	73,43
Nias Barat	74,43	84,17	79,70
Sibolga	66,45	81,27	73,63
Tanjungbalai	61,10	84,27	71,44
Pematangsiantar	74,10	79,66	76,68
Tebing Tinggi	63,34	69,99	66,69
Medan	61,15	61,86	61,53
Binjai	68,11	73,69	70,80
Padangsidempuan	70,91	81,75	76,55
Gunungsitoli	74,87	77,04	75,92
Sumatera Utara	64,13	70,39	67,27
Perkotaan	65,01	69,60	67,36
Perdesaan	63,18	71,33	67,16

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	8,48	2,97	5,71
Mandailing Natal	9,67	18,14	13,82
Tapanuli Selatan	14,12	18,46	16,14
Tapanuli Tengah	16,28	15,95	16,14
Tapanuli Utara	21,18	14,40	18,53
Toba Samosir	0,00	7,19	2,60
Labuhanbatu	6,75	16,33	11,24
Asahan	9,54	19,65	14,52
Simalungun	22,75	16,61	19,75
Dairi	15,32	3,30	10,48
Karo	14,93	6,73	11,13
Deli Serdang	20,69	17,56	19,20
Langkat	16,59	11,25	13,92
Nias Selatan	8,43	14,59	11,33
Humbang Hasundutan	8,75	16,36	11,83
Pakpak Bharat	9,80	7,44	8,90
Samosir	7,05	2,09	4,76
Serdang Bedagai	12,96	7,90	10,55
Batubara	7,91	16,30	11,90
Padang Lawas Utara	2,82	9,89	6,37
Padang Lawas	10,75	12,07	11,38
Labuhanbatu Selatan	13,67	9,88	11,87
Labuhanbatu Utara	2,62	24,02	13,27
Nias Utara	7,48	6,45	6,98
Nias Barat	7,34	3,22	5,20
Sibolga	7,02	10,27	8,58
Tanjungbalai	7,93	8,33	8,13
Pematangsiantar	24,20	23,62	23,90
Tebing Tinggi	12,82	12,49	12,66
Medan	28,22	40,48	34,40
Binjai	25,12	20,60	22,82
Padangsidempuan	23,12	34,31	29,09
Gunungsitoli	16,29	17,52	16,91
Sumatera Utara	17,31	20,71	18,96
Perkotaan	20,35	25,05	22,65
Perdesaan	13,29	14,65	13,94

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	95,50	90,53	92,92
Mandailing Natal	99,95	99,16	99,54
Tapanuli Selatan	99,62	99,46	99,54
Tapanuli Tengah	99,63	98,81	99,22
Tapanuli Utara	99,74	99,04	99,38
Toba Samosir	99,84	99,34	99,59
Labuhanbatu	99,86	99,20	99,53
Asahan	99,65	98,98	99,31
Simalungun	99,55	99,03	99,29
Dairi	99,84	99,39	99,61
Karo	99,85	99,65	99,75
Deli Serdang	99,81	99,49	99,65
Langkat	99,68	99,22	99,45
Nias Selatan	94,47	87,24	90,85
Humbang Hasundutan	99,72	98,03	98,86
Pakpak Bharat	99,69	98,39	99,04
Samosir	99,72	98,48	99,10
Serdang Bedagai	99,48	99,01	99,24
Batubara	99,47	98,43	98,95
Padang Lawas Utara	99,75	99,53	99,64
Padang Lawas	99,84	99,59	99,72
Labuhanbatu Selatan	100,00	99,63	99,82
Labuhanbatu Utara	99,76	98,88	99,33
Nias Utara	95,67	88,89	92,19
Nias Barat	95,02	84,21	89,28
Sibolga	100,00	99,38	99,69
Tanjungbalai	99,91	99,21	99,57
Pematangsiantar	99,83	99,48	99,65
Tebing Tinggi	99,76	99,14	99,44
Medan	99,93	99,65	99,79
Binjai	99,79	99,27	99,53
Padangsidempuan	100,00	99,69	99,84
Gunungsitoli	98,19	96,99	97,57
Sumatera Utara	99,55	98,75	99,14
Perkotaan	99,78	99,44	99,61
Perdesaan	99,27	97,94	98,60

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.5.1 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	1,06	2,06	1,56
Mandailing Natal	0,00	0,00	0,00
Tapanuli Selatan	0,00	0,00	0,00
Tapanuli Tengah	0,13	0,42	0,28
Tapanuli Utara	0,00	0,00	0,00
Toba Samosir	0,00	0,00	0,00
Labuhanbatu	0,00	0,83	0,41
Asahan	0,00	0,00	0,00
Simalungun	0,47	0,00	0,24
Dairi	0,00	0,00	0,00
Karo	0,00	0,00	0,00
Deli Serdang	0,33	0,00	0,17
Langkat	0,00	0,00	0,00
Nias Selatan	0,15	0,04	0,09
Humbang Hasundutan	0,00	0,00	0,00
Pakpak Bharat	1,45	2,35	1,88
Samosir	0,42	0,00	0,21
Serdang Bedagai	0,06	0,00	0,03
Batubara	0,00	0,00	0,00
Padang Lawas Utara	0,00	0,00	0,00
Padang Lawas	0,00	0,00	0,00
Labuhanbatu Selatan	0,10	0,56	0,33
Labuhanbatu Utara	0,00	0,00	0,00
Nias Utara	0,32	0,52	0,42
Nias Barat	1,02	0,61	0,81
Sibolga	1,38	0,00	0,69
Tanjungbalai	0,06	0,61	0,35
Pematangsiantar	0,00	0,00	0,00
Tebing Tinggi	1,00	0,44	0,72
Medan	0,00	0,00	0,00
Binjai	0,00	0,00	0,00
Padangsidempuan	0,17	0,00	0,08
Gunungsitoli	0,00	0,00	0,00
Sumatera Utara	0,14	0,12	0,13
Perkotaan	0,2	0,07	0,14
Perdesaan	0,08	0,17	0,13

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.5.2 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	5,87	6,24	6,08
Mandailing Natal	2,36	0,00	1,09
Tapanuli Selatan	1,15	0,79	0,99
Tapanuli Tengah	0,56	1,19	0,88
Tapanuli Utara	0,66	0,00	0,37
Toba Samosir	0,00	0,00	0,00
Labuhanbatu	0,26	0,00	0,14
Asahan	0,00	0,00	0,00
Simalungun	0,00	0,00	0,00
Dairi	0,00	0,91	0,45
Karo	0,90	0,46	0,69
Deli Serdang	0,00	0,00	0,00
Langkat	0,00	0,00	0,00
Nias Selatan	0,62	0,00	0,32
Humbang Hasundutan	2,51	0,00	1,31
Pakpak Bharat	3,62	3,15	3,38
Samosir	3,50	0,00	1,75
Serdang Bedagai	0,77	0,00	0,37
Batubara	2,38	1,18	1,75
Padang Lawas Utara	10,54	2,99	7,24
Padang Lawas	1,25	4,00	2,61
Labuhanbatu Selatan	0,00	0,93	0,39
Labuhanbatu Utara	1,40	2,36	1,88
Nias Utara	5,63	6,12	5,86
Nias Barat	7,78	0,95	4,92
Sibolga	6,51	4,69	5,57
Tanjungbalai	4,22	2,87	3,53
Pematangsiantar	0,00	0,00	0,00
Tebing Tinggi	0,72	0,00	0,35
Medan	0,00	2,93	1,44
Binjai	0,98	0,00	0,46
Padangsidempuan	0,00	0,00	0,00
Gunungsitoli	4,78	0,00	2,36
Sumatera Utara	1,04	1,00	1,02
Perkotaan	0,83	1,27	1,05
Perdesaan	1,25	0,71	0,99

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.5.3 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	2,16	5,08	3,50
Mandailing Natal	2,62	1,34	1,93
Tapanuli Selatan	4,37	1,88	3,26
Tapanuli Tengah	0,00	0,00	0,00
Tapanuli Utara	3,25	0,95	2,18
Toba Samosir	2,73	0,00	1,73
Labuhanbatu	0,00	0,00	0,00
Asahan	1,74	0,00	0,85
Simalungun	0,98	0,00	0,53
Dairi	2,59	0,00	1,63
Karo	3,03	2,68	2,85
Deli Serdang	0,00	0,00	0,00
Langkat	0,00	1,14	0,62
Nias Selatan	5,84	2,45	4,23
Humbang Hasundutan	4,11	0,00	2,12
Pakpak Bharat	0,00	9,86	5,03
Samosir	1,61	0,00	0,90
Serdang Bedagai	2,66	2,53	2,60
Batubara	0,00	0,00	0,00
Padang Lawas Utara	0,00	0,85	0,47
Padang Lawas	2,06	0,00	1,07
Labuhanbatu Selatan	0,00	3,38	1,66
Labuhanbatu Utara	1,73	2,12	1,92
Nias Utara	3,78	0,98	2,45
Nias Barat	1,01	2,42	1,74
Sibolga	3,71	1,06	2,39
Tanjungbalai	5,33	0,00	2,64
Pematangsiantar	1,68	1,33	1,50
Tebing Tinggi	1,54	1,68	1,61
Medan	1,38	0,00	0,63
Binjai	1,14	2,76	1,93
Padangsidempuan	0,66	0,00	0,31
Gunungsitoli	1,66	1,87	1,77
Sumatera Utara	1,55	0,82	1,18
Perkotaan	1,14	0,49	0,81
Perdesaan	2,02	1,23	1,64

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.6.1 Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dibawah SMP atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	48,23	51,77	83,31
Mandailing Natal	48,51	51,49	75,33
Tapanuli Selatan	48,63	51,37	69,53
Tapanuli Tengah	49,88	50,12	71,45
Tapanuli Utara	49,19	50,81	62,23
Toba Samosir	48,82	51,18	55,68
Labuhanbatu	50,53	49,47	67,19
Asahan	50,30	49,70	69,00
Simalungun	49,24	50,76	61,48
Dairi	48,82	51,18	65,40
Karo	50,54	49,46	60,87
Deli Serdang	48,82	51,18	56,92
Langkat	49,41	50,59	70,24
Nias Selatan	52,84	47,16	74,42
Humbang Hasundutan	48,04	51,96	64,33
Pakpak Bharat	49,65	50,35	71,42
Samosir	50,14	49,86	61,54
Serdang Bedagai	49,46	50,54	67,55
Batubara	50,44	49,56	73,45
Padang Lawas Utara	49,52	50,48	69,87
Padang Lawas	49,40	50,60	71,59
Labuhanbatu Selatan	50,87	49,13	70,51
Labuhanbatu Utara	51,16	48,84	74,15
Nias Utara	49,08	50,92	76,83
Nias Barat	47,40	52,60	74,70
Sibolga	50,72	49,28	56,72
Tanjungbalai	50,48	49,52	62,50
Pematangsiantar	47,49	52,51	46,52
Tebing Tinggi	48,02	51,98	51,38
Medan	49,37	50,63	42,39
Binjai	47,80	52,20	47,99
Padangsidempuan	48,92	51,08	50,31
Gunungsitoli	46,76	53,24	62,10
Sumatera Utara	49,46	50,54	60,89
Perkotaan	49,10	50,90	52,11
Perdesaan	49,77	50,23	71,25

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.6.2 Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan SMA atau Sederajat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	63,47	36,53	12,12
Mandailing Natal	50,12	49,88	18,78
Tapanuli Selatan	53,91	46,09	23,75
Tapanuli Tengah	53,05	46,95	23,04
Tapanuli Utara	51,20	48,80	31,60
Toba Samosir	51,28	48,72	33,57
Labuhanbatu	51,66	48,34	27,53
Asahan	51,47	48,53	26,17
Simalungun	54,01	45,99	32,66
Dairi	55,21	44,79	27,67
Karo	48,44	51,56	32,75
Deli Serdang	54,16	45,84	35,46
Langkat	56,05	43,95	25,00
Nias Selatan	56,64	43,36	16,97
Humbang Hasundutan	54,25	45,75	29,22
Pakpak Bharat	56,54	43,46	21,45
Samosir	49,11	50,89	29,74
Serdang Bedagai	55,77	44,23	26,67
Batubara	52,36	47,64	21,74
Padang Lawas Utara	56,58	43,42	23,58
Padang Lawas	54,55	45,45	21,57
Labuhanbatu Selatan	54,03	45,97	24,81
Labuhanbatu Utara	52,96	47,04	20,83
Nias Utara	60,54	39,46	16,11
Nias Barat	61,48	38,52	16,17
Sibolga	50,56	49,44	35,56
Tanjungbalai	52,65	47,35	28,50
Pematangsiantar	49,34	50,66	42,79
Tebing Tinggi	52,45	47,55	38,40
Medan	50,14	49,86	42,50
Binjai	52,50	47,50	38,61
Padangsidempuan	49,81	50,19	35,66
Gunungsitoli	54,54	45,46	24,58
Sumatera Utara	52,59	47,41	30,91
Perkotaan	51,89	48,11	36,62
Perdesaan	53,85	46,15	24,15

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.6.3 Persentase Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Akademi/Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	63,45	36,55	4,57
Mandailing Natal	47,68	52,32	5,88
Tapanuli Selatan	42,75	57,25	6,72
Tapanuli Tengah	43,75	56,25	5,51
Tapanuli Utara	36,22	63,78	6,17
Toba Samosir	46,58	53,42	10,74
Labuhanbatu	47,50	52,50	5,28
Asahan	41,05	58,95	4,84
Simalungun	31,59	68,41	5,86
Dairi	38,38	61,62	6,93
Karo	42,33	57,67	6,38
Deli Serdang	43,40	56,60	7,62
Langkat	38,10	61,90	4,76
Nias Selatan	59,02	40,98	8,61
Humbang Hasundutan	43,02	56,98	6,45
Pakpak Bharat	43,73	56,27	7,13
Samosir	50,84	49,16	8,72
Serdang Bedagai	35,55	64,45	5,78
Batubara	43,00	57,00	4,81
Padang Lawas Utara	36,42	63,58	6,55
Padang Lawas	38,38	61,62	6,84
Labuhanbatu Selatan	37,12	62,88	4,68
Labuhanbatu Utara	34,48	65,52	5,02
Nias Utara	56,75	43,25	7,07
Nias Barat	53,72	46,28	9,13
Sibolga	42,54	57,46	7,72
Tanjungbalai	41,93	58,07	9,00
Pematangsiantar	47,45	52,55	10,69
Tebing Tinggi	44,19	55,81	10,22
Medan	45,75	54,25	15,11
Binjai	47,77	52,23	13,40
Padangsidempuan	43,44	56,56	14,03
Gunungsitoli	48,89	51,11	13,32
Sumatera Utara	43,58	56,42	8,21
Perkotaan	44,94	55,06	11,26
Perdesaan	39,66	60,34	4,60

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-4.7 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	6,88	4,91	5,85
Mandailing Natal	8,75	8,38	8,56
Tapanuli Selatan	9,19	8,77	8,98
Tapanuli Tengah	8,70	8,24	8,47
Tapanuli Utara	9,98	9,53	9,75
Toba Samosir	10,56	10,14	10,34
Labuhanbatu	9,25	9,06	9,16
Asahan	8,83	8,71	8,77
Simalungun	9,68	9,31	9,49
Dairi	9,74	9,16	9,45
Karo	9,52	9,53	9,52
Deli Serdang	10,25	9,98	10,12
Langkat	8,91	8,61	8,76
Nias Selatan	7,51	5,69	6,60
Humbang Hasundutan	9,78	9,11	9,44
Pakpak Bharat	8,94	8,24	8,59
Samosir	9,67	9,08	9,38
Serdang Bedagai	9,16	8,72	8,94
Batubara	8,35	8,05	8,20
Padang Lawas Utara	9,25	9,01	9,13
Padang Lawas	9,20	8,96	9,08
Labuhanbatu Selatan	9,09	8,96	9,03
Labuhanbatu Utara	8,64	8,47	8,56
Nias Utara	8,03	5,92	6,93
Nias Barat	8,23	6,19	7,13
Sibolga	10,00	10,11	10,06
Tanjungbalai	9,35	9,42	9,38
Pematangsiantar	11,10	10,81	10,94
Tebing Tinggi	10,55	10,25	10,39
Medan	11,46	11,35	11,41
Binjai	11,03	10,72	10,87
Padangsidempuan	10,84	10,87	10,86
Gunungsitoli	9,60	8,36	8,95
Sumatera Utara	9,78	9,45	9,61
Perkotaan	10,61	10,43	10,52
Perdesaan	8,80	8,28	8,54

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.1 Usia Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2017-2018

Kabupaten/Kota	2017		2018	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	67,15	71,10	67,40	71,34
Mandailing Natal	60,05	63,78	60,32	64,05
Tapanuli Selatan	62,32	66,13	62,57	66,41
Tapanuli Tengah	64,79	68,55	64,95	68,71
Tapanuli Utara	65,83	69,79	66,08	70,04
Toba Samosir	67,33	71,28	67,56	71,51
Labuhanbatu	67,53	71,35	67,69	71,51
Asahan	65,54	69,49	65,76	69,72
Simalungun	68,51	72,44	68,73	72,66
Dairi	66,09	70,06	66,36	70,36
Karo	68,75	72,67	68,95	72,87
Deli Serdang	69,10	73,00	69,30	73,20
Langkat	65,90	69,86	66,17	70,16
Nias Selatan	65,96	69,92	66,20	70,19
Humbang Hasundutan	66,37	70,33	66,65	70,61
Pakpak Bharat	63,07	66,91	63,27	67,16
Samosir	68,66	72,59	68,85	72,78
Serdang Bedagai	65,75	69,71	66,04	70,00
Batubara	64,10	67,98	64,38	68,26
Padang Lawas Utara	64,69	68,47	64,88	68,66
Padang Lawas	64,49	68,39	64,67	68,58
Labuhanbatu Selatan	66,29	70,06	66,54	70,31
Labuhanbatu Utara	66,87	70,83	67,05	71,01
Nias Utara	66,74	70,70	66,95	70,91
Nias Barat	66,24	70,21	66,46	70,43
Sibolga	66,01	69,98	66,31	70,29
Tanjungbalai	60,35	64,09	60,66	64,41
Pematangsiantar	70,66	74,48	70,95	74,79
Tebing Tinggi	68,25	72,19	68,43	72,38
Medan	70,43	74,27	70,67	74,51
Binjai	69,76	73,63	69,96	73,83
Padangsidempuan	66,51	70,34	66,83	70,66
Gunungsitoli	68,39	72,33	68,64	72,58
Sumatera Utara	66,49	70,29	66,73	70,52

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	18,17	21,81	20,04
Mandailing Natal	14,32	14,29	14,30
Tapanuli Selatan	8,16	8,76	8,46
Tapanuli Tengah	12,80	12,59	12,70
Tapanuli Utara	7,10	8,68	7,90
Toba Samosir	11,48	12,58	12,03
Labuhanbatu	7,48	8,47	7,97
Asahan	14,03	15,26	14,64
Simalungun	12,22	12,87	12,55
Dairi	10,79	8,76	9,78
Karo	12,33	13,38	12,86
Deli Serdang	8,52	8,84	8,68
Langkat	14,02	14,24	14,13
Nias Selatan	12,32	17,17	14,77
Humbang Hasundutan	8,61	8,00	8,31
Pakpak Bharat	10,20	12,53	11,35
Samosir	11,99	10,15	11,07
Serdang Bedagai	16,57	18,09	17,32
Batubara	13,82	13,84	13,83
Padang Lawas Utara	9,73	13,87	11,79
Padang Lawas	10,61	10,34	10,47
Labuhanbatu Selatan	8,71	8,03	8,37
Labuhanbatu Utara	10,61	10,54	10,58
Nias Utara	11,70	14,43	13,08
Nias Barat	22,10	23,49	22,83
Sibolga	10,13	11,58	10,85
Tanjungbalai	12,90	14,27	13,58
Pematangsiantar	9,19	10,66	9,94
Tebing Tinggi	10,39	12,57	11,49
Medan	8,77	9,39	9,09
Binjai	10,41	9,74	10,08
Padangsidempuan	11,99	11,58	11,78
Gunungsitoli	13,79	15,15	14,49
Sumatera Utara	11,03	11,73	11,38
Perkotaan	9,95	10,68	10,31
Perdesaan	12,25	12,91	12,58

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.3 Persentase Perempuan Berusia 10 Tahun ke Atas yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Usia Perkawinan Pertama, 2018

Kabupaten/Kota	Usia Perkawinan Pertama					Jumlah	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama
	10-16	17-18	19-24	25-34	35 +		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nias	8,97	16,89	58,47	13,29	2,38	100,00	21,12
Mandailing Natal	9,52	17,04	57,40	15,04	1,00	100,00	20,83
Tapanuli Selatan	6,10	16,27	59,44	17,30	0,90	100,00	21,38
Tapanuli Tengah	5,91	15,14	53,92	24,60	0,43	100,00	21,81
Tapanuli Utara	0,71	9,16	57,04	30,71	2,38	100,00	23,31
Toba Samosir	1,99	7,62	52,46	35,97	1,96	100,00	23,73
Labuhanbatu	6,10	13,46	61,32	17,81	1,31	100,00	21,72
Asahan	7,51	17,25	56,46	17,76	1,02	100,00	21,34
Simalungun	4,98	12,58	58,79	22,66	1,00	100,00	21,89
Dairi	1,57	9,18	53,45	34,63	1,17	100,00	23,16
Karo	5,69	12,48	57,44	23,19	1,20	100,00	21,77
Deli Serdang	4,57	14,65	56,21	24,13	0,44	100,00	21,81
Langkat	8,67	14,94	61,00	14,84	0,55	100,00	20,92
Nias Selatan	13,88	18,86	51,29	15,98	0,00	100,00	20,74
Humbang Hasundutan	3,05	8,54	58,49	28,55	1,38	100,00	22,89
Pakpak Bharat	2,06	13,15	60,52	22,13	2,14	100,00	22,34
Samosir	1,64	5,30	54,24	37,34	1,48	100,00	23,60
Serdang Bedagai	5,96	17,91	57,01	18,14	0,99	100,00	21,47
Batubara	12,08	15,95	54,97	16,24	0,77	100,00	20,95
Padang Lawas Utara	6,85	18,38	58,83	15,64	0,29	100,00	20,92
Padang Lawas	9,88	23,23	55,72	11,16	0,00	100,00	20,28
Labuhanbatu Selatan	5,80	16,24	63,88	13,29	0,78	100,00	20,99
Labuhanbatu Utara	8,11	17,82	55,21	18,32	0,54	100,00	21,10
Nias Utara	7,04	15,41	58,64	18,13	0,78	100,00	21,48
Nias Barat	5,39	17,69	49,58	25,24	2,10	100,00	22,09
Sibolga	4,04	11,79	54,03	28,93	1,22	100,00	22,61
Tanjungbalai	9,62	15,65	50,45	23,40	0,87	100,00	21,74
Pematangsiantar	1,00	8,98	57,22	31,30	1,49	100,00	23,28
Tebing Tinggi	5,03	8,73	56,40	27,25	2,59	100,00	22,86
Medan	2,21	8,66	55,02	32,29	1,81	100,00	23,15
Binjai	3,35	8,77	57,78	29,15	0,95	100,00	22,58
Padangsidempuan	6,60	15,79	55,10	21,77	0,75	100,00	21,75
Gunungsitoli	2,80	11,69	54,13	30,07	1,31	100,00	22,89
Sumatera Utara	5,53	13,63	56,81	23,00	1,03	100,00	21,92

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.4 Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat KB, 2018

Kabupaten/Kota	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tdk Pernah Menggunakan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	32,36	18,81	48,83	100,00
Mandailing Natal	25,23	19,97	54,80	100,00
Tapanuli Selatan	32,54	17,01	50,45	100,00
Tapanuli Tengah	37,47	8,71	53,82	100,00
Tapanuli Utara	31,68	12,21	56,10	100,00
Toba Samosir	24,11	19,70	56,19	100,00
Labuhanbatu	52,99	9,61	37,40	100,00
Asahan	50,06	12,13	37,81	100,00
Simalungun	45,79	8,03	46,17	100,00
Dairi	27,19	16,62	56,19	100,00
Karo	50,78	14,74	34,48	100,00
Deli Serdang	55,05	8,97	35,98	100,00
Langkat	54,98	10,77	34,25	100,00
Nias Selatan	29,40	12,92	57,69	100,00
Humbang Hasundutan	29,78	14,23	55,99	100,00
Pakpak Bharat	36,15	14,91	48,94	100,00
Samosir	31,61	4,96	63,43	100,00
Serdang Bedagai	55,41	12,54	32,05	100,00
Batubara	42,84	11,04	46,12	100,00
Padang Lawas Utara	38,08	18,36	43,56	100,00
Padang Lawas	35,69	16,91	47,40	100,00
Labuhanbatu Selatan	45,79	16,06	38,15	100,00
Labuhanbatu Utara	39,81	14,54	45,65	100,00
Nias Utara	35,73	11,33	52,95	100,00
Nias Barat	32,22	7,29	60,49	100,00
Sibolga	36,02	12,07	51,91	100,00
Tanjungbalai	38,94	11,45	49,60	100,00
Pematangsiantar	28,23	13,58	58,19	100,00
Tebing Tinggi	37,81	8,35	53,84	100,00
Medan	46,56	8,78	44,66	100,00
Binjai	41,47	9,12	49,41	100,00
Padangsidempuan	39,46	17,98	42,56	100,00
Gunungsitoli	33,79	11,69	54,51	100,00
Sumatera Utara	45,12	11,54	43,35	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.5 Persentase Perempuan Berusia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan					
	MOW	MOP	IUD	Suntikan	Susuk KB	Pil KB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	9,38	2,22	1,80	69,53	6,03	0,57
Mandailing Natal	0,00	1,03	2,27	69,41	6,31	7,33
Tapanuli Selatan	9,18	0,87	0,58	49,32	12,77	12,64
Tapanuli Tengah	9,66	0,00	3,47	35,79	20,84	16,20
Tapanuli Utara	32,29	0,98	1,48	29,19	23,28	2,49
Toba Samosir	32,77	1,30	10,99	14,81	20,18	4,64
Labuhanbatu	1,17	0,14	5,52	54,63	15,01	13,42
Asahan	8,82	0,55	1,97	35,77	14,01	21,68
Simalungun	10,48	0,00	2,97	36,49	15,06	9,07
Dairi	8,30	2,98	6,53	23,83	51,38	0,98
Karo	6,23	0,83	3,98	52,61	14,76	7,42
Deli Serdang	4,70	0,00	3,84	38,38	7,24	16,65
Langkat	6,38	0,00	1,85	37,93	4,57	33,15
Nias Selatan	6,37	1,95	1,68	60,43	12,32	9,11
Humbang Hasundutan	23,04	1,12	15,65	35,56	18,33	2,35
Pakpak Bharat	3,85	0,00	1,95	40,00	37,71	6,01
Samosir	17,23	1,05	29,24	14,93	31,03	1,55
Serdang Bedagai	5,25	0,00	1,79	43,47	5,00	31,02
Batubara	7,02	0,00	1,99	41,20	9,30	30,74
Padang Lawas Utara	2,52	0,00	4,14	54,44	11,58	15,59
Padang Lawas	1,64	0,97	0,67	58,96	4,39	21,90
Labuhanbatu Selatan	3,18	0,00	1,15	61,20	8,75	21,75
Labuhanbatu Utara	1,25	0,36	1,70	54,45	14,17	21,84
Nias Utara	3,98	0,00	6,01	73,93	6,84	5,44
Nias Barat	2,88	0,00	3,11	62,53	14,85	1,83
Sibolga	14,62	1,81	8,40	28,84	25,60	10,54
Tanjungbalai	2,88	0,41	1,53	45,76	2,10	35,52
Pematangsiantar	16,40	0,00	17,59	31,87	15,58	9,23
Tebing Tinggi	9,84	0,00	2,61	53,70	10,64	15,25
Medan	7,44	0,15	3,82	31,51	8,39	13,36
Binjai	12,73	0,00	6,01	33,49	10,10	29,65
Padangsidempuan	9,57	0,46	6,03	50,61	13,80	8,56
Gunungsitoli	29,21	0,85	15,84	37,16	3,07	1,78
Sumatera Utara	7,07	0,27	3,62	41,13	10,41	17,66

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.5. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan					Jumlah
	Kondom Pria	Kondom Perempuan	Metode Menyusui Alami	Pantang Berkala	Lainnya	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nias	6,68	0,00	2,05	1,75	0,00	100,00
Mandailing Natal	8,58	0,00	0,00	4,45	0,63	100,00
Tapanuli Selatan	2,56	0,00	0,49	5,60	5,99	100,00
Tapanuli Tengah	3,41	0,00	3,06	2,82	4,76	100,00
Tapanuli Utara	0,01	0,00	3,85	2,17	4,25	100,00
Toba Samosir	11,65	0,00	0,00	3,66	0,00	100,00
Labuhanbatu	5,51	0,00	0,00	3,92	0,67	100,00
Asahan	8,72	0,53	0,89	3,55	3,51	100,00
Simalungun	18,12	0,00	0,00	1,97	5,83	100,00
Dairi	2,26	0,00	0,00	3,73	0,00	100,00
Karo	9,60	0,44	1,62	2,52	0,00	100,00
Deli Serdang	25,25	0,00	0,83	2,72	0,39	100,00
Langkat	14,46	0,00	0,24	0,63	0,79	100,00
Nias Selatan	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Humbang Hasundutan	2,54	0,00	0,00	1,41	0,00	100,00
Pakpak Bharat	7,41	0,00	0,00	2,35	0,72	100,00
Samosir	3,73	1,25	0,00	0,00	0,00	100,00
Serdang Bedagai	7,42	0,00	1,31	1,34	3,40	100,00
Batubara	2,29	0,00	0,00	5,81	1,65	100,00
Padang Lawas Utara	9,28	0,00	0,00	1,24	1,21	100,00
Padang Lawas	7,97	0,00	0,62	2,34	0,55	100,00
Labuhanbatu Selatan	1,96	0,00	0,00	2,02	0,00	100,00
Labuhanbatu Utara	2,24	0,00	0,00	2,21	1,78	100,00
Nias Utara	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Nias Barat	8,79	1,29	1,03	3,69	0,00	100,00
Sibolga	9,66	0,00	0,00	0,53	0,00	100,00
Tanjungbalai	6,95	0,00	0,00	3,81	1,03	100,00
Pematangsiantar	5,82	0,00	0,00	3,49	0,00	100,00
Tebing Tinggi	2,38	0,00	0,00	5,59	0,00	100,00
Medan	26,92	0,00	0,82	6,93	0,65	100,00
Binjai	2,84	0,00	0,00	3,80	1,37	100,00
Padangsidempuan	3,57	0,00	6,35	1,05	0,00	100,00
Gunungsitoli	5,20	0,00	0,00	6,89	0,00	100,00
Sumatera Utara	14,43	0,06	0,71	3,23	1,42	100,00

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.6 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Merokok Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2017

Kabupaten/Kota	Laki-laki			
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Tidak Pernah	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	15,41	3,88	80,28	0,43
Mandailing Natal	47,26	3,99	48,43	0,32
Tapanuli Selatan	45,50	1,71	52,59	0,20
Tapanuli Tengah	42,92	1,56	55,52	0,01
Tapanuli Utara	41,75	0,94	57,31	0,00
Toba Samosir	43,46	1,59	54,95	0,00
Labuhanbatu	39,86	2,45	57,18	0,51
Asahan	40,00	2,89	56,03	1,09
Simalungun	43,04	3,22	53,32	0,42
Dairi	42,28	3,22	54,19	0,31
Karo	44,52	3,77	51,38	0,33
Deli Serdang	39,22	3,32	56,97	0,49
Langkat	40,55	3,24	55,92	0,29
Nias Selatan	13,86	5,71	79,32	1,11
Humbang Hasundutan	45,29	0,57	54,14	0,00
Pakpak Bharat	47,98	0,92	51,09	0,00
Samosir	42,16	2,34	55,02	0,49
Serdang Bedagai	45,20	1,29	53,21	0,31
Batubara	43,19	2,77	53,26	0,78
Padang Lawas Utara	50,46	1,86	47,45	0,23
Padang Lawas	50,83	1,63	47,54	0,00
Labuhanbatu Selatan	47,98	1,92	49,46	0,64
Labuhanbatu Utara	40,18	2,53	57,10	0,19
Nias Utara	23,76	6,71	69,38	0,15
Nias Barat	18,07	6,22	75,49	0,22
Sibolga	43,12	1,21	55,12	0,54
Tanjungbalai	43,88	3,83	52,29	0,00
Pematangsiantar	41,56	2,90	55,41	0,13
Tebing Tinggi	34,27	2,34	63,03	0,36
Medan	35,35	2,43	60,59	1,63
Binjai	34,96	3,14	61,67	0,23
Padangsidempuan	42,59	1,64	55,17	0,61
Gunungsitoli	22,27	3,08	74,64	0,00
Sumatera Utara	39,72	2,78	56,89	0,60

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.6. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Perempuan			
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Tidak Pernah	Tidak Tahu
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	0,06	0,05	98,93	0,96
Mandailing Natal	1,42	0,04	98,54	0,00
Tapanuli Selatan	0,70	0,82	98,36	0,12
Tapanuli Tengah	1,72	0,18	97,99	0,11
Tapanuli Utara	2,36	0,15	97,48	0,00
Toba Samosir	1,33	0,41	98,25	0,00
Labuhanbatu	1,08	0,06	98,09	0,76
Asahan	1,31	0,10	97,82	0,76
Simalungun	1,27	0,03	98,35	0,35
Dairi	0,91	0,23	98,54	0,31
Karo	0,53	0,16	99,17	0,13
Deli Serdang	0,77	0,45	98,37	0,41
Langkat	0,56	0,00	99,44	0,00
Nias Selatan	0,10	0,17	98,92	0,81
Humbang Hasundutan	0,63	0,00	99,37	0,00
Pakpak Bharat	0,32	0,00	99,68	0,00
Samosir	1,82	0,00	98,11	0,07
Serdang Bedagai	0,79	0,28	98,87	0,06
Batubara	1,07	0,50	98,43	0,00
Padang Lawas Utara	0,58	0,07	99,36	0,00
Padang Lawas	0,38	0,10	99,52	0,00
Labuhanbatu Selatan	0,95	0,24	98,78	0,03
Labuhanbatu Utara	1,36	0,15	98,41	0,08
Nias Utara	0,55	0,16	99,16	0,14
Nias Barat	0,11	0,00	99,49	0,40
Sibolga	1,54	0,33	98,12	0,00
Tanjungbalai	2,20	0,22	97,35	0,23
Pematangsiantar	1,74	0,23	97,51	0,53
Tebing Tinggi	0,69	0,30	99,01	0,00
Medan	1,38	0,23	96,90	1,50
Binjai	0,33	0,16	99,51	0,00
Padangsidempuan	2,28	0,63	97,09	0,00
Gunungsitoli	0,15	0,00	99,85	0,00
Sumatera Utara	1,04	0,22	98,29	0,45

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.6. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Laki-laki + Perempuan			
	Setiap Hari	Tidak Setiap Hari	Tidak Pernah	Tidak Tahu
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nias	7,54	1,92	89,85	0,70
Mandailing Natal	23,82	1,97	74,06	0,16
Tapanuli Selatan	22,89	1,26	75,69	0,16
Tapanuli Tengah	22,34	0,87	76,73	0,06
Tapanuli Utara	21,74	0,54	77,72	0,00
Toba Samosir	22,16	1,00	76,84	0,00
Labuhanbatu	20,64	1,27	77,45	0,64
Asahan	20,71	1,50	76,87	0,92
Simalungun	22,04	1,62	75,96	0,38
Dairi	21,50	1,72	76,47	0,31
Karo	22,30	1,95	75,52	0,23
Deli Serdang	20,08	1,89	77,58	0,45
Langkat	20,67	1,63	77,56	0,15
Nias Selatan	6,86	2,89	89,29	0,96
Humbang Hasundutan	22,75	0,28	76,97	0,00
Pakpak Bharat	24,49	0,47	75,04	0,00
Samosir	21,99	1,17	76,55	0,28
Serdang Bedagai	23,03	0,78	76,01	0,18
Batubara	22,19	1,64	75,78	0,39
Padang Lawas Utara	25,83	0,97	73,08	0,12
Padang Lawas	25,64	0,87	73,50	0,00
Labuhanbatu Selatan	24,72	1,09	73,86	0,34
Labuhanbatu Utara	20,98	1,35	77,53	0,13
Nias Utara	11,85	3,35	84,65	0,14
Nias Barat	8,68	2,97	88,03	0,32
Sibolga	22,35	0,77	76,61	0,27
Tanjungbalai	23,17	2,04	74,67	0,12
Pematangsiantar	21,08	1,53	77,06	0,33
Tebing Tinggi	17,24	1,31	81,27	0,18
Medan	18,12	1,31	79,00	1,56
Binjai	17,64	1,65	80,59	0,11
Padangsidempuan	21,94	1,12	76,64	0,30
Gunungsitoli	10,89	1,50	87,61	0,00
Sumatera Utara	20,30	1,50	77,68	0,53

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.7 Jumlah Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ke Sarana Pelayanan Kesehatan (K1-K4) menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil				
	Jumlah	K1	Persentase	K4	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)
Nias	4 233	3 223	76,1	3 223	76,1
Mandailing Natal	11 482	10 373	90,3	8 586	74,8
Tapanuli Selatan	7 053	6 644	94,2	6 597	93,5
Tapanuli Tengah	9 909	9 697	97,9	9 038	91,2
Tapanuli Utara	7 696	6 227	80,9	5 634	73,2
Toba Samosir	4 535	3 439	75,8	3 007	66,3
Labuhanbatu	12 143	11 919	98,2	11 037	90,9
Asahan	16 711	15 780	94,4	15 099	90,4
Simalungun	18 740	16 738	89,3	15 073	80,4
Dairi	7 227	6 182	85,5	6 128	84,8
Karo	9 591	7 797	81,3	7 295	76,1
Deli Serdang	49 005	48 570	99,1	47 157	96,2
Langkat	22 782	22 782	100,0	21 824	95,8
Nias Selatan	9 014	6 245	69,3	5 323	59,1
Humbang Hasundutan	4 461	2 852	63,9	3 317	74,4
Pakpak Bharat	1 402	1 317	93,9	1 298	92,6
Samosir	3 083	2 126	69,0	1 822	59,1
Serdang Bedagai	13 978	12 702	90,9	11 951	85,5
Batubara	9 900	9 863	99,6	9 372	94,7
Padang Lawas Utara	8 373	6 315	75,4	5 202	62,1
Padang Lawas	8 273	7 319	88,5	6 817	82,4
Labuhanbatu Selatan	9 116	8 439	92,6	8 040	88,2
Labuhanbatu Utara	9 170	8 564	93,4	7 845	85,6
Nias Utara	3 872	3 224	83,3	3 100	80,1
Nias Barat	2 461	1 926	78,3	1 717	69,8
Sibolga	2 043	2 013	98,5	1 917	93,8
Tanjungbalai	4 215	3 814	90,5	3 548	84,2
Pematangsiantar	4 886	4 562	93,4	4 000	81,9
Tebing Tinggi	3 429	3 379	98,5	3 163	92,2
Medan	42 932	41 246	96,1	39 250	91,4
Binjai	6 128	5 785	94,4	5 253	85,7
Padangsidempuan	4 887	4 501	92,1	4 291	87,8
Gunungsitoli	3 607	2 242	62,2	2 112	58,6
Sumatera Utara	336 337	307 805	91,52	289 036	85,94

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.8 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat Tablet zat Besi (Fe) menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Ibu Hamil		
	Jumlah	TTD (90 Tablet)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	4 233	3 233	76,38
Mandailing Natal	11 482	8 760	76,29
Tapanuli Selatan	7 053	6 597	93,53
Tapanuli Tengah	9 909	9 038	91,21
Tapanuli Utara	7 696	5 639	73,27
Toba Samosir	4 535	3 007	66,31
Labuhanbatu	12 143	10 501	86,48
Asahan	16 711	14 822	88,70
Simalungun	18 740	16 220	86,55
Dairi	7 227	3 756	51,97
Karo	9 591	7 000	72,99
Deli Serdang	49 005	47 169	96,25
Langkat	22 782	16 960	74,44
Nias Selatan	9 014	5 871	65,13
Humbang Hasundutan	4 461	3 460	77,56
Pakpak Bharat	1 402	1 260	89,87
Samosir	3 083	1 845	59,84
Serdang Bedagai	13 978	11 951	85,50
Batubara	9 900	9 261	93,55
Padang Lawas Utara	8 373	3 663	43,75
Padang Lawas	8 273	5 589	67,56
Labuhanbatu Selatan	9 116	8 040	88,20
Labuhanbatu Utara	9 170	6 790	74,05
Nias Utara	3 872	1 835	47,39
Nias Barat	2 461	2 530	102,80
Sibolga	2 043	1 917	93,83
Tanjungbalai	4 215	3 494	82,89
Pematangsiantar	4 886	4 350	89,03
Tebing Tinggi	3 429	3 178	92,68
Medan	42 932	39 240	91,40
Binjai	6 128	5 094	83,13
Padangsidempuan	4 887	4 267	87,31
Gunungsitoli	3 607	2 001	55,48
Sumatera Utara	336 337	278 338	82,76

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.9 Jumlah Puskesmas, Ibu Hamil dan Imunisasi Tetanus Difteri pada Ibu Hamil menurut Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi pada Ibu Hamil	
			Td1	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	10	4 233	2 335	55,16
Mandailing Natal	26	11 482	4 812	41,91
Tapanuli Selatan	16	7 053	3 287	46,6
Tapanuli Tengah	23	9 909	3 503	35,35
Tapanuli Utara	19	7 696	766	9,95
Toba Samosir	19	4 535	978	21,57
Labuhanbatu	13	12 143	5 177	42,63
Asahan	25	16 711	121	0,72
Simalungun	34	18 740	7 402	39,5
Dairi	18	7 227	5 917	81,87
Karo	19	9 591	0	0
Deli Serdang	34	49 005	6 699	13,67
Langkat	30	22 782	402	1,76
Nias Selatan	35	9 014	29	0,32
Humbang Hasundutan	12	4 461	1 387	31,09
Pakpak Bharat	8	1 402	401	28,6
Samosir	12	3 083	800	25,95
Serdang Bedagai	20	13 978	135	0,97
Batubara	15	9 900	133	1,34
Padang Lawas Utara	16	8 373	7 793	93,07
Padang Lawas	17	8 273	805	9,73
Labuhanbatu Selatan	17	9 116	2 779	30,48
Labuhanbatu Utara	17	9 170	6 528	71,19
Nias Utara	11	3 872	0	0
Nias Barat	8	2 461	728	29,58
Sibolga	5	2 043	870	42,58
Tanjungbalai	8	4 215	535	12,69
Pematangsiantar	19	4 886	2 168	44,37
Tebing Tinggi	9	3 429	1 296	37,8
Medan	41	42 932	12 538	29,2
Binjai	8	6 128	628	10,25
Padangsidempuan	10	4 887	2 380	48,7
Gunungsitoli	6	3 607	463	12,84
Sumatera Utara	580	336 337	83 795	24,91

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.9. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Imunisasi pada Ibu Hamil			
	Td2	Persentase	Td3	Persentase
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	3 223	76,1	3 223	76,1
Mandailing Natal	10 373	90,3	8 586	74,8
Tapanuli Selatan	6 644	94,2	6 597	93,5
Tapanuli Tengah	9 697	97,9	9 038	91,2
Tapanuli Utara	6 227	80,9	5 634	73,2
Toba Samosir	3 439	75,8	3 007	66,3
Labuhanbatu	11 919	98,2	11 037	90,9
Asahan	15 780	94,4	15 099	90,4
Simalungun	16 738	89,3	15 073	80,4
Dairi	6 182	85,5	6 128	84,8
Karo	7 797	81,3	7 295	76,1
Deli Serdang	48 570	99,1	47 157	96,2
Langkat	22 782	100,0	21 824	95,8
Nias Selatan	6 245	69,3	5 323	59,1
Humbang Hasundutan	2 852	63,9	3 317	74,4
Pakpak Bharat	1 317	93,9	1 298	92,6
Samosir	2 126	69,0	1 822	59,1
Serdang Bedagai	12 702	90,9	11 951	85,5
Batubara	9 863	99,6	9 372	94,7
Padang Lawas Utara	6 315	75,4	5 202	62,1
Padang Lawas	7 319	88,5	6 817	82,4
Labuhanbatu Selatan	8 439	92,6	8 040	88,2
Labuhanbatu Utara	8 564	93,4	7 845	85,6
Nias Utara	3 224	83,3	3 100	80,1
Nias Barat	1 926	78,3	1 717	69,8
Sibolga	2 013	98,5	1 917	93,8
Tanjungbalai	3 814	90,5	3 548	84,2
Pematangsiantar	4 562	93,4	4 000	81,9
Tebing Tinggi	3 379	98,5	3 163	92,2
Medan	41 246	96,1	39 250	91,4
Binjai	5 785	94,4	5 253	85,7
Padangsidempuan	4 501	92,1	4 291	87,8
Gunungsitoli	2 242	62,2	2 112	58,6
Sumatera Utara	307 805	91,52	289 036	85,94

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.9. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Imunisasi pada Ibu Hamil					
	Td4	Persen-tase	Td5	Persen-tase	Td2+	Persen-tase
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nias	391	9,24	80	1,89	3 293	77,79
Mandailing Natal	225	1,96	125	1,09	5 362	46,7
Tapanuli Selatan	798	11,31	929	13,17	5 677	80,49
Tapanuli Tengah	306	3,09	104	1,05	3 808	38,43
Tapanuli Utara	146	1,9	154	2	1 374	17,85
Toba Samosir	307	6,77	449	9,9	2 114	46,62
Labuhanbatu	163	1,34	21	0,17	7 180	59,13
Asahan	1 182	7,07	1 923	11,51	3 691	22,09
Simalungun	798	4,26	823	4,39	8 628	46,04
Dairi	0	0	0	0	5 719	79,13
Karo	0	0	0	0	0	0
Deli Serdang	3 376	6,89	3 041	6,21	15 186	30,99
Langkat	171	0,75	148	0,65	776	3,41
Nias Selatan	8	0,09	7 625	84,59	7 853	87,12
Humbang Hasundutan	436	9,77	448	10,04	2 434	54,56
Pakpak Bharat	98	6,99	64	4,56	674	48,07
Samosir	274	8,89	201	6,52	1 537	49,85
Serdang Bedagai	31	0,22	15	0,11	207	1,48
Batubara	486	4,91	341	3,44	1 581	15,97
Padang Lawas Utara	142	1,7	71	0,85	1 487	17,76
Padang Lawas	596	7,2	615	7,43	2 625	31,73
Labuhanbatu Selatan	1 771	19,43	1 895	20,79	8 413	92,29
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	6 869	74,91
Nias Utara	0	0	0	0	0	0
Nias Barat	81	3,29	57	2,32	756	30,72
Sibolga	355	17,38	270	13,22	2 001	97,94
Tanjungbalai	145	3,44	139	3,3	1 054	25,01
Pematangsiantar	0	0	0	0	2 209	45,21
Tebing Tinggi	13	0,38	5	0,15	1 337	38,99
Medan	2 168	5,05	2 303	5,36	17 957	41,83
Binjai	33	0,54	26	0,42	659	10,75
Padangsidempuan	35	0,72	33	0,68	2 621	53,63
Gunungsitoli	51	1,41	30	0,83	545	15,11
Sumatera Utara	14 586	4,34	21 935	6,52	125 627	37,35

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.10.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Laki-laki)

Kabupaten/Kota	% yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki			
		BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	45,33	90,70	8,60	0,00	0,69
Mandailing Natal	40,37	69,95	29,95	0,00	0,10
Tapanuli Selatan	40,17	62,37	22,40	12,71	3,86
Tapanuli Tengah	50,09	70,99	26,65	1,66	1,24
Tapanuli Utara	45,62	57,91	32,09	8,75	1,93
Toba Samosir	50,37	53,79	42,12	0,44	5,18
Labuhanbatu	51,20	42,70	25,97	30,27	5,47
Asahan	50,79	57,86	32,55	2,73	6,86
Simalungun	55,94	46,55	42,23	4,10	7,56
Dairi	43,19	68,94	28,90	1,15	1,02
Karo	52,63	48,35	48,31	1,19	2,56
Deli Serdang	42,84	40,53	33,98	6,42	19,88
Langkat	51,09	64,28	29,14	2,09	4,71
Nias Selatan	42,04	63,93	18,36	21,66	0,87
Humbang Hasundutan	48,85	66,07	20,96	17,60	1,37
Pakpak Bharat	89,32	86,08	13,62	0,30	0,00
Samosir	58,51	65,29	29,11	5,75	0,00
Serdang Bedagai	48,37	58,35	34,73	0,24	14,32
Batubara	47,04	54,87	37,95	1,39	7,72
Padang Lawas Utara	39,41	63,51	32,70	1,65	2,62
Padang Lawas	41,85	66,42	30,70	0,54	2,33
Labuhanbatu Selatan	53,94	37,40	28,88	31,45	14,58
Labuhanbatu Utara	70,15	30,06	17,69	63,43	3,90
Nias Utara	67,89	87,36	12,64	0,00	0,00
Nias Barat	64,71	90,62	9,38	0,00	0,00
Sibolga	77,49	72,82	23,96	1,54	1,67
Tanjungbalai	62,55	74,89	24,31	0,00	0,80
Pematangsiantar	68,77	40,51	49,09	0,00	10,75
Tebing Tinggi	87,05	49,53	25,24	56,38	5,31
Medan	70,46	38,92	40,41	10,58	16,81
Binjai	56,28	34,86	48,24	0,24	17,98
Padangsidempuan	50,19	56,81	38,86	1,73	3,09
Gunungsitoli	73,08	75,34	22,81	3,29	1,62
Sumatera Utara	53,72	51,29	33,44	9,54	9,50

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.10.2 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Perempuan)

Kabupaten/Kota	% yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki			
		BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	44,37	90,69	8,29	0,58	0,45
Mandailing Natal	42,56	69,85	30,06	0,00	0,09
Tapanuli Selatan	41,72	63,32	22,66	10,86	3,70
Tapanuli Tengah	47,76	72,80	24,65	2,00	1,55
Tapanuli Utara	44,46	54,06	35,36	9,83	2,85
Toba Samosir	50,19	48,91	45,57	0,44	6,17
Labuhanbatu	50,74	40,19	24,57	34,87	4,85
Asahan	49,85	57,96	32,86	3,32	5,86
Simalungun	54,09	49,11	41,58	3,08	6,75
Dairi	45,01	69,50	29,33	0,76	0,41
Karo	55,60	47,32	48,91	1,65	3,40
Deli Serdang	42,35	42,08	35,98	4,89	17,80
Langkat	50,96	65,86	27,74	1,46	5,10
Nias Selatan	36,33	66,22	17,70	20,33	0,27
Humbang Hasundutan	49,51	66,51	20,93	17,01	2,27
Pakpak Bharat	86,87	84,81	15,19	0,00	0,00
Samosir	57,62	63,93	32,00	4,07	0,00
Serdang Bedagai	46,65	57,80	36,84	0,08	12,72
Batubara	48,25	60,25	33,90	0,98	6,15
Padang Lawas Utara	41,04	58,87	37,85	2,23	1,69
Padang Lawas	42,09	64,46	34,26	0,31	0,97
Labuhanbatu Selatan	49,85	33,85	31,92	31,86	13,67
Labuhanbatu Utara	66,80	30,15	19,90	62,13	3,56
Nias Utara	69,42	87,78	12,22	0,00	0,00
Nias Barat	64,10	91,90	8,10	0,00	0,00
Sibolga	79,29	74,90	21,94	1,34	1,99
Tanjungbalai	67,46	73,77	25,48	0,00	0,75
Pematangsiantar	67,18	40,76	49,61	0,13	9,79
Tebing Tinggi	86,79	54,22	22,01	53,42	5,29
Medan	68,96	37,22	42,85	10,35	16,37
Binjai	55,11	36,39	48,90	1,04	15,20
Padangsidempuan	49,00	52,49	43,20	2,83	1,96
Gunungsitoli	71,18	74,18	23,44	3,53	2,41
Sumatera Utara	53,12	51,42	34,44	9,07	8,81

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.10.3 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan dan Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki menurut Kabupaten/Kota, 2018 (Laki-laki+Perempuan)

Kabupaten/Kota	% yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki			
		BPJS Kesehatan PBI	BPJS Kesehatan Non PBI	Jamkesda	Asuransi Swasta/Perusahaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	44,84	90,69	8,44	0,29	0,57
Mandailing Natal	41,49	69,90	30,01	0,00	0,09
Tapanuli Selatan	40,95	62,86	22,53	11,76	3,77
Tapanuli Tengah	48,93	71,87	25,68	1,82	1,39
Tapanuli Utara	45,03	55,99	33,73	9,29	2,39
Toba Samosir	50,28	51,33	43,85	0,44	5,68
Labuhanbatu	50,97	41,46	25,28	32,54	5,17
Asahan	50,32	57,91	32,70	3,02	6,37
Simalungun	55,01	47,81	41,91	3,60	7,16
Dairi	44,10	69,22	29,12	0,95	0,71
Karo	54,13	47,82	48,62	1,43	3,00
Deli Serdang	42,60	41,30	34,97	5,67	18,85
Langkat	51,02	65,06	28,45	1,78	4,91
Nias Selatan	39,16	65,00	18,05	21,04	0,59
Humbang Hasundutan	49,18	66,30	20,95	17,30	1,83
Pakpak Bharat	88,11	85,46	14,39	0,16	0,00
Samosir	58,06	64,62	30,54	4,92	0,00
Serdang Bedagai	47,51	58,08	35,76	0,16	13,54
Batubara	47,64	57,58	35,91	1,18	6,93
Padang Lawas Utara	40,22	61,15	35,32	1,95	2,15
Padang Lawas	41,97	65,44	32,48	0,43	1,65
Labuhanbatu Selatan	51,94	35,73	30,31	31,64	14,15
Labuhanbatu Utara	68,49	30,10	18,76	62,80	3,74
Nias Utara	68,67	87,58	12,42	0,00	0,00
Nias Barat	64,39	91,28	8,72	0,00	0,00
Sibolga	78,39	73,87	22,94	1,44	1,83
Tanjungbalai	64,99	74,31	24,92	0,00	0,77
Pematangsiantar	67,95	40,63	49,36	0,06	10,26
Tebing Tinggi	86,92	51,90	23,61	54,88	5,30
Medan	69,70	38,07	41,63	10,46	16,59
Binjai	55,69	35,62	48,57	0,63	16,60
Padangsidempuan	49,58	54,63	41,05	2,29	2,52
Gunungsitoli	72,11	74,76	23,13	3,41	2,02
Sumatera Utara	53,42	51,36	33,94	9,30	9,16

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-5.11 Jumlah Penderita HIV/AIDS Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, 2018

Kabupaten/Kota	HIV			AIDS		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	11	2	13	11	2	13
Mandailing Natal	14	1	15	0	0	0
Tapanuli Selatan	5	0	5	5	0	5
Tapanuli Tengah	28	23	51	0	0	0
Tapanuli Utara	12	12	24	3	0	3
Toba Samosir	50	38	88	0	0	0
Labuhanbatu	34	6	40	19	5	24
Asahan	55	18	73	122	58	180
Simalungun	16	16	32	0	0	0
Dairi	2	0	2	0	0	0
Karo	72	26	98	0	0	0
Deli Serdang	80	48	128	0	0	0
Langkat	18	6	24	0	0	0
Nias Selatan	1	0	1	0	0	0
Humbang Hasundutan	5	6	11	5	5	10
Pakpak Bharat	2	5	7	2	5	7
Samosir	7	4	11	0	0	0
Serdang Bedagai	22	5	27	94	55	149
Batubara	17	5	22	1	0	1
Padang Lawas Utara	0	0	0	11	2	13
Padang Lawas	5	2	7	3	0	3
Labuhanbatu Selatan	1	8	9	0	0	0
Labuhanbatu Utara	9	0	9	0	0	0
Nias Utara	0	0	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0	0	0
Sibolga	15	10	25	0	0	0
Tanjungbalai	8	5	13	0	0	0
Pematangsiantar	36	14	50	162	111	273
Tebing Tinggi	36	14	50	0	0	0
Medan	498	103	601	0	0	0
Binjai	11	7	18	4	3	7
Padangsidempuan	17	6	23	0	0	0
Gunungsitoli	10	11	21	0	0	0
Sumatera Utara	1 097	401	1 498	442	246	688

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	84,98	78,24	81,41
Mandailing Natal	82,82	65,02	73,59
Tapanuli Selatan	86,27	67,85	76,80
Tapanuli Tengah	86,18	64,81	75,43
Tapanuli Utara	87,74	80,14	83,80
Toba Samosir	84,64	75,35	79,89
Labuhanbatu	83,65	51,98	67,94
Asahan	84,43	50,85	67,63
Simalungun	84,38	62,48	73,28
Dairi	91,65	85,45	88,50
Karo	87,10	81,21	84,10
Deli Serdang	85,20	55,53	70,37
Langkat	85,70	56,89	71,33
Nias Selatan	82,97	75,29	79,03
Humbang Hasundutan	92,42	89,99	91,17
Pakpak Bharat	96,03	89,56	92,80
Samosir	86,83	78,93	82,78
Serdang Bedagai	84,79	51,91	68,28
Batubara	85,68	53,25	69,47
Padang Lawas Utara	89,80	68,23	78,91
Padang Lawas	82,42	61,30	71,78
Labuhanbatu Selatan	87,60	48,75	68,39
Labuhanbatu Utara	84,91	54,19	69,66
Nias Utara	82,89	76,67	79,69
Nias Barat	90,69	90,89	90,79
Sibolga	82,99	65,76	74,36
Tanjungbalai	84,83	55,60	70,23
Pematangsiantar	77,15	56,23	66,29
Tebing Tinggi	83,40	54,47	68,61
Medan	78,61	53,94	65,99
Binjai	83,24	50,67	66,78
Padangsidempuan	80,52	65,36	72,59
Gunungsitoli	77,54	59,57	68,07
Sumatera Utara	83,98	59,97	71,82
Perkotaan	81,96	55,61	68,57
Perdesaan	86,45	65,40	75,84

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	1,97	1,29	1,62
Mandailing Natal	4,51	4,32	4,43
Tapanuli Selatan	5,66	4,82	5,28
Tapanuli Tengah	7,79	4,53	6,38
Tapanuli Utara	0,89	1,96	1,42
Toba Samosir	1,99	2,33	2,15
Labuhanbatu	6,23	8,22	6,98
Asahan	3,74	7,78	5,26
Simalungun	4,76	5,55	5,10
Dairi	1,95	1,41	1,69
Karo	1,15	1,86	1,50
Deli Serdang	7,06	7,06	7,06
Langkat	4,68	4,64	4,67
Nias Selatan	3,69	3,85	3,77
Humbang Hasundutan	0,39	0,29	0,34
Pakpak Bharat	0,84	-	0,43
Samosir	1,66	1,02	1,35
Serdang Bedagai	3,99	6,90	5,10
Batubara	3,96	7,69	5,39
Padang Lawas Utara	3,37	2,87	3,15
Padang Lawas	5,10	2,78	4,10
Labuhanbatu Selatan	3,07	7,94	4,79
Labuhanbatu Utara	4,00	8,33	5,67
Nias Utara	2,87	1,92	2,40
Nias Barat	1,55	0,96	1,23
Sibolga	8,35	8,93	8,61
Tanjungbalai	5,42	5,82	5,58
Pematangsiantar	10,38	14,37	12,14
Tebing Tinggi	7,93	6,20	7,23
Medan	8,59	7,77	8,25
Binjai	7,50	7,25	7,40
Padangsidempuan	6,09	4,15	5,18
Gunungsitoli	6,90	4,77	5,92
Sumatera Utara	5,47	5,68	5,56
Perkotaan	7,02	7,03	7,03
Perdesaan	3,66	4,25	3,92

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.3 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Formal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	4 126	2 023	6 149
Mandailing Natal	37 101	23 692	60 793
Tapanuli Selatan	17 454	9 604	27 058
Tapanuli Tengah	38 860	18 239	57 099
Tapanuli Utara	12 871	12 149	25 020
Toba Samosir	12 024	9 943	21 967
Labuhanbatu	71 234	35 978	107 212
Asahan	109 169	57 508	166 677
Simalungun	100 456	51 831	152 287
Dairi	12 463	9 000	21 463
Karo	28 651	17 799	46 450
Deli Serdang	336 445	235 773	572 218
Langkat	145 755	84 491	230 246
Nias Selatan	10 776	6 120	16 896
Humbang Hasundutan	7 941	5 023	12 964
Pakpak Bharat	2 268	1 778	4 046
Samosir	6 842	4 897	11 739
Serdang Bedagai	92 200	38 822	131 022
Batubara	48 953	18 186	67 139
Padang Lawas Utara	22 455	13 304	35 759
Padang Lawas	16 911	8 602	25 513
Labuhanbatu Selatan	53 876	18 276	72 152
Labuhanbatu Utara	46 573	19 099	65 672
Nias Utara	7 823	3 495	11 318
Nias Barat	3 936	2 383	6 319
Sibolga	13 319	8 572	21 891
Tanjungbalai	31 337	17 570	48 907
Pematangsiantar	30 755	20 933	51 688
Tebing Tinggi	26 841	16 807	43 648
Medan	398 664	249 770	648 434
Binjai	47 771	22 809	70 580
Padangsidempuan	24 907	22 439	47 346
Gunungsitoli	14 103	10 123	24 226
Sumatera Utara	1 834 860	1 077 038	2 911 898
Perkotaan	1 219 435	767 422	1 986 857
Perdesaan	615 425	309 616	925 041

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.4 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Nias	28 756	32 215	60 971
Mandailing Natal	73 212	69 695	142 907
Tapanuli Selatan	54 587	50 838	105 425
Tapanuli Tengah	53 786	54 816	108 602
Tapanuli Utara	69 334	67 508	136 842
Toba Samosir	37 220	35 768	72 988
Labuhanbatu	57 955	41 299	99 254
Asahan	93 083	59 407	152 490
Simalungun	139 237	129 318	268 555
Dairi	68 223	69 212	137 435
Karo	91 475	97 893	189 368
Deli Serdang	263 675	155 275	418 950
Langkat	151 624	112 160	263 784
Nias Selatan	65 634	66 794	132 428
Humbang Hasundutan	44 356	49 201	93 557
Pakpak Bharat	12 054	11 623	23 677
Samosir	27 237	28 007	55 244
Serdang Bedagai	81 569	65 227	146 796
Batubara	66 550	50 740	117 290
Padang Lawas Utara	48 891	42 224	91 115
Padang Lawas	50 023	43 168	93 191
Labuhanbatu Selatan	38 855	29 688	68 543
Labuhanbatu Utara	51 955	40 089	92 044
Nias Utara	24 865	28 808	53 673
Nias Barat	17 820	23 333	41 153
Sibolga	9 355	9 357	18 712
Tanjungbalai	15 347	12 819	28 166
Pematangsiantar	30 539	25 217	55 756
Tebing Tinggi	17 153	13 823	30 976
Medan	192 519	179 328	371 847
Binjai	28 280	24 602	52 882
Padangsidempuan	29 465	26 996	56 461
Gunungsitoli	17 722	17 729	35 451
Sumatera Utara	2 052 356	1 088 212	3 816 533
Perkotaan	835 972	673 173	1 509 145
Perdesaan	1 216 384	1 091 004	2 307 388

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.5 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Pertanian, Perkebunan dan Perburuan		Pertambangan dan Penggalan	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	25 367	30 853	695	380
Mandailing Natal	49 005	42 580	11 723	972
Tapanuli Selatan	42 286	34 219	2 117	857
Tapanuli Tengah	42 822	30 771	1 842	-
Tapanuli Utara	57 190	52 550	857	-
Toba Samosir	24 191	22 629	622	-
Labuhanbatu	59 719	19 290	425	-
Asahan	92 613	23 236	287	-
Simalungun	126 754	86 586	1 291	-
Dairi	54 795	57 937	366	-
Karo	72 844	80 204	-	-
Deli Serdang	106 529	45 507	1 618	-
Langkat	123 594	39 035	4 823	-
Nias Selatan	56 618	60 504	117	-
Humbang Hasundutan	37 265	43 874	117	-
Pakpak Bharat	10 888	10 449	185	-
Samosir	20 341	19 651	-	139
Serdang Bedagai	81 803	26 545	1 279	-
Batubara	56 117	14 754	776	-
Padang Lawas Utara	46 728	33 400	557	-
Padang Lawas	40 597	28 111	333	-
Labuhanbatu Selatan	56 052	23 885	-	-
Labuhanbatu Utara	61 149	19 677	684	-
Nias Utara	20 416	25 739	68	-
Nias Barat	16 097	21 451	1 128	1 407
Sibolga	3 959	59	149	-
Tanjungbalai	13 644	208	102	-
Pematangsiantar	2 612	2 363	189	-
Tebing Tinggi	4 015	1 095	443	-
Medan	32 691	9 234	984	-
Binjai	7 992	1 188	1 496	317
Padangsidempuan	9 719	7 181	599	340
Gunungsitoli	7 668	11 952	541	350
Sumatera Utara	1 464 080	926 717	36 413	4 762
Perkotaan	331 186	123 113	13 332	942
Perdesaan	1 132 894	803 604	23 081	3 820

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.5 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Industri		Listrik, Gas dan Air Minum	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	1 347	340	-	-
Mandailing Natal	5 935	5 724	997	-
Tapanuli Selatan	4 194	4 262	967	-
Tapanuli Tengah	4 770	8 258	498	-
Tapanuli Utara	846	2 284	-	-
Toba Samosir	2 545	2 985	156	-
Labuhanbatu	5 763	7 328	319	-
Asahan	14 638	24 684	282	426
Simalungun	20 819	15 189	1 477	390
Dairi	577	1 061	544	-
Karo	2 310	2 590	421	397
Deli Serdang	98 112	67 666	2 277	1 745
Langkat	27 567	27 644	3 678	852
Nias Selatan	1 631	755	-	-
Humbang Hasundutan	1 217	329	267	140
Pakpak Bharat	60	-	56	-
Samosir	748	2 293	288	-
Serdang Bedagai	22 920	11 809	332	-
Batubara	10 901	12 387	-	-
Padang Lawas Utara	2 489	1 635	151	-
Padang Lawas	4 027	2 046	369	-
Labuhanbatu Selatan	4 860	861	383	-
Labuhanbatu Utara	8 587	7 352	105	-
Nias Utara	1 290	1 072	-	-
Nias Barat	74	-	-	-
Sibolga	996	2 025	160	59
Tanjungbalai	2 506	3 454	272	-
Pematangsiantar	6 067	5 514	618	131
Tebing Tinggi	5 124	3 013	-	-
Medan	104 053	41 123	5 428	3 338
Binjai	10 484	5 420	8	491
Padangsidempuan	5 922	2 934	404	-
Gunungsitoli	2 342	958	619	133
Sumatera Utara	385 721	274 995	21 076	8 102
Perkotaan	280 383	178 203	13 842	5 658
Perdesaan	105 338	96 792	7 234	2 444

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.5 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Konstruksi		Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	1 181	-	602	373
Mandailing Natal	7 029	-	16 610	26 917
Tapanuli Selatan	4 176	-	7 945	12 265
Tapanuli Tengah	9 483	219	10 662	19 524
Tapanuli Utara	4 624	-	7 043	13 463
Toba Samosir	4 987	-	6 208	10 422
Labuhanbatu	9 546	-	22 623	22 249
Asahan	18 353	-	36 167	32 317
Simalungun	20 703	-	32 074	42 688
Dairi	3 291	-	8 464	11 208
Karo	6 274	-	16 676	18 383
Deli Serdang	97 217	669	124 910	140 695
Langkat	30 053	-	44 602	59 619
Nias Selatan	2 678	256	3 797	5 459
Humbang Hasundutan	3 479	292	4 315	4 579
Pakpak Bharat	353	-	786	1 126
Samosir	2 337	-	3 814	6 327
Serdang Bedagai	16 390	-	23 830	42 318
Batubara	9 068	247	21 756	29 021
Padang Lawas Utara	3 471	214	7 545	10 603
Padang Lawas	3 199	-	8 742	14 804
Labuhanbatu Selatan	4 779	-	10 710	12 001
Labuhanbatu Utara	4 798	-	9 164	21 496
Nias Utara	3 241	236	1 826	1 604
Nias Barat	1 030	-	248	489
Sibolga	1 526	424	6 885	9 286
Tanjungbalai	3 470	355	9 919	13 093
Pematangsiantar	9 085	189	18 541	21 229
Tebing Tinggi	5 683	-	12 116	15 245
Medan	32 716	5 621	159 146	195 087
Binjai	9 866	-	21 069	23 421
Padangsidempuan	4 589	-	13 643	20 548
Gunungsitoli	5 862	-	4 639	6 402
Sumatera Utara	344 537	8 722	677 077	864 261
Perkotaan	214 004	7 055	500 515	598 807
Perdesaan	130 533	1 667	176 562	265 454

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.5 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi		Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	584	-	-	161
Mandailing Natal	4 479	507	1 615	977
Tapanuli Selatan	4 151	485	252	
Tapanuli Tengah	7 077	591	1 064	665
Tapanuli Utara	2 115	-	1 243	1 202
Toba Samosir	3 548	-	470	401
Labuhanbatu	11 248	-	6 151	1 469
Asahan	16 129	410	2 594	1 266
Simalungun	10 805	700	4 811	1 192
Dairi	4 678	-	662	675
Karo	6 976	847	588	509
Deli Serdang	64 066	5 095	21 066	6 697
Langkat	17 906	-	2 770	1 857
Nias Selatan	1 856	-	79	-
Humbang Hasundutan	1 217	-	560	374
Pakpak Bharat	531	-	-	-
Samosir	1 615	83	198	611
Serdang Bedagai	11 771	225	1 013	284
Batubara	5 248	-	781	464
Padang Lawas Utara	3 747		245	550
Padang Lawas	3 312	213	-	165
Labuhanbatu Selatan	5 186	-	1 140	-
Labuhanbatu Utara	3 862	295	2 381	160
Nias Utara	840	-	-	103
Nias Barat	282	-	-	-
Sibolga	2 561	196	797	364
Tanjungbalai	8 396	866	1 278	358
Pematangsiantar	7 249	878	1 782	1 815
Tebing Tinggi	5 508	-	3 983	1 117
Medan	105 591	17 348	36 225	20 495
Binjai	7 630	330	1 468	1 177
Padangsidempuan	8 201	103	1 111	806
Gunungsitoli	2 451	98	618	300
Sumatera Utara	340 816	29 270	96 945	46 214
Perkotaan	262 813	26 785	76 920	40 136
Perdesaan	78 003	2 485	20 025	6 078

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.5 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan		Total	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	3 106	2 131	32 882	34 238
Mandailing Natal	12 920	15 710	110 313	93 387
Tapanuli Selatan	5 953	8 354	72 041	60 442
Tapanuli Tengah	14 428	13 027	92 646	73 055
Tapanuli Utara	8 287	10 158	82 205	79 657
Toba Samosir	6 517	9 274	49 244	45 711
Labuhanbatu	13 395	26 941	129 189	77 277
Asahan	21 189	34 576	202 252	116 915
Simalungun	20 959	34 404	239 693	181 149
Dairi	7 309	7 331	80 686	78 212
Karo	14 037	12 762	120 126	115 692
Deli Serdang	84 325	122 974	600 120	391 048
Langkat	42 386	67 644	297 379	196 651
Nias Selatan	9 634	5 940	76 410	72 914
Humbang Hasundutan	3 860	4 636	52 297	54 224
Pakpak Bharat	1 463	1 826	14 322	13 401
Samosir	4 738	3 800	34 079	32 904
Serdang Bedagai	14 431	22 868	173 769	104 049
Batubara	10 856	12 053	115 503	68 926
Padang Lawas Utara	6 413	9 126	71 346	55 528
Padang Lawas	6 355	6 431	66 934	51 770
Labuhanbatu Selatan	9 621	11 217	92 731	47 964
Labuhanbatu Utara	7 798	10 208	98 528	59 188
Nias Utara	5 007	3 549	32 688	32 303
Nias Barat	2 897	2 369	21 756	25 716
Sibolga	5 641	5 516	22 674	17 929
Tanjungbalai	7 097	12 055	46 684	30 389
Pematangsiantar	15 151	14 031	61 294	46 150
Tebing Tinggi	7 122	10 160	43 994	30 630
Medan	114 349	136 852	591 183	429 098
Binjai	16 038	15 067	76 051	47 411
Padangsidempuan	10 184	17 523	54 372	49 435
Gunungsitoli	7 085	7 659	31 825	27 852
Sumatera Utara	520 551	678 172	3 887 216	2 841 215
Perkotaan	362 412	459 896	2 055 407	1 440 595
Perdesaan	158 139	218 276	1 831 809	1 400 620

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.6 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jam Kerja, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	0		1-14		15-34	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
Nias	-	338	5 511	6 422	15 651	18 351
Mandailing Natal	1 655	4 687	10 066	14 935	40 231	30 318
Tapanuli Selatan	2 525	4 061	6 231	7 076	34 408	29 282
Tapanuli Tengah	4 196	4 321	4 262	6 165	26 991	24 689
Tapanuli Utara	408	89	9 474	9 232	32 119	35 594
Toba Samosir	1 405	1 944	6 865	4 971	15 191	19 216
Labuhanbatu	2 793	2 672	7 656	10 637	33 961	23 965
Asahan	3 558	2 472	11 046	15 582	40 141	36 717
Simalungun	2 922	2 214	27 397	28 215	79 923	79 516
Dairi	1 734	1 740	7 134	9 175	35 719	44 356
Karo	-	1 329	7 612	10 672	34 102	27 787
Deli Serdang	3 515	2 711	12 278	35 352	77 496	99 351
Langkat	3 803	3 706	26 222	28 192	98 104	74 741
Nias Selatan	389	254	4 392	8 748	33 311	36 327
Humbang Hasundutan	303	454	6 084	5 939	22 716	28 458
Pakpak Bharat	89	-	1 129	1 642	6 205	6 295
Samosir	423	412	4 058	5 734	14 120	15 764
Serdang Bedagai	5 539	3 828	16 237	18 306	38 806	37 393
Batubara	2 243	2 822	8 349	13 184	32 434	21 765
Padang Lawas Utara	739	1 579	8 258	8 978	33 257	25 205
Padang Lawas	1 122	1 876	11 743	14 613	29 109	20 434
Labuhanbatu Selatan	1 097	327	6 296	2 770	28 935	22 090
Labuhanbatu Utara	1 190	585	10 048	10 785	26 519	17 517
Nias Utara	451	321	2 664	6 181	13 658	20 906
Nias Barat	172	242	2 380	3 236	13 379	18 470
Sibolga	769	167	756	1 786	2 653	3 489
Tanjungbalai	1 972	742	1 063	2 363	4 085	7 840
Pematangsiantar	150	338	1 311	2 484	6 408	10 364
Tebing Tinggi	1 247	571	1 336	3 179	5 720	7 028
Medan	3 835	4 202	12 062	23 113	56 771	78 195
Binjai	1 669	-	3 374	4 331	8 571	12 300
Padangsidempuan	2 016	2 326	3 630	5 196	13 094	15 101
Gunungsitoli	592	517	2 256	4 108	6 330	8 952
Sumatera Utara	54 521	53 847	249 180	333 302	960 118	957 776
Perkotaan	29 730	23 414	78902	121370	281 402	351 373
Perdesaan	24 791	30 433	170278	211932	678 716	606 403

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.6 Lanjutan

Kabupaten/Kota	35+		Total	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	11 720	9 127	32 882	34 238
Mandailing Natal	58 361	43 447	110 313	93 387
Tapanuli Selatan	28 877	20 023	72 041	60 442
Tapanuli Tengah	57 197	37 880	92 646	73 055
Tapanuli Utara	40 204	34 742	82 205	79 657
Toba Samosir	25 783	19 580	49 244	45 711
Labuhanbatu	84 779	40 003	129 189	77 277
Asahan	147 507	62 144	202 252	116 915
Simalungun	129 451	71 204	239 693	181 149
Dairi	36 099	22 941	80 686	78 212
Karo	78 412	75 904	120 126	115 692
Deli Serdang	506 831	253 634	600 120	391 048
Langkat	169 250	90 012	297 379	196 651
Nias Selatan	38 318	27 585	76 410	72 914
Humbang Hasundutan	23 194	19 373	52 297	54 224
Pakpak Bharat	6 899	5 464	14 322	13 401
Samosir	15 478	10 994	34 079	32 904
Serdang Bedagai	113 187	44 522	173 769	104 049
Batubara	72 477	31 155	115 503	68 926
Padang Lawas Utara	29 092	19 766	71 346	55 528
Padang Lawas	24 960	14 847	66 934	51 770
Labuhanbatu Selatan	56 403	22 777	92 731	47 964
Labuhanbatu Utara	60 771	30 301	98 528	59 188
Nias Utara	15 915	4 895	32 688	32 303
Nias Barat	5 825	3 768	21 756	25 716
Sibolga	18 496	12 487	22 674	17 929
Tanjungbalai	39 564	19 444	46 684	30 389
Pematangsiantar	53 425	32 964	61 294	46 150
Tebing Tinggi	35 691	19 852	43 994	30 630
Medan	518 515	323 588	591 183	429 098
Binjai	62 437	30 780	76 051	47 411
Padangsidempuan	35 632	26 812	54 372	49 435
Gunungsitoli	22 647	14 275	31 825	27 852
Sumatera Utara	2 623 397	1 496 290	3 887 216	2 841 215
Perkotaan	1 665 373	944 438	2 055 407	1 440 595
Perdesaan	958 024	551 852	1 831 809	1 400 620

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.7 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Tenaga profesional, teknisi dan sejenis		Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan		Tenaga tata usaha dan yang sejenis	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	1 548	1 359	717	-	454	456
Mandailing Natal	6 555	10 983	362	-	3 486	1 398
Tapanuli Selatan	3 020	6 281	914	-	2 745	1 138
Tapanuli Tengah	3 254	6 525	1 715	886	3 205	3 786
Tapanuli Utara	3 806	8 097	1 693	-	1 857	1 797
Toba Samosir	2 007	3 134	770	238	2 045	3 805
Labuhanbatu	6 015	15 286	1 159	534	6 412	5 573
Asahan	6 756	16 798	1 796	313	8 480	8 230
Simalungun	6 206	15 015	1 963	967	6 196	4 116
Dairi	2 626	4 833	1 907	370	2 013	1 503
Karo	4 478	7 999	1 041	669	4 394	2 229
Deli Serdang	28 323	45 156	5 928	2 056	24 784	18 174
Langkat	16 382	30 531	4 039	820	11 135	12 038
Nias Selatan	6 413	4 321	479	-	2 549	1 534
Humbang Hasundutan	890	2 200	592	301	860	596
Pakpak Bharat	453	763	143	46	722	456
Samosir	2 390	2 574	259	-	1 369	1 047
Serdang Bedagai	4 747	9 527	2 304	370	5 028	4 053
Batubara	2 667	5 444	478	253	3 583	2 181
Padang Lawas Utara	3 117	5 526	431	95	1 904	2 600
Padang Lawas	1 554	3 563	759	-	1 355	1 419
Labuhanbatu Selatan	2 792	4 828	381	156	3 825	1 158
Labuhanbatu Utara	2 257	6 731	335	-	2 784	2 584
Nias Utara	2 150	2 516	407	-	1 100	195
Nias Barat	1 600	1 875	398	-	749	275
Sibolga	1 338	2 063	114	179	2 276	2 041
Tanjungbalai	2 786	4 972	958	367	2 121	2 001
Pematangsiantar	4 101	5 250	997	331	5 590	7 382
Tebing Tinggi	3 024	4 055	912	778	2 230	2 609
Medan	40 235	67 102	16 327	3 526	50 229	54 173
Binjai	1 966	5 977	3 497	1 027	4 580	4 194
Padangsidempuan	3 428	7 207	863	-	4 830	3 658
Gunungsitoli	1 527	3 859	1 783	89	3 661	2 546
Sumatera Utara	180 411	322 350	56 421	14 371	178 551	160 945
Perkotaan	119 675	195 466	39 804	11 593	132 644	124 976
Perdesaan	60 736	126 884	16 617	2 778	45 907	35 969

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.7 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tenaga usaha penjualan		Tenaga usaha jasa		Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	175	75	324	418	25 160	30 853
Mandailing Natal	15 762	23 125	2 841	5 663	46 942	41 192
Tapanuli Selatan	7 756	10 249	1 285	3 167	41 577	34 014
Tapanuli Tengah	9 616	16 898	4 712	5 084	42 348	30 268
Tapanuli Utara	6 132	8 877	1 842	2 045	56 985	52 550
Toba Samosir	4 051	6 186	2 049	4 923	24 191	22 900
Labuhanbatu	18 825	19 598	7 844	6 619	56 423	19 070
Asahan	29 762	28 540	6 305	13 949	85 140	20 082
Simalungun	18 433	27 718	9 029	22 403	118 678	82 168
Dairi	7 447	9 368	8 927	5 919	47 465	54 068
Karo	12 367	16 420	3 488	3 177	72 556	79 793
Deli Serdang	113 366	133 502	13 911	58 002	92 855	43 305
Langkat	33 748	41 619	11 283	30 916	116 733	38 437
Nias Selatan	3 408	5 459	194	-	56 507	60 504
Humbang Hasundutan	2 738	3 134	1 658	1 673	37 265	43 874
Pakpak Bharat	649	953	39	174	10 888	10 449
Samosir	3 039	4 854	1 395	1 370	20 341	19 651
Serdang Bedagai	16 138	28 000	4 178	10 580	72 261	25 797
Batubara	15 511	19 658	6 577	9 175	54 112	14 514
Padang Lawas Utara	5 072	8 493	2 109	2 503	45 034	32 562
Padang Lawas	5 445	10 056	3 939	5 305	40 597	28 111
Labuhanbatu Selatan	8 760	11 008	2 164	3 694	48 354	22 482
Labuhanbatu Utara	8 005	18 013	3 460	5 414	48 461	18 248
Nias Utara	1 825	1 694	228	160	20 364	25 739
Nias Barat	248	489	-	-	16 097	21 451
Sibolga	4 969	7 008	1 688	2 089	3 513	59
Tanjungbalai	9 982	11 364	1 880	5 257	10 851	208
Pematangsiantar	14 700	14 062	3 803	6 708	2 389	2 202
Tebing Tinggi	10 189	12 724	1 850	5 094	3 376	780
Medan	140 028	169 646	41 289	77 096	27 926	7 580
Binjai	16 069	16 591	7 936	11 495	7 509	826
Padangsidempuan	10 918	16 544	2 014	6 529	9 551	7 116
Gunungsitoli	4 229	4 813	408	1 649	7 751	11 873
Sumatera Utara	559 362	706 738	160 649	318 250	1 370 200	902 726
Perkotaan	423 244	504 673	105 518	224 499	295 189	116 784
Perdesaan	136 118	202 065	55 131	93 751	1 075 011	785 942

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.7 Lanjutan

Kabupaten/Kota	Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar		Lainnya		Total	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	4 266	1 077	238	-	32 882	34 238
Mandailing Natal	32 871	11 026	1 494	-	110 313	93 387
Tapanuli Selatan	14 253	5 593	491	-	72 041	60 442
Tapanuli Tengah	26 496	9 608	1 300	-	92 646	73 055
Tapanuli Utara	9 420	6 291	470	-	82 205	79 657
Toba Samosir	13 269	4 525	862	-	49 244	45 711
Labuhanbatu	26 647	10 597	5 864	-	129 189	77 277
Asahan	57 422	29 003	6 591	-	202 252	116 915
Simalungun	74 034	28 427	5 154	335	239 693	181 149
Dairi	8 954	2 151	1 347	-	80 686	78 212
Karo	19 878	5 405	1 924	-	120 126	115 692
Deli Serdang	305 861	90 853	15 092	-	600 120	391 048
Langkat	99 097	42 290	4 962	-	297 379	196 651
Nias Selatan	6 674	1 096	186	-	76 410	72 914
Humbang Hasundutan	7 393	2 446	901	-	52 297	54 224
Pakpak Bharat	1 290	560	138	-	14 322	13 401
Samosir	4 678	3 408	608	-	34 079	32 904
Serdang Bedagai	65 138	25 722	3 975	-	173 769	104 049
Batubara	31 278	17 701	1 297	-	115 503	68 926
Padang Lawas Utara	13 198	3 749	481	-	71 346	55 528
Padang Lawas	12 384	3 316	901	-	66 934	51 770
Labuhanbatu Selatan	22 891	4 638	3 564	-	92 731	47 964
Labuhanbatu Utara	31 673	8 198	1 553	-	98 528	59 188
Nias Utara	6 467	1 999	147	-	32 688	32 303
Nias Barat	2 546	1 626	118	-	21 756	25 716
Sibolga	7 701	4 490	1 075	-	22 674	17 929
Tanjungbalai	16 588	6 220	1 518	-	46 684	30 389
Pematangsiantar	27 121	10 046	2 593	169	61 294	46 150
Tebing Tinggi	20 664	4 590	1 749	-	43 994	30 630
Medan	247 281	49 975	27 868	-	591 183	429 098
Binjai	30 923	7 301	3 571	-	76 051	47 411
Padangsidempuan	21 396	8 381	1 372	-	54 372	49 435
Gunungsitoli	11 881	2 940	585	83	31 825	27 852
Sumatera Utara	1 281 633	415 248	99 989	587	3 887 216	2 841 215
Perkotaan	864 994	262 435	74 339	169	2 055 407	1 440 595
Perdesaan	416 639	152 813	25 650	418	1 831 809	1 400 620

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.8 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pekerja Tidak Penuh, Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Agustus 2018

Kabupaten/Kota	Setengah Penganggur		Pekerja Paruh Waktu		Total	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	7 006	2 766	12 951	16 012	19 957	18 778
Mandailing Natal	21 221	11 123	19 256	27 299	40 477	38 422
Tapanuli Selatan	5 648	4 386	26 596	27 092	32 244	31 478
Tapanuli Tengah	11 520	7 331	14 420	20 885	25 940	28 216
Tapanuli Utara	7 191	6 089	27 378	31 642	34 569	37 731
Toba Samosir	4 402	3 778	14 064	18 452	18 466	22 230
Labuhanbatu	13 771	5 015	24 404	28 210	38 175	33 225
Asahan	10 713	4 377	34 163	45 568	44 876	49 945
Simalungun	19 565	9 081	63 906	81 225	83 471	90 306
Dairi	9 739	7 146	17 736	32 816	27 475	39 962
Karo	8 394	7 565	25 630	27 494	34 024	35 059
Deli Serdang	29 726	26 053	52 100	102 221	81 826	128
Langkat	38 907	20 026	65 442	70 265	104 349	90 291
Nias Selatan	17 919	13 011	13 683	19 794	31 602	32 805
Humbang Hasundutan	5 956	5 088	13 537	23 406	19 493	28 494
Pakpak Bharat	1 654	1 324	3 555	4 099	5 209	5 423
Samosir	3 455	2 214	11 463	17 372	14 918	19 586
Serdang Bedagai	12 557	13 890	31 232	37 564	43 789	51 454
Batubara	12 711	5 974	20 961	26 787	33 672	32 761
Padang Lawas Utara	10 525	6 617	21 976	24 231	32 501	30 848
Padang Lawas	13 116	6 163	22 348	26 970	35 464	33 133
Labuhanbatu Selatan	9 677	3 967	22 127	19 263	31 804	23 230
Labuhanbatu Utara	10 947	7 240	19 648	19 258	30 595	26 498
Nias Utara	5 010	5 704	8 511	17 488	13 521	23 192
Nias Barat	5 507	7 825	5 521	9 088	11 028	16 913
Sibolga	1 722	1 915	1 584	3 164	3 306	5 079
Tanjungbalai	1 895	1 945	2 444	7 089	4 339	9 034
Pematangsiantar	2 728	2 952	4 374	8 584	7 102	11 536
Tebing Tinggi	1 389	534	5 343	9 045	6 732	9 579
Medan	18 651	18 439	42 391	75 826	61 042	94 265
Binjai	1 893	5 454	7 828	10 510	9 721	15 964
Padangsidempuan	4 830	3 910	9 194	14 211	14 024	18 121
Gunungsitoli	2 408	2 510	5 521	9 825	7 929	12 335
Sumatera Utara	332 353	231 412	671 287	912 755	1 003	1 144
Perkotaan	101 710	93 648	214 455	346 803	316 165	440
Perdesaan	230 643	137 764	456 832	565 952	687 475	703

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Tabel L-6.9 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Agustus 2018

Kabupaten/Kota	≤ SD		SMP		SMA	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	0,48	-	-	-	7,32	10,28
Mandailing Natal	2,77	0,79	2,70	3,44	5,43	6,51
Tapanuli Selatan	1,95	0,82	3,25	2,12	7,65	14,44
Tapanuli Tengah	1,94	1,77	10,18	-	8,38	10,95
Tapanuli Utara	-	-	0,29	-	1,95	4,54
Toba Samosir	1,50	6,61	0,00	1,33	2,17	-
Labuhanbatu	5,17	2,01	4,28	4,67	5,92	10,32
Asahan	2,14	3,48	4,12	9,30	3,74	13,38
Simalungun	0,56	-	3,76	5,85	9,29	10,14
Dairi	-	-	2,92	-	1,59	2,40
Karo	2,11	-	-	4,15	-	3,06
Deli Serdang	5,97	0,72	5,22	6,12	4,07	10,38
Langkat	5,27	4,05	1,13	8,09	6,96	6,71
Nias Selatan	-	3,55	-	1,87	7,99	4,98
Humbang Hasundutan	-	1,01	-	-	0,77	-
Pakpak Bharat	-	-	-	-	3,52	-
Samosir	2,24	-	1,50	-	1,67	0,84
Serdang Bedagai	2,07	4,31	2,22	6,43	3,30	11,71
Batubara	1,69	-	4,73	6,97	9,34	20,52
Padang Lawas Utara	2,75	4,35	4,84	1,95	2,84	2,10
Padang Lawas	3,57	-	6,09	2,26	6,72	1,89
Labuhanbatu Selatan	1,93	1,05	-	5,76	4,92	17,96
Labuhanbatu Utara	2,33	7,14	3,57	5,59	3,20	19,39
Nias Utara	0,88	0,29	3,45	2,87	4,36	4,33
Nias Barat	2,43	1,05	-	1,76	2,57	-
Sibolga	1,33	2,59	2,39	2,77	9,64	15,08
Tanjungbalai	3,51	6,12	5,80	4,86	10,18	8,90
Pematangsiantar	2,33	-	10,99	7,54	15,06	21,05
Tebing Tinggi	1,09	3,68	10,39	1,92	13,18	5,22
Medan	13,39	3,16	7,95	1,36	7,89	8,13
Binjai	5,04	2,52	2,95	3,01	6,06	12,37
Padangsidempuan	4,08	-	2,04	-	6,16	6,15
Gunungsitoli	4,82	1,31	1,38	2,65	8,92	7,62
Sumatera Utara	3,51	1,93	4,04	3,95	5,99	8,92
Perkotaan	5,97	1,76	5,21	3,96	6,18	9,50
Perdesaan	2,06	2,01	2,94	3,94	5,70	8,01

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-6.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Agustus 2018

Kabupaten/Kota	SMK		D I/II/III		Universitas	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	-	-	35,55	39,79	-	-
Mandailing Natal	14,09	8,38	-	15,03	-	12,32
Tapanuli Selatan	22,90	8,27	-	-	-	4,19
Tapanuli Tengah	22,22	13,29	24,60	-	-	4,90
Tapanuli Utara	2,92	6,48	-	-	-	-
Toba Samosir	3,07	2,05	-	8,39	7,68	-
Labuhanbatu	8,47	17,36	47,61	15,16	5,91	12,45
Asahan	6,69	17,34	-	-	7,85	3,60
Simalungun	7,50	9,25	-	7,25	-	7,67
Dairi	4,63	5,58	-	-	-	8,60
Karo	4,98	-	-	-	-	-
Deli Serdang	12,70	12,97	-	7,65	13,28	2,71
Langkat	3,95	3,33	-	-	10,83	1,38
Nias Selatan	13,94	23,70	-	-	9,44	-
Humbang Hasundutan	-	-	9,36	-	-	-
Pakpak Bharat	-	-	-	-	-	-
Samosir	1,99	7,65	-	-	-	-
Serdang Bedagai	9,01	8,29	-	-	16,04	9,46
Batubara	3,73	33,45	-	-	-	-
Padang Lawas Utara	6,33	7,87	-	-	-	-
Padang Lawas	-	-	-	19,07	9,65	14,09
Labuhanbatu Selatan	6,70	24,93	-	7,98	7,80	6,74
Labuhanbatu Utara	4,82	-	70,54	-	6,31	5,69
Nias Utara	4,39	6,64	7,01	10,66	6,55	-
Nias Barat	-	-	-	-	-	-
Sibolga	10,63	5,65	14,50	8,33	16,18	12,54
Tanjungbalai	3,34	11,14	-	-	2,81	-
Pematangsiantar	8,87	21,74	-	23,81	8,48	3,70
Tebing Tinggi	2,87	6,73	-	11,50	11,16	12,15
Medan	10,73	11,01	6,90	7,20	5,33	11,00
Binjai	17,70	12,50	-	15,86	6,20	3,70
Padangsidempuan	13,98	12,78	-	-	5,87	2,79
Gunungsitoli	6,93	5,39	-	10,78	15,54	10,76
Sumatera Utara	9,29	10,36	4,99	6,17	6,85	6,46
Perkotaan	11,18	11,00	6,12	7,66	7,23	7,97
Perdesaan	5,79	9,14	3,05	3,58	5,36	2,76

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2018, BPS Provinsi Sumatera Utara

Catatan : - Tidak ada atau nol

Tabel L-9.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	0-5		6-12		13-17	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	0	0	1	1	1	2
Mandailing Natal	2	2	6	1	7	14
Tapanuli Selatan	3	4	7	20	1	9
Tapanuli Tengah	2	4	0	10	8	9
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	2	6	6	7	2	23
Labuhanbatu	1	3	8	5	22	26
Asahan	0	1	0	1	0	7
Simalungun	1	3	3	4	2	12
Dairi	1	5	3	8	3	7
Karo	3	4	3	5	1	8
Deli Serdang	14	12	12	29	18	33
Langkat	1	6	5	25	7	29
Nias Selatan	0	0	3	3	4	5
Humbang Hasundutan	0	1	0	1	0	3
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1
Samosir	1	1	0	4	0	4
Serdang Bedagai	0	8	1	16	2	18
Batubara	2	2	9	8	2	5
Padang Lawas Utara	0	2	12	4	0	4
Padang Lawas	0	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	0	1	6	4	7	9
Labuhanbatu Utara	1	7	2	17	13	18
Nias Utara	0	0	3	0	1	4
Nias Barat	0	0	0	0	1	1
Sibolga	0	1	1	2	1	0
Tanjungbalai	0	0	0	1	0	1
Pematangsiantar	0	6	2	5	13	13
Tebing Tinggi	2	14	3	22	8	43
Medan	27	30	36	31	15	48
Binjai	0	3	1	4	2	9
Padangsidempuan	2	1	2	1	2	0
Gunungsitoli	1	1	5	15	6	9
Sumatera Utara	66	128	140	254	149	376

Tabel L-9.1. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total
	18-24	25-44	45-49	60+	
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nias	0	0	0	0	5
Mandailing Natal	12	10	0	0	54
Tapanuli Selatan	4	4	0	1	53
Tapanuli Tengah	8	23	3	0	67
Tapanuli Utara	2	0	0	0	2
Toba Samosir	7	13	3	0	69
Labuhanbatu	3	11	1	0	80
Asahan	1	6	1	0	17
Simalungun	3	9	0	0	37
Dairi	10	20	10	0	67
Karo	2	2	3	2	33
Deli Serdang	22	44	8	1	193
Langkat	9	21	0	0	103
Nias Selatan	0	3	0	0	18
Humbang Hasundutan	0	6	0	0	11
Pakpak Bharat	1	0	0	0	2
Samosir	0	0	0	0	10
Serdang Bedagai	8	8	1	0	62
Batubara	1	10	0	0	39
Padang Lawas Utara	0	3	0	0	25
Padang Lawas	1	0	0	0	3
Labuhanbatu Selatan	0	1	0	0	28
Labuhanbatu Utara	2	17	6	0	83
Nias Utara	0	0	0	0	8
Nias Barat	0	0	0	0	2
Sibolga	0	3	1	0	9
Tanjungbalai	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	14	34	11	1	99
Tebing Tinggi	6	26	7	0	131
Medan	8	24	5	0	224
Binjai	1	7	0	0	27
Padangsidempuan	1	3	0	0	12
Gunungsitoli	2	10	0	0	49
Sumatera Utara	128	318	60	5	1 624

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan								Total
	Tidak Sekolah	PAUD	TK	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nias	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Mandailing Natal	4	0	0	7	6	14	0	23	54
Tapanuli Selatan	19	0	0	19	5	0	0	10	53
Tapanuli Tengah	5	0	0	10	11	8	2	31	67
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toba Samosir	6	0	3	7	25	6	0	22	69
Labuhanbatu	5	0	1	11	16	21	0	26	80
Asahan	1	0	0	2	0	6	0	8	17
Simalungun	1	0	0	0	2	5	0	29	37
Dairi	2	1	0	5	3	7	0	49	67
Karo	11	0	0	4	3	4	0	11	33
Deli Serdang	12	0	4	44	31	21	1	80	93
Langkat	7	1	1	25	21	12	0	36	63
Nias Selatan	1	0	0	2	2	3	0	10	18
Humbang Hasundutan	1	0	0	1	1	1	0	7	11
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Samosir	1	0	0	4	2	2	0	1	10
Serdang Bedagai	3	0	0	11	10	8	0	30	62
Batubara	6	0	0	16	3	4	0	10	39
Padang Lawas Utara	1	0	0	12	3	1	0	8	25
Padang Lawas	0	0	0	0	2	0	0	1	3
Labuhanbatu Selatan	0	1	0	9	8	10	0	0	28
Labuhanbatu Utara	10	0	0	17	11	18	0	27	83
Nias Utara	0	0	0	3	4	1	0	0	8
Nias Barat	1	0	0	1	0	0	0	0	2
Sibolga	0	0	0	3	1	1	0	4	9
Tanjungbalai	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Pematangsiantar	6	0	1	6	14	21	2	49	99
Tebing Tinggi	9	0	0	17	22	37	1	45	61
Medan	47	0	5	51	33	40	0	48	124
Binjai	2	0	0	1	10	3	0	11	27
Padangsidempuan	2	0	3	2	0	0	0	5	12
Gunungsitoli	0	0	2	14	3	1	1	28	49
Sumatera Utara	164	3	20	304	253	256	7	617	124

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.3 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							
	0-17 Tahun							
	Belum Kawin		Kawin		Cerai		Tidak Diketahui	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	0	0	0	0	0	0	2	3
Mandailing Natal	15	17	0	0	0	0	0	0
Tapanuli Selatan	11	33	0	0	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	8	22	1	0	0	0	2	0
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	7	32	0	0	0	0	3	4
Labuhanbatu	29	30	0	0	0	0	2	4
Asahan	0	8	0	0	0	0	0	1
Simalungun	1	3	0	0	0	0	5	16
Dairi	4	13	0	0	0	0	3	7
Karo	6	17	0	0	0	0	1	0
Deli Serdang	40	65	0	0	0	0	4	9
Langkat	13	53	0	2	0	0	0	5
Nias Selatan	5	3	0	0	0	0	2	5
Humbang Hasundutan	0	2	0	0	0	0	0	3
Pakpak Bharat	0	1	0	0	0	0	0	0
Samosir	1	8	0	0	0	0	0	1
Serdang Bedagai	3	41	0	0	0	0	0	1
Batubara	11	15	2	0	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	12	3	0	0	0	0	0	7
Padang Lawas	0	2	0	0	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	9	10	0	1	0	0	4	3
Labuhanbatu Utara	14	40	0	0	0	0	2	2
Nias Utara	4	4	0	0	0	0	0	0
Nias Barat	1	1	0	0	0	0	0	0
Sibolga	2	3	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	1	0	0	0	0	0	1
Pematangsiantar	15	24	0	0	0	0	0	0
Tebing Tinggi	11	75	0	0	0	0	2	4
Medan	75	98	2	0	0	1	3	8
Binjai	3	16	0	0	0	0	0	0
Padangsidempuan	5	2	0	0	0	0	1	0
Gunungsitoli	5	14	0	1	0	0	7	10
Sumatera Utara	310	656	5	4	0	1	43	94

Tabel L-9.3. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total
	18 Tahun Ke Atas				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai	Tidak Diketahui	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nias	0	0	0	0	5
Mandailing Natal	9	5	4	4	54
Tapanuli Selatan	1	8	0	0	53
Tapanuli Tengah	6	26	0	2	67
Tapanuli Utara	1	0	0	1	2
Toba Samosir	3	12	0	8	69
Labuhanbatu	1	11	1	2	80
Asahan	0	7	1	0	17
Simalungun	1	2	0	9	37
Dairi	4	11	0	25	67
Karo	2	7	0	0	33
Deli Serdang	21	49	1	4	193
Langkat	3	22	0	5	103
Nias Selatan	0	3	0	0	18
Humbang Hasundutan	0	5	0	1	11
Pakpak Bharat	1	0	0	0	2
Samosir	0	0	0	0	10
Serdang Bedagai	3	8	0	6	62
Batubara	2	8	1	0	39
Padang Lawas Utara	0	3	0	0	25
Padang Lawas	0	0	0	1	3
Labuhanbatu Selatan	0	1	0	0	28
Labuhanbatu Utara	3	18	0	4	83
Nias Utara	0	0	0	0	8
Nias Barat	0	0	0	0	2
Sibolga	0	4	0	0	9
Tanjungbalai	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	8	45	0	7	99
Tebing Tinggi	3	22	2	12	131
Medan	4	24	3	6	224
Binjai	3	4	1	0	27
Padangsidempuan	1	2	0	1	12
Gunungsitoli	0	6	0	6	49
Sumatera Utara	80	313	14	104	1 624

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.4 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Kegiatan Utama, dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	0-17 Tahun					
	Tidak Bekerja		Bekerja		Pelajar	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	2	2	2	1	11	14
Tapanuli Selatan	8	12	0	0	3	21
Tapanuli Tengah	2	2	0	0	8	19
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	1	3	0	1	7	28
Labuhanbatu	2	4	2	0	25	26
Asahan	0	1	0	0	0	7
Simalungun	0	3	0	0	1	4
Dairi	0	2	0	1	4	11
Karo	2	5	2	5	2	6
Deli Serdang	5	16	1	1	31	46
Langkat	5	10	0	1	8	47
Nias Selatan	1	0	0	1	4	2
Humbang Hasundutan	0	0	0	1	0	1
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1
Samosir	1	0	0	0	0	8
Serdang Bedagai	0	6	0	0	3	28
Batubara	3	2	0	0	10	13
Padang Lawas Utara	0	0	0	0	12	3
Padang Lawas	0	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	0	1	1	1	12	11
Labuhanbatu Utara	0	9	0	0	14	32
Nias Utara	0	0	0	0	4	4
Nias Barat	0	0	1	1	0	0
Sibolga	0	0	0	0	2	2
Tanjungbalai	0	1	0	1	0	0
Pematangsiantar	4	12	0	0	11	12
Tebing Tinggi	3	10	0	2	8	58
Medan	27	31	3	5	44	66
Binjai	1	2	0	1	1	11
Padangsidempuan	1	0	0	0	4	2
Gunungsitoli	5	2	0	0	0	13
Sumatera Utara	73	136	12	23	229	498

Tabel L-9.4. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17 Tahun			
	Ibu Rumah Tangga		Tidak Diketahui	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nias	0	0	2	3
Mandailing Natal	0	0	0	0
Tapanuli Selatan	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	0	2
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	2	4
Labuhanbatu	0	0	2	4
Asahan	0	0	0	1
Simalungun	0	0	5	12
Dairi	0	0	3	6
Karo	0	0	1	1
Deli Serdang	1	0	6	11
Langkat	0	0	0	2
Nias Selatan	0	0	2	5
Humbang	0	0	0	3
Hasundutan				
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	1
Serdang Bedagai	0	0	0	8
Batubara	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	7
Padang Lawas	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	1	0	0
Labuhanbatu Utara	0	0	2	1
Nias Utara	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0
Sibolga	0	0	0	1
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	0	2	9
Medan	0	1	4	6
Binjai	0	0	1	2
Padangsidempuan	0	0	1	0
Gunungsitoli	0	0	7	10
Sumatera Utara	1	2	40	99

Tabel L-9.4. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					Total
	18 Tahun Ke Atas					
	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Ibu Rumah Tangga	Tidak Diketahui	
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nias	0	0	0	0	0	5
Mandailing Natal	5	10	3	0	4	54
Tapanuli Selatan	1	3	0	5	0	53
Tapanuli Tengah	4	16	0	13	1	67
Tapanuli Utara	0	0	1	0	1	2
Toba Samosir	0	6	2	8	7	69
Labuhanbatu	1	4	0	8	2	80
Asahan	0	2	0	6	0	17
Simalungun	0	4	0	2	6	37
Dairi	1	13	0	1	25	67
Karo	1	7	0	1	0	33
Deli Serdang	11	25	4	28	7	193
Langkat	1	2	1	22	4	103
Nias Selatan	0	2	0	1	0	18
Humbang Hasundutan	0	2	0	3	1	11
Pakpak Bharat	1	0	0	0	0	2
Samosir	0	0	0	0	0	10
Serdang Bedagai	2	3	0	8	4	62
Batubara	1	5	0	5	0	39
Padang Lawas Utara	1	2	0	0	0	25
Padang Lawas	0	0	0	0	1	3
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	1	0	28
Labuhanbatu Utara	1	5	0	17	2	83
Nias Utara	0	0	0	0	0	8
Nias Barat	0	0	0	0	0	2
Sibolga	0	2	0	2	0	9
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	3	19	4	28	6	99
Tebing Tinggi	1	12	1	14	11	131
Medan	2	12	1	18	4	224
Binjai	2	1	1	4	0	27
Padangsidempuan	0	2	1	0	1	12
Gunungsitoli	0	5	0	1	6	49
Sumatera Utara	39	164	19	196	93	1 624

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.4.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Status Pekerjaan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							
	0-17 Tahun							
	Swasta/Buruh		PNS/TNI/Polri		Pedagang/Tani/ Nelayan		Lainnya	
	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan	Laki- Laki	Perem- puan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	2	0	0	0	0	0	0	1
Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	0	1	0	0	0	0	0	0
Labuhanbatu	1	0	0	0	0	0	1	0
Asahan	0	0	0	0	0	0	0	0
Simalungun	0	0	0	0	0	0	0	0
Dairi	0	1	0	0	0	0	0	0
Karo	0	1	0	0	0	1	2	3
Deli Serdang	1	0	0	0	0	0	0	1
Langkat	0	1	0	0	0	0	0	0
Nias Selatan	0	0	0	0	0	0	0	1
Humbang Hasundutan	0	1	0	0	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	0	0	0	0	0
Serdang Bedagai	0	0	0	0	0	0	0	0
Batubara	0	0	0	0	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	1	0	0	0	0	0	0	1
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Nias Barat	0	1	0	0	1	0	0	0
Sibolga	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	1	0	0	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	0	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	2	0	0	0	0	0	0
Medan	0	2	0	0	0	0	3	3
Binjai	0	1	0	0	0	0	0	0
Padangsidempuan	0	0	0	0	0	0	0	0
Gunungsitoli	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	5	12	0	0	1	1	6	10

Tabel L-9.4.1. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total
	18 Tahun Ke Atas				
	Swasta/ Buruh	PNS/TNI/ Polri	Pedagang/Tani/ Nelayan	Lainnya	
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Nias	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	2	0	5	3	13
Tapanuli Selatan	2	0	1	0	3
Tapanuli Tengah	10	2	3	1	16
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0
Toba Samosir	2	2	0	2	7
Labuhanbatu	2	1	1	0	6
Asahan	2	0	0	0	2
Simalungun	3	0	1	0	4
Dairi	1	2	7	3	14
Karo	1	3	2	1	14
Deli Serdang	15	1	3	6	27
Langkat	1	0	0	1	3
Nias Selatan	0	1	1	0	3
Humbang Hasundutan	0	2	0	0	3
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	0	0
Serdang Bedagai	1	0	1	1	3
Batubara	0	1	0	4	5
Padang Lawas Utara	1	0	1	0	2
Padang Lawas	0	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Utara	5	0	0	0	5
Nias Utara	0	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0	2
Sibolga	1	0	1	0	2
Tanjungbalai	0	0	0	0	1
Pematangsiantar	3	5	0	11	19
Tebing Tinggi	5	5	1	1	14
Medan	6	1	1	4	20
Binjai	0	1	0	0	2
Padangsidempuan	1	0	0	1	2
Gunungsitoli	1	2	1	1	5
Sumatera Utara	65	29	30	40	199

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.5 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Jenis Kekerasan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							
	0-17 Tahun							
	Fisik		Psikis		Seksual		Trafficking	
(1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Laki-Laki (4)	Perempuan (5)	Laki-Laki (6)	Perempuan (7)	Laki-Laki (8)	Perempuan (9)
Nias	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	0	0	0	0	1	4	0	1
Tapanuli Selatan	3	3	0	0	8	30	0	0
Tapanuli Tengah	8	7	6	20	3	17	0	1
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	5	4	3	2	1	31	0	0
Labuhanbatu	16	9	1	4	6	28	0	0
Asahan	0	1	0	0	0	7	0	0
Simalungun	0	0	0	0	2	10	0	0
Dairi	4	5	2	10	0	12	0	0
Karo	0	1	0	2	0	10	1	1
Deli Serdang	14	8	2	2	5	52	0	2
Langkat	6	3	0	3	6	45	0	1
Nias Selatan	5	1	0	0	2	2	0	0
Humbang Hasundutan	0	1	0	2	0	3	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1	0	0
Samosir	0	1	1	0	0	7	0	0
Serdang Bedagai	3	12	0	14	0	32	0	0
Batubara	5	3	7	9	0	8	0	0
Padang Lawas Utara	0	2	0	0	12	9	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0	0	2	0	0
Labuhanbatu Selatan	4	4	4	9	5	11	0	0
Labuhanbatu Utara	11	8	0	0	0	28	0	0
Nias Utara	1	0	0	0	2	4	0	0
Nias Barat	1	0	0	0	0	1	0	0
Sibolga	0	0	0	0	1	3	0	0
Tanjungbalai	0	1	0	0	0	0	0	1
Pematangsiantar	10	8	3	5	3	12	0	0
Tebing Tinggi	6	17	3	21	1	57	0	0
Medan	17	18	7	12	2	39	1	3
Binjai	1	0	1	1	2	13	0	1
Padangsidempuan	1	1	3	3	1	1	0	0
Gunungsitoli	4	3	6	4	0	4	0	0
Sumatera Utara	125	121	49	123	63	483	2	11

Tabel L-9.5. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	0-17 Tahun					
	Penelantaran		Eksplotasi		Lainnya	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Nias	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	7	4	5	7	2	1
Tapanuli Selatan	0	0	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	0	0	0	1
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	0	0	1	1
Labuhanbatu	0	0	0	1	10	4
Asahan	0	1	0	0	0	0
Simalungun	0	0	0	0	0	3
Dairi	0	0	0	0	0	0
Karo	8	7	4	5	3	2
Deli Serdang	19	11	1	0	10	12
Langkat	1	2	0	0	0	4
Nias Selatan	0	0	0	0	0	1
Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	0
Samosir	0	1	0	0	0	0
Serdang Bedagai	1	0	0	0	0	1
Batubara	10	11	0	0	0	1
Padang Lawas Utara	0	0	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	5	4	0	0	2	0
Labuhanbatu Utara	3	6	0	0	2	3
Nias Utara	0	0	0	0	1	0
Nias Barat	0	0	0	0	0	0
Sibolga	0	0	0	0	1	0
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	0
Pematangsiantar	3	2	0	0	0	3
Tebing Tinggi	4	5	0	0	1	0
Medan	45	48	0	2	33	26
Binjai	0	0	0	0	0	2
Padangsidempuan	2	0	0	0	1	0
Gunungsitoli	0	0	0	0	0	1
Sumatera Utara	108	102	10	15	67	66

Tabel L-9.5. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							Total
	18 +							
	Fisik	Psikis	Seksual	Traffick- ing	Penelan- taran	Eksploi- tasi	Lainnya	
(1)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Nias	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	0	0	0	0	2	6	10	50
Tapanuli Selatan	0	0	1	0	1	0	7	53
Tapanuli Tengah	26	30	8	0	12	0	0	139
Tapanuli Utara	0	0	1	0	0	0	0	1
Toba Samosir	10	2	2	0	4	0	0	66
Labuhanbatu	5	1	1	0	5	0	1	92
Asahan	3	2	0	0	6	0	0	20
Simalungun	4	1	1	0	0	0	2	23
Dairi	11	13	3	0	2	0	0	62
Karo	5	6	1	0	1	0	2	59
Deli Serdang	41	5	9	9	8	0	2	212
Langkat	11	4	2	1	7	0	1	97
Nias Selatan	2	0	0	0	1	0	0	14
Humbang Hasundutan	3	1	1	0	1	0	0	12
Pakpak Bharat	0	0	1	0	0	0	0	2
Samosir	0	0	0	0	0	0	0	10
Serdang Bedagai	7	2	5	0	0	0	2	79
Batubara	4	2	2	4	3	0	1	70
Padang Lawas Utara	3	3	0	0	0	0	0	29
Padang Lawas	0	0	0	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	0	1	0	0	1	0	0	50
Labuhanbatu Utara	13	2	5	0	3	0	0	84
Nias Utara	0	0	0	0	0	0	0	8
Nias Barat	0	0	0	0	0	0	0	2
Sibolga	1	2	0	0	1	0	0	9
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	31	22	14	0	9	1	0	126
Tebing Tinggi	25	5	2	0	4	0	1	152
Medan	10	11	1	1	23	0	7	306
Binjai	3	2	3	0	1	0	1	31
Padangsidempuan	1	4	0	0	1	0	0	19
Gunungsitoli	7	10	0	0	2	0	0	41
Sumatera Utara	226	131	63	15	98	7	37	1 922

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.6 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Tempat Kejadian Kekerasan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	0-17 Tahun					
	Rumah Tangga		Tempat Kerja		Fasilitas Umum	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Nias	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	9	7	0	0	6	8
Tapanuli Selatan	1	2	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	4	7	0	0	2	9
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	5	15	0	0	3	3
Labuhanbatu	5	12	1	1	4	2
Asahan	0	1	0	0	0	0
Simalungun	0	4	0	0	0	0
Dairi	0	1	0	0	1	9
Karo	1	2	0	0	0	3
Deli Serdang	16	39	0	1	4	7
Langkat	5	21	0	0	1	10
Nias Selatan	5	0	0	1	1	0
Humbang Hasundutan	0	3	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	0
Samosir	1	3	0	1	0	1
Serdang Bedagai	2	13	0	0	0	1
Batubara	6	10	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	1	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	6	3	1	0	3	6
Labuhanbatu Utara	3	23	0	0	1	1
Nias Utara	1	2	0	0	0	0
Nias Barat	0	1	0	0	0	0
Sibolga	1	3	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	2	0	0	0	0
Pematangsiantar	4	7	0	1	10	10
Tebing Tinggi	5	32	0	0	6	16
Medan	49	59	0	0	8	9
Binjai	0	6	1	0	1	0
Padangsidempuan	5	1	0	0	0	0
Gunungsitoli	2	3	0	0	0	0
Sumatera Utara	136	283	3	5	51	95

Tabel L-9.6. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur					
	0-17 Tahun					
	Lembaga Pendidikan Klat		Sekolah		Lainnya	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nias	0	0	0	0	2	3
Mandailing Natal	0	0	0	1	0	1
Tapanuli Selatan	0	0	1	1	8	22
Tapanuli Tengah	0	0	2	1	2	5
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	2	0	0	4
Labuhanbatu	0	0	0	1	14	16
Asahan	0	0	0	1	0	7
Simalungun	0	0	0	0	2	8
Dairi	0	0	0	0	3	4
Karo	0	0	0	1	5	9
Deli Serdang	0	0	1	3	16	23
Langkat	0	0	0	6	7	19
Nias Selatan	0	0	1	0	0	3
Humbang Hasundutan	0	0	0	0	0	1
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1
Samosir	0	0	0	0	0	3
Serdang Bedagai	0	0	0	1	1	26
Batubara	0	0	1	1	3	4
Padang Lawas Utara	0	0	0	0	2	8
Padang Lawas	0	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	0	0	1	0	2	5
Labuhanbatu Utara	0	0	6	4	5	11
Nias Utara	0	0	0	2	3	0
Nias Barat	0	0	0	0	1	0
Sibolga	0	0	0	0	1	0
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	2	0	0
Tebing Tinggi	0	0	0	2	0	20
Medan	0	0	3	8	3	18
Binjai	0	0	0	0	1	5
Padangsidempuan	0	0	0	0	1	1
Gunungsitoli	0	0	1	5	0	0
Sumatera Utara	0	0	19	40	82	229

Tabel L-9.6. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur						Total
	18 Tahun Ke Atas						
	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat	Sekolah	Lainnya	
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Nias	0	0	0	0	0	0	5
Mandailing Natal	4	0	13	0	0	1	50
Tapanuli Selatan	8	0	0	0	0	1	44
Tapanuli Tengah	26	0	5	0	0	2	65
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	1	1
Toba Samosir	14	0	1	0	0	1	48
Labuhanbatu	12	0	0	0	0	1	69
Asahan	8	0	0	0	0	0	17
Simalungun	5	0	1	0	0	0	20
Dairi	11	1	2	0	0	1	33
Karo	7	0	1	0	0	1	30
Deli Serdang	37	2	3	0	0	22	174
Langkat	23	0	2	0	0	1	95
Nias Selatan	2	0	0	0	0	1	14
Humbang Hasundutan	5	0	0	0	0	0	9
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	1	2
Samosir	0	0	0	0	0	0	9
Serdang Bedagai	8	0	0	0	0	7	59
Batubara	8	2	1	0	0	0	36
Padang Lawas Utara	3	0	0	0	0	0	14
Padang Lawas	0	0	0	0	0	1	3
Labuhanbatu Selatan	1	0	0	0	0	0	28
Labuhanbatu Utara	22	0	0	0	0	1	77
Nias Utara	0	0	0	0	0	0	8
Nias Barat	0	0	0	0	0	0	2
Sibolga	4	0	0	0	0	0	9
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	29	0	24	0	1	0	88
Tebing Tinggi	23	0	3	0	0	3	110
Medan	26	1	2	0	0	3	189
Binjai	7	0	1	0	0	0	22
Padangsidempuan	3	0	0	0	0	0	11
Gunungsitoli	6	0	0	0	0	0	17
Sumatera Utara	302	6	59	0	1	49	1 360

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Jenis Layanan yang Diberikan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17 Tahun			
	Pengaduan		Kesehatan	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	2	3	0	0
Mandailing Natal	15	17	1	6
Tapanuli Selatan	10	26	0	0
Tapanuli Tengah	10	23	6	8
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Toba Samosir	10	26	0	0
Labuhanbatu	24	33	0	2
Asahan	0	9	0	0
Simalungun	6	17	1	0
Dairi	4	19	4	10
Karo	5	15	3	3
Deli Serdang	41	73	13	24
Langkat	13	60	0	6
Nias Selatan	7	8	0	0
Humbang Hasundutan	0	5	0	0
Pakpak Bharat	0	1	0	0
Samosir	1	8	0	0
Serdang Bedagai	3	40	0	13
Batubara	13	15	1	5
Padang Lawas Utara	3	9	0	1
Padang Lawas	0	2	0	0
Labuhanbatu Selatan	13	14	0	0
Labuhanbatu Utara	15	39	5	8
Nias Utara	4	4	1	2
Nias Barat	1	1	0	0
Sibolga	2	3	0	2
Tanjungbalai	0	2	0	0
Pematangsiantar	13	20	0	0
Tebing Tinggi	13	79	7	31
Medan	51	82	19	21
Binjai	3	12	3	7
Padangsidempuan	4	2	0	1
Gunungsitoli	10	14	1	3
Sumatera Utara	296	681	66	153

Tabel L-9.7. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17 Tahun			
	Penegakan Hukum		Bantuan Hukum	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	0	0	0	0
Tapanuli Selatan	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	5	10
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	0	0
Labuhanbatu	0	0	0	1
Asahan	0	1	0	1
Simalungun	0	0	0	0
Dairi	0	0	0	0
Karo	0	0	2	1
Deli Serdang	1	2	6	22
Langkat	10	36	0	24
Nias Selatan	0	0	0	1
Humbang Hasundutan	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	0
Serdang Bedagai	0	2	0	0
Batubara	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0
Nias Utara	0	0	1	2
Nias Barat	0	0	0	0
Sibolga	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	2	4	15
Medan	0	1	41	68
Binjai	0	3	2	10
Padangsidempuan	0	0	1	0
Gunungsitoli	0	0	2	1
Sumatera Utara	11	47	77	176

Tabel L-9.7. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17 Tahun			
	Rehabilitasi Sosial		Reintegrasi Sosial	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	1	0	0	0
Tapanuli Selatan	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	0	0
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	0	0
Labuhanbatu	0	0	0	0
Asahan	0	0	0	0
Simalungun	0	0	0	0
Dairi	0	0	0	0
Karo	0	0	1	0
Deli Serdang	1	0	0	0
Langkat	0	1	0	0
Nias Selatan	0	0	0	0
Humbang Hasundutan	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	0
Serdang Bedagai	0	0	0	0
Batubara	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
Labuhanbatu Utara	0	11	0	0
Nias Utara	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0
Sibolga	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	0	0	0
Medan	8	7	0	0
Binjai	0	1	0	0
Padangsidempuan	3	1	0	0
Gunungsitoli	3	0	0	0
Sumatera Utara	16	23	1	0

Tabel L-9.7. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17 Tahun			
	Pemulangan		Pendampingan Tokoh	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(14)	(15)	(16)	(17)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	2	0	0	0
Tapanuli Selatan	0	0	0	0
Tapanuli Tengah	0	0	0	0
Tapanuli Utara	0	0	0	0
Toba Samosir	0	0	0	0
Labuhanbatu	0	0	0	0
Asahan	0	0	0	0
Simalungun	0	0	0	0
Dairi	0	0	0	0
Karo	2	7	1	7
Deli Serdang	0	0	0	0
Langkat	0	0	0	0
Nias Selatan	0	0	0	0
Humbang Hasundutan	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	0	0	0
Serdang Bedagai	0	0	0	0
Batubara	0	0	0	0
Padang Lawas Utara	0	0	0	0
Padang Lawas	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0
Nias Utara	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0
Sibolga	0	0	0	0
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	0	0	0	0
Tebing Tinggi	0	0	0	0
Medan	1	2	0	0
Binjai	0	3	0	0
Padangsidempuan	0	0	0	0
Gunungsitoli	0	2	1	0
Sumatera Utara	10	14	2	7

Tabel L-9.7. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	18 Tahun Ke Atas			
	Pengaduan	Kesehatan	Penegakan Hukum	Bantuan Hukum
(1)	(18)	(19)	(20)	(21)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	22	2	0	0
Tapanuli Selatan	9	0	0	0
Tapanuli Tengah	34	13	2	15
Tapanuli Utara	2	0	0	0
Toba Samosir	23	0	0	0
Labuhanbatu	15	1	1	0
Asahan	8	0	1	5
Simalungun	12	1	0	0
Dairi	40	11	0	1
Karo	9	5	0	1
Deli Serdang	75	41	6	17
Langkat	30	1	11	14
Nias Selatan	3	0	0	0
Humbang Hasundutan	6	0	0	0
Pakpak Bharat	1	0	0	1
Samosir	0	0	0	0
Serdang Bedagai	17	5	1	0
Batubara	11	0	0	0
Padang Lawas Utara	3	0	0	0
Padang Lawas	1	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	1	0	0	0
Labuhanbatu Utara	25	0	0	0
Nias Utara	0	0	0	0
Nias Barat	0	0	0	0
Sibolga	4	0	0	0
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	60	1	0	0
Tebing Tinggi	39	15	0	6
Medan	37	6	0	20
Binjai	8	5	1	6
Padangsidempuan	4	0	0	0
Gunungsitoli	12	1	0	1
Sumatera Utara	511	108	23	87

Tabel L-9.7. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total
	18 Tahun Ke Atas				
	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh	
(1)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Nias	0	0	0	0	5
Mandailing Natal	6	0	1	0	73
Tapanuli Selatan	0	0	0	0	45
Tapanuli Tengah	0	0	0	0	126
Tapanuli Utara	0	0	0	0	2
Toba Samosir	0	0	0	0	59
Labuhanbatu	0	0	0	0	77
Asahan	0	1	0	6	32
Simalungun	0	0	0	0	37
Dairi	0	0	0	0	89
Karo	0	0	1	4	67
Deli Serdang	6	0	0	0	328
Langkat	0	0	0	0	206
Nias Selatan	0	0	0	0	19
Humbang Hasundutan	0	0	0	0	11
Pakpak Bharat	0	0	0	0	3
Samosir	0	0	0	0	9
Serdang Bedagai	0	0	0	0	81
Batubara	2	1	0	1	49
Padang Lawas Utara	0	0	0	0	16
Padang Lawas	0	0	0	0	3
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	0	28
Labuhanbatu Utara	0	0	0	0	103
Nias Utara	0	0	0	0	14
Nias Barat	0	0	0	0	2
Sibolga	0	0	1	0	12
Tanjungbalai	0	0	0	0	2
Pematangsiantar	0	0	0	0	94
Tebing Tinggi	0	0	0	0	211
Medan	10	0	1	0	375
Binjai	0	0	0	0	64
Padangsidempuan	4	0	0	0	20
Gunungsitoli	0	0	0	1	52
Sumatera Utara	28	2	4	12	2 355

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.8 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			
	0-17		18-24	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	0	0	3	0
Tapanuli Selatan	13	0	6	0
Tapanuli Tengah	9	0	9	0
Tapanuli Utara	0	0	1	0
Toba Samosir	8	0	3	1
Labuhanbatu	6	0	8	0
Asahan	2	0	5	0
Simalungun	1	0	3	0
Dairi	9	0	5	1
Karo	4	2	5	1
Deli Serdang	8	1	21	2
Langkat	16	0	22	2
Nias Selatan	2	0	1	0
Humbang Hasundutan	0	0	0	0
Pakpak Bharat	0	0	0	0
Samosir	0	0	2	0
Serdang Bedagai	9	1	8	0
Batubara	0	1	3	0
Padang Lawas Utara	0	0	2	0
Padang Lawas	0	0	0	0
Labuhanbatu Selatan	1	0	7	0
Labuhanbatu Utara	8	3	14	0
Nias Utara	3	0	0	0
Nias Barat	0	0	1	0
Sibolga	1	0	0	0
Tanjungbalai	0	0	0	0
Pematangsiantar	10	0	13	2
Tebing Tinggi	14	2	15	2
Medan	14	6	13	1
Binjai	2	0	2	0
Padangsidempuan	3	0	0	0
Gunungsitoli	5	0	1	0
Sumatera Utara	148	16	173	12

Tabel L-9.8. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Total
	25-29		60 +		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nias	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	5	1	1	0	10
Tapanuli Selatan	21	2	3	0	45
Tapanuli Tengah	36	6	4	0	64
Tapanuli Utara	0	0	0	0	1
Toba Samosir	32	2	2	0	48
Labuhanbatu	15	0	0	0	29
Asahan	7	1	0	0	15
Simalungun	12	0	2	0	18
Dairi	19	2	1	0	37
Karo	8	0	2	1	23
Deli Serdang	88	13	3	0	136
Langkat	44	7	0	0	91
Nias Selatan	9	1	1	0	14
Humbang Hasundutan	6	0	0	0	6
Pakpak Bharat	2	0	0	0	2
Samosir	6	0	0	1	9
Serdang Bedagai	22	2	3	0	45
Batubara	23	2	0	0	29
Padang Lawas Utara	4	1	0	0	7
Padang Lawas	2	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	14	1	0	0	23
Labuhanbatu Utara	43	3	1	0	72
Nias Utara	7	0	0	0	10
Nias Barat	0	1	0	0	2
Sibolga	4	0	0	0	5
Tanjungbalai	0	0	0	1	1
Pematangsiantar	47	16	5	0	93
Tebing Tinggi	49	5	12	0	99
Medan	115	27	5	2	183
Binjai	16	1	0	0	21
Padangsidempuan	5	0	0	0	8
Gunungsitoli	10	4	1	0	21
Sumatera Utara	671	98	46	5	1 169

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.9 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kewarganegaraan			Total
	WNI	WNA	Tidak Diketahui	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	0	0	0	0
Mandailing Natal	8	0	2	10
Tapanuli Selatan	43	0	2	45
Tapanuli Tengah	54	0	10	64
Tapanuli Utara	1	0	0	1
Toba Samosir	39	0	9	48
Labuhanbatu	14	0	15	29
Asahan	10	0	5	15
Simalungun	14	1	3	18
Dairi	32	0	5	37
Karo	17	0	6	23
Deli Serdang	107	2	27	136
Langkat	75	0	16	91
Nias Selatan	10	0	4	14
Humbang Hasundutan	5	0	1	6
Pakpak Bharat	2	0	0	2
Samosir	8	0	1	9
Serdang Bedagai	34	0	11	45
Batubara	26	0	3	29
Padang Lawas Utara	6	0	1	7
Padang Lawas	2	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	21	0	2	23
Labuhanbatu Utara	62	0	10	72
Nias Utara	10	0	0	10
Nias Barat	1	0	1	2
Sibolga	5	0	0	5
Tanjungbalai	0	0	1	1
Pematangsiantar	75	0	18	93
Tebing Tinggi	86	0	13	99
Medan	134	2	47	183
Binjai	17	0	4	21
Padangsidempuan	8	0	0	8
Gunungsitoli	17	0	4	21
Sumatera Utara	943	5	221	1 169

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

Tabel L-9.10 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Korban dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2018

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				
	Suami/ Istri	Orang Tua	Keluarga/ Saudara	Pacar/ Teman	Tetangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	1	2	1	2	1
Tapanuli Selatan	7	1	2	2	4
Tapanuli Tengah	26	3	2	6	12
Tapanuli Utara	0	0	0	1	0
Toba Samosir	14	9	4	4	11
Labuhanbatu	11	0	0	6	5
Asahan	7	1	1	4	0
Simalungun	4	4	0	6	1
Dairi	10	0	5	9	11
Karo	2	3	1	7	0
Deli Serdang	22	40	17	21	17
Langkat	17	10	7	14	14
Nias Selatan	2	0	0	2	2
Humbang Hasundutan	3	0	0	0	2
Pakpak Bharat	0	0	1	1	0
Samosir	0	1	2	0	3
Serdang Bedagai	7	7	3	5	5
Batubara	6	15	1	4	4
Padang Lawas Utara	1	2	0	0	9
Padang Lawas	0	0	2	0	0
Labuhanbatu Selatan	2	5	0	1	1
Labuhanbatu Utara	16	8	2	15	24
Nias Utara	0	0	3	0	4
Nias Barat	0	0	1	0	0
Sibolga	2	2	0	0	1
Tanjungbalai	0	0	1	0	0
Pematangsiantar	28	8	2	11	16
Tebing Tinggi	2	13	9	31	22
Medan	29	126	14	26	16
Binjai	4	2	4	2	4
Padangsidempuan	2	8	0	0	1
Gunungsitoli	5	8	0	5	0
Sumatera Utara	230	278	85	185	190

Tabel L-9.10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Tidak Diketahui	Total
	Guru	Majikan	Rekan Kerja	Lainnya		
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nias	0	0	0	0	0	0
Mandailing Natal	2	0	0	0	1	10
Tapanuli Selatan	0	0	0	28	1	45
Tapanuli Tengah	1	0	0	14	0	64
Tapanuli Utara	0	0	0	0	0	1
Toba Samosir	0	0	0	10	1	53
Labuhanbatu	0	0	0	2	5	29
Asahan	1	0	0	1	0	15
Simalungun	0	0	0	2	3	20
Dairi	1	0	1	2	1	40
Karo	0	0	0	9	0	22
Deli Serdang	1	0	0	40	2	160
Langkat	2	0	0	14	17	95
Nias Selatan	2	0	0	0	6	14
Humbang Hasundutan	0	0	0	1	0	6
Pakpak Bharat	0	0	0	0	0	2
Samosir	0	0	0	3	0	9
Serdang Bedagai	1	0	0	3	14	45
Batubara	0	1	0	6	0	37
Padang Lawas Utara	0	0	0	2	0	14
Padang Lawas	0	0	0	0	0	2
Labuhanbatu Selatan	0	0	0	14	1	24
Labuhanbatu Utara	4	0	0	6	2	77
Nias Utara	1	0	0	1	1	10
Nias Barat	0	0	0	1	0	2
Sibolga	0	0	0	0	0	5
Tanjungbalai	0	0	0	0	0	1
Pematangsiantar	1	5	0	31	0	102
Tebing Tinggi	0	0	0	13	0	90
Medan	2	2	0	27	13	255
Binjai	2	0	0	2	6	26
Padangsidempuan	0	0	0	1	0	12
Gunungsitoli	11	0	0	9	1	39
Sumatera Utara	32	8	1	242	75	1 326

Sumber: Dinas PPPA Provsu (simfoni PPA kondisi 02 April 2019)

